KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DJPb
Indonesian Treasury

KAJIAN FISKAL REGIONAL
Tahun 2021

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

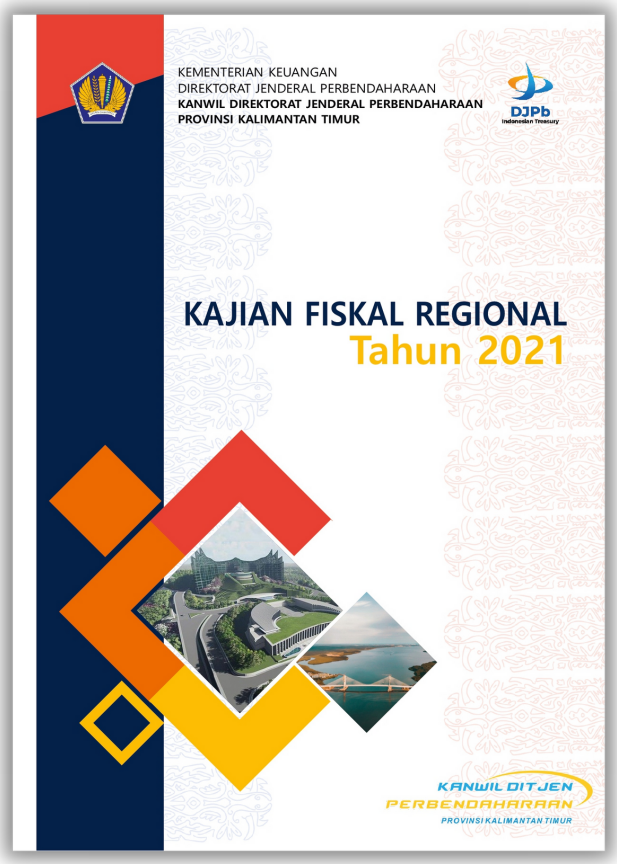

KAJIAN FISKAL REGIONAL |**KFR**| - Kajian resmi yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Kajian ini berisi analisis fiskal dan makro ekonomi regional Kalimantan Timur yang diterbitkan setiap triwulanan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan izin-Nya maka Kajian Fiskal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 ini bisa diselesaikan. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, informasi maupun masukan yang sangat membantu penyelesaian kajian ini.

Perekonomian regional Kalimantan Timur tahun 2021 tumbuh positif sebesar 2,48 persen (*yoy*). Hal tersebut menjadi bukti keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat *counter-cyclical* dan ekspansif sebagai respon terhadap pandemi Covid-19. Penerapan kebijakan PPKM juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tetap dilanjutkan dan ditambah alokasi pagunya sebagai wujud optimalisasi peran kebijakan fiskal. Dalam kaitannya untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (*SDGs*), investasi pada sektor industri pengolahan, konstruksi dan transportasi menjadi satu hal yang menarik, dikarenakan sektor ini mempunyai *multiplier effect* baik *backward* maupun *forward linkage*. Sektor-sektor tersebut bisa menjadi alternatif transformasi struktur ekonomi Kaltim yang selama ini hanya mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian.

Kajian Fiskal Regional ini disusun sebagai salah satu bentuk peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dan *Regional Chief Economist* (*RCE*) di daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi fiskal regional, yang terdiri dari indikator ekonomi, indikator kesejahteraan, kinerja pelaksanaan APBN-APBD serta isu strategis daerah. Selanjutnya, di bagian akhir disampaikan analisis tematik mengenai Peran Fiskal dalam Peningkatan Kualitas SDM, Analisis Indeks Pembangunan Manusia dalam upaya memberikan bukti/ *evidence* guna penyusunan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kajian ini, diharapkan kebijakan fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dirumuskan, direncanakan dan diimplementasikan lebih baik untuk mewujudkan konsep *research-based policy making*. Upaya ini diyakini akan menjadi stimulus sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks kekinian, hal tersebut tentunya sangat penting bagi regional Kaltim mengingat pandemi Covid-19 masih terus berkembang, sehingga kita harus dapat mengantisipasi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Kami menyadari bahwa kajian ini tentunya masih banyak kekurangan, karena keterbatasan data ataupun kekhilafan tim penyusun. Masukan, saran atau bahkan kritik tentunya sangat kami harapkan untuk perbaikan kajian ini dimasa mendatang.

Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sehat.

Samarinda, 15 Februari 2022

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur

M U H D I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR GAMBAR xi
ABREVIASI xii
RINGKASAN EKSEKUTIF xiii
DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL
BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH
1.1. Pendahuluan 1
1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 1
1.3. Tantangan Daerah 3
1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah 3
1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan 6
1.3.3. Tantangan Geografi Wilayah 7
1.3.4. Tantangan Daerah Sebagai Dampak Covid-19 8
BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL
2.1. Analisis Indikator Makro Ekonomi 9
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 9
2.1.2. Suku bunga 15
2.1.3. Inflasi 15
2.1.4. Nilai tukar 16
2.1.5. Mobilitas Masyarakat 17
2.1.6. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 18
2.1.7. Priwisata 18
2.2. Analisis Indikator Kesejahteraan 18
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 19
2.2.2. Tingkat Kemiskinan 19
2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 21
2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran 21
2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 23
2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 23
2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional 24
2.4. Prospek Perekonomian Daerah 25
BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL
3.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 26
3.1.1. Pendapatan Negara 26
3.1.2. Belanja Negara 29
3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 31
3.1.4. Surplus/ Defisit APBN 34
3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat 34
3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat 36
3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah 39

3.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda) 40
3.2.1. Pendapatan Daerah 40
3.2.2. Belanja Daerah 44
3.2.3. Surplus/ Defisit APBD 49
3.2.4. Pembiayaan Daerah 49
3.2.5. Perkembangan BLU Daerah 50
3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD 51
3.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 51
3.3.1. Pendapatan Konsolidasian 52
3.3.2. Belanja Konsolidasian 53
3.3.3. Surplus/ Defisit 54
3.3.4. Pembiayaan Konsolidasian 54
3.3.5. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian 54

BAB IV ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

4.1. Pendahuluan 55
4.2. Sektor Unggulan Daerah 58
4.2.1. Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha 59
4.2.2. Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan 61
4.2.3. Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah. 62
4.2.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD 62
4.2.5. Tantangan Fiskal Pada Sektor Unggulan Daerah 63
4.2.6. Dukungan Kebijakan dan Stimulus yang Diperlukan 63
4.3. Sektor Potensial Daerah 63
4.3.1. Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha 64
4.3.2. Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan 65
4.3.3. Kontribusi Sektor PotensialDaerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah.... 66
4.3.4. Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD 66
4.3.5. Tantangan Fiskal Pada Sektor Potensial Daerah 67
4.3.6. Dukungan Kebijakan dan Stimulus yang Diperlukan 67
4.4. Komoditas/ Produk dan Jenis Usaha Unggulan UMKM 67

BAB V ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Pendahuluan 70
5.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa 71
5.2.1. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik 71
5.2.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik 73
5.2.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa 73
5.3. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis Prioritas Nasional Pada RPJMN/D 74
5.3.1. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 2 74
5.3.2. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 3 75
5.3.3. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 5 77
5.4. Tantangan dan Evaluasi 77
5.5. Perbandingan Keuangan Daerah 81

BAB VI ANALISIS TEMATIK

6.1. Pendahuluan 83
6.1.1. Latar Belakang 83
6.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup 84
6.1.3. Studi Literatur 84
6.1.4. Metode Analisis 86
6.2. Perkembangan IPM dan Belanja Pemerintah 87
6.2.1. Indeks Pembangunan Manusia 87
6.2.2. Belanja Pemerintah untuk Meningkatkan IPM 88
6.2.3. Capaian Output Strategis 91
6.3. Analisis dan Pembahasan 92
6.4. Simpulan dan Saran 93

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan 95
7.2. Rekomendasi 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan pada RKPD Prov. Kaltim 2021	2
Tabel 1.2	Data Pertambangan dan Kemiskinan per Kab./ Kota tahun 2021	4
Tabel 1.3	Distribusi Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha 2019-2021	4
Tabel 1.4	Tingkat Pengangguran dan Angkatan Kerja 2016-2021	4
Tabel 1.5	Rasio Elektrifikasi Kaltim 2019-2021(persen)	5
Tabel 1.6	Ketimpangan Perekonomian Antar Gender di Kaltim tahun 2020	6
Tabel 1.7	Luas Wilayah Kab./ Kota dan Wilayah Administratif di Provinsi Kaltim	6
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (*yoy* dan *qtq*) Q4 2021 (ADHK)	11
Tabel 2.2	Komposisi dan Kontribusi Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2021 (ADHB)	12
Tabel 2.3	Komposisi dan Kontrbusi per Sektor Lapangan Usaha 2021 (ADHB)	13
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB per Sektor Lapangan Usaha Q4 2021(ADHK)	13
Tabel 2.5	Peranan Sektor Unggulan Q4 2021	14
Tabel 2.6	Tren PDRB per Kapita Prov./ Kab./ Kota 2016-2021	14
Tabel 2.7	Inflasi Per Kelompok Pengeluaran Kaltim 2021	16
Tabel 2.8	Perbandingan IDG dan IPG per Pemda se-Kaltim 2018-2020	19
Tabel 2.9	Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah di Kaltim 2019-2021	20
Tabel 2.10	Tingkat Kemiskinan Per Pemda di Kaltim 2019-2021 (persen)	20
Tabel 2.11	Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Pembangunan Prov. Kaltim 2021	24
Tabel 2.12	Perbandingan Indikator Kesejahtraan Rakyat Regional Kalimantan 2021	24
Tabel 3.1	*I-Accunt* APBN Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	26
Tabel 3.2	Perkembangan Pendapatan Perpajakan Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	27
Tabel 3.3	Perkembangan dan Komposisi Pendapatan Perpajakan Kaltim 2019-2021	28
Tabel 3.4	Rasio Pajak terhadap PDRB pada 7 LU Kaltim 2019-2021	28
Tabel 3.5	Realisasi Insentif Pajak Kaltim 2020-2021 (miliar rupiah)	28
Tabel 3.6	Target dan Realisasi PNBP kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	29
Tabel 3.7	Nilai Aset dan pagu BLU Pusat Tahun 2021 (miliar rupiah)	34
Tabel 3.8	Perkembangan Pagu BLU Pusat tahun 2019-2021 (miliar rupiah)	35
Tabel 3.9	Perkembangan KUR per Kab./ Kota di Kaltim 2019-2021	37
Tabel 3.10	Perkembangan UMi per Kab./ Kota di Kaltim 2019-2021	38
Tabel 3.11	*I-Account* APBD Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	40
Tabel 3.12	Penyertaan Modal se-Kaltim 2021	49
Tabel 3.13	Peta Kapasitas Fiskal Prov./ Kab./ Kota se-Kaltim 2021	51
Tabel 3.14	I-Account Realisasi Anggaran Konsolidasian Wilayah Prov. Kaltim 2019-2021	51
Tabel 3.15	Komponen Belanja Konsolidasian Kaltim 2019-2021	53
Tabel 3.16	Pertumbuhan Komponen Belanja Konsolidasian Kaltim 2019-2021	53
Tabel 3.17	Analisis Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap	

	Perekonomian Regional Kaltim 2019-2021	54
Tabel 4.1	Angka Pengganda Output dan Pendapatan Menurut Industri Kaltim	57
Tabel 4.2	Nilai Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Menurut Industri Kaltim	58
Tabel 4.3	Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Ketenagakerjaan Kaltim 2019-2021	61
Tabel 4.4	Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Pendapatan Negara Regional Kaltim 2019-2021	62
Tabel 4.5	Dukungan Alokasi APBD Kaltim 2021 untuk Sektor Unggulan	62
Tabel 4.6	Kontribusi Sektor Potensial terhadap Ketenagakerjaan Kaltim 2019-2021	65
Tabel 4.7	Kontribusi Sektor Potensial terhadap Pendapatan Negara Regional Kaltim 2019-2021	66
Tabel 4.8	Dukungan Alokasi APBD Kaltim 2021untuk Sektor Potensial	66
Tabel 4.9	Dukungan Alokasi APBN Regional Kaltim 2021 untuk Sektor Potensial	67
Tabel 4.10	Dukungan Alokasi APBD Kaltim 2021 Sektor UMKM	69
Tabel 4.11	Dukungan Alokasi APBN Regional Kaltim 2021 Sektor UMKM	69
Tabel 5.1	Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Kaltim 2021	71
Tabel 5.2	Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik Kaltim 2021	73
Tabel 5.3	Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa Kaltim 2021	73
Tabel 5.4	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah berbasis PN 2	74
Tabel 5.5	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah berbasis PN 3	75
Tabel 5.6	Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah berbasis PN 5	77
Tabel 5.7	Tantangan dan Masalah dalam HKPD	77
Tabel 6.1	Perbandingan Sasaran dan Capaian IPM Nasional dan Kaltim 2021	83
Tabel 6.2	Perkembangan Sasaran dn Capaian IPM Nasional dan Kaltim 2017-2021	87
Tabel 6.3	Perkembangan IPM per Indikator Kaltim 2017-2021	87
Tabel 6.4	Perkembangan Capaian IPM Kab./ Kota se-Kaltim 2017-2021	88
Tabel 6.5	Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan Kaltim 2021	91
Tabel 6.6	Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan Kaltim 2021	91
Tabel 6.7	Capaian Output Strategis Belanja Ekonomi Kaltim 2021	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Misi Pembangunan Kaltim 2019-2023	2
Grafik 1.2	Tren Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2016-2020	3
Grafik 1.3	Tren Pertumbuhan Investasi di Kaltim 2016-2021	4
Grafik 1.4	Struktur Jalan di Provinsi Kalimantan Timur 2021	5
Grafik 1.5	Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Timur 2021	5
Grafik 1.6	Indeks Pembangunan Manusia per Kab./ Kota di Kaltim 2021	6
Grafik 1.7	Perkembangan Covid-19 Kalimantan Timur 2021	8
Grafik 1.8	Perkembangan Vaksinasi Covid-19 Kalimantan Timur 2021	8
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan Nasional 2019-2021 (ADHK)	9
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan Nasional Q4 2021	10
Grafik 2.3	Struktur Perekonomian Kalimantan Q4 2021	10
Grafik 2.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim tahun 2016-2021	11
Grafik 2.5	Tren Pertumbuhan PDRB (*yoy*) dan Belanja Pemerintah 2019-2021	11
Grafik 2.6	Tren Ekspor Kaltim dan HBA tahun 2021	12
Grafik 2.7	Tren PDRB per Kapita Kaltim dan Nasional 2016-2021	14
Grafik 2.8	Perkembangan BI7DRR dan Rata-rata Suku Bunga Kredit Kaltim 2019-2021	15
Grafik 2.9	Perkembangan Inflasi (*mtm*) Kaltim 2019-2021	16
Grafik 2.10	Perkembangan Inflasi (*yoy*) Kaltim 2019-2021	16
Grafik 2.11	Nilai Tukar IDR terhadap USD Kaltim 2019-2021	17
Grafik 2.12	IKK Kaltim dan Nasional 2020-2021	18
Grafik 2.13	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) kaltim 2019-2021	18
Grafik 2.14	Perkembangan IPM Per Provinsi di Kalimantan 2019-2021	19
Grafik 2.15	Tren Tingkat Kemiskinan Kaltim 2019-2021	19
Grafik 2.16	Perkembangan Rasio Gini, Tingkat Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Kaltim 2019-2021	21
Grafik 2.17	Perkembangan Tingkat Ketenagakerjaan dan Pengangguran Kaltim 2019-2021	21
Grafik 2.18	Komposisi Status Pekerja di Kaltim 2021 (persen)	22
Grafik 2.19	Komposisi Pekerja Menurut Tingka Pendidikan di Kaltim 2021 (persen)	22
Grafik 2.20	Perkembangan NTP Kaltim dan Nasional 2020-2021	23
Grafik 2.21	Perkembangan NTN Kaltim dan Nasional 2020-2021	23
Grafik 3.1	Pendapatan Negara Regional kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	26
Grafik 3.2	Perkembangan dan Komposisi Pendapatan Perpajakan Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	27
Grafik 3.3	Tren Rasio Pajak Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	28
Grafik 3.4	Perkembangan dan Komposisi PNBP Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	29
Grafik 3.5	Pertumbuhan PNBP Kaltim 2019-2021	29
Grafik 3.6	Perkembangan Belanja Negara Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	29
Grafik 3.7	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Regional Kaltim 2019-2021 (miliar rupiah)	30
Grafik 3.8	Perkembangan BPP per Jenis Belanja Kaltim 2019-2021	30
Grafik 3.9	Perkembangan BPP pada 10 K/L Terbesar Kaltim 2021	30

Grafik 3.10 Perkembangan BPP per Fungsi Kaltim 2019-2021 31
Grafik 3.11 Struktur Realisasi TKDD Kaltim 2019-2021 31
Grafik 3.12 Realisasi TKDD Kaltim 2021 31
Grafik 3.13 Perkembangan DAU Kaltim 2019-2021 (triliun rupiah) 32
Grafik 3.14 Perkembangan DBH Kaltim 2019-2021 (triliun rupiah) 32
Grafik 3.15 Perkembangan DAK Fisik Kaltim 2019-2021(triliun rupiah 32
Grafik 3.16 Perkembangan DAK Nonfisik Kaltim 2019-2021 (triliun rupiah) 33
Grafik 3.17 Perkembangan DID Kaltim 2019-2021 (triliun rupiah) 33
Grafik 3.18 Perkembangan Dana Desa Kaltim 2019-2021 (triliun rupiah) 34
Grafik 3.19 Perkembangan Surplus/ Defisit Kaltim 2019-2021 34
Grafik 3.20 Perkembangan Nilai Aset dan Pagu BLU Pusat di Kaltim 2019-2021..... 35
Grafik 3.21 Perkembangan Kemandirian BLU Pusat di Kaltim 2019-2021 36
Grafik 3.22 Perkembangan Kemandirian Satker PNBP Potensial Kaltim 2019-2021. 36
Grafik 3.23 Perkembangan KUR di Kaltim 2019-2021 36
Grafik 3.24 Perkembangan Skema KUR di Kaltim 2019-2021 37
Grafik 3.25 Perkembangan KUR pada 5 LU Terbesar di Kaltim 2019-2021..... 37
Grafik 3.26 Perkembangan UMi di Kaltim 2019-2021 38
Grafik 3.27 Perkembangan UMi per Penyalur di Kaltim 2019-2021 38
Grafik 3.28 Perkembangan Pendapatan APBD se-Kaltim 2019-2021 41
Grafik 3.29 Perkembangan dan Komposisi PAD 2019-2021 41
Grafik 3.30 Pertumbuhan PAD 2019-2021 42
Grafik 3.31 Kontribusi PAD terhadap PDRB 2019-2021 42
Grafik 3.32 Komposisi PAD terhadap Pendapatan APBD per Kab. Kota 2019-2021 42
Grafik 3.33 Perkembangan Pendapatan Transfer 2019-2021 43
Grafik 3.34 Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan APBD 2021 43
Grafik 3.35 Pertumbuhan Pendapatan Transfer 2019-2021 43
Grafik 3.36 Perkembangan LLPDyS 2019-2021 44
Grafik 3.37 Pertumbuhan LLPDyS 2019-2021 44
Grafik 3.38 Pagu dan Realisasi Belanja APBD 2019-2021 45
Grafik 3.39 Komposisi Realisasi Belanja APBD 2019-2021 45
Grafik 3.40 Komposisi Realisasi Belanja per Pemda 2021 46
Grafik 3.41 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi 2019-2021 46
Grafik 3.42 Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Operasi 2019-2021 46
Grafik 3.43 Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Modal 2019-2021 47
Grafik 3.44 Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Tak Terduga 2019-2021 47
Grafik 3.45 Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Transfer 2019-2021 48
Grafik 3.46 Perkembangan Realisasi Belanja per Fungsi 2019-2021 48
Grafik 3.47 Pertumbuhan Belanja per Fungsi 2021 49
Grafik 3.48 Perkembangan Surplus/ Defisit Kaltim 2019-2021 49
Grafik 3.49 Analisis Pendapatan DBH dan DAU dibanding SILPA Kaltim 2019-2021 50
Grafik 3.50 Profil BLUD Per Bidang Layanan tahun 2021 50
Grafik 3.51 Komposisi Komponen Pendapatan Konsolidasian Kaltim 2019-2021 52
Grafik 3.52 Analisis Pertumbuhan Komponen Pendapatan Konsolidasian Kaltim 2019-2021 52
Grafik 3.53 Komposisi Kontribusi Pusat dan Daerah pada Pendapatan Konsolidasian Kaltim 2019-2021 52
Grafik 3.54 Analisis Tax Ratio Kaltim 2019-2021 52

Grafik 3.55	Komposisi Kontribusi Komponen Belanja Konsolidasian Kaltim 2019-2021	53
Grafik 3.56	Analisis Kontribusi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kaltim 2021	53
Grafik 3.57	Analisis Pertumbuhan Surplus/ Defisit Konsolidasian Kaltim 2018-2021	54
Grafik 3.58	Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Konsolidasian Kaltim 2019-2021	54
Grafik 6.1	Proporsi Belanja APBN Kaltim per Fungsi 2016-2020	88
Grafik 6.2	Tren Alokasi dan Realisasi APBN Kaltim Fungsi Ekonomi 2016-2020	89
Grafik 6.3	Tren Alokasi dan Realisasi APBN Kaltim Fungsi Kesehatan 2016-2020	89
Grafik 6.4	Tren Alokasi dan Realisasi APBN Kaltim Fungsi Pendidikan 2016-2020	90
Grafik 6.5	Proporsi Belanja APBD kaltim per Fungsi 2016-2020	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sebaran Penduduk per Kab./ Kota di Kaltim 2020	6
Gambar 2.1	Google Mobility Index kalimantan Timur Desember 2021	17
Gambar 4.1	Tipologi Klassen Berdasarkan PDRB ADHK Lapangan Usaha Kaltim	56
Gambar 4.2	Profil Sektor Unggulan Kab./ Kota di Wilayah Kaltim 2021	59
Gambar 4.3	Profil Sektor Potensial Kaltim 2020-2021	64
Gambar 4.4	Profil Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha UMKM per Kab./ Kota di Wilayah Kaltim 2021	68

ABREVIASI

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
HBA	:	Harga Batubara Acuan
HKPD	:	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
IKN	:	Ibu Kota Negara
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
KEK	:	Kawasan Ekonomi Eksklusif
KPP	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata
KSNT	:	Kawasan Strategi Nasional Tertentu
KSP	:	Kawasan Strategis Provinsi
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
K/L	:	Kementerian/ Lembaga
LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
MEBE	:	*Monitoring Evaluation Budget Execution*
MBTK	:	Maloy Batuta Trans Kalimantan
mtm	:	*month-to-month*
NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
OMSPAN	:	*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PC-PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan Barang Mewah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SIKD	:	Sistem Informasi Keuangan Daerah
SIKP	:	Sistem Informasi Kredit Program
SNVT	:	Satuan Non Vertikal Tertentu
TWA	:	Taman Wisata Alam
UMi	:	Ultra Mikro
qtq	:	*quarter-to-quarter*
TKDD	:	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
yoy	:	*year-on-year*
ytd	:	*year-to-date*

EXECUTIVE SUMMARY

1. Kondisi, Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

1.1. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahunan tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019.

1.2. Visi dari RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 yaitu "Kalimantan Timur yang Berdaulat" yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan. Sedangkan Tema RKPD Tahun 2021 yaitu "Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

1.3. Tantangan ekonomi daerah utamanya berkaitan dengan bagaimana menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Transformasi struktur ekonomi dari *unrenewable resources* ke *renewable resources* dan pembangunan manusia yang lebih merata baik secara wilayah maupun gender.

1.4. Kaltim sedang menikmati masa bonus demografi. Hal ini ditandai dari persentase penduduk yang masih dalam usia produktif sebesar 70,28 persen jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif. Selain itu, Kaltim juga belum memasuki era *ageing population* dengan persentase penduduk lansia hanya 6,22 persen/ kurang dari 10 persen.

1.5. Tantangan dalam situasi pandemi adalah menjaga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan supaya penyebaran Covid-19 dapat terkendali sehingga tidak mengganggu perekonomian. Selain itu, membangkitkan sektor UMKM yang sangat terdampak oleh pandemi serta tetap melanjutkan program jaring pengaman sosial yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan

2.1. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tumbuh positif di level 2,48 persen, mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi pada sebesar 2,85 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi regional tersebut masih dibawah pertumbuhan nasional yang mencapai 3,69 persen. Akselerasi program vaksin dan *booster* memberikan kepercyaan diri pada masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Semua sektor lapangan usaha tumbuh positif kecuali dua sektor lapangan usaha yang terkontraksi yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan dan real estate.

2.2. Tingkat suku bunga kredit, laju inflasi dan nilai tukar mata uang (kurs) masih stabil sepanjang tahun 2021. Namun demikian, yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi dibandingkan dengan BI7DRR. Laju inflasi tetap rendah meskipun meningkat dibandingkan tahun lalu yang menandakan pulihnya daya beli masyarakat.

2.3. Mobilitas masyarakat Kaltim meningkat seiring dengan penurunan kasus positif Covid-19. Hal tersebut memicu peningkatan keyakinan konsumen akan keadaan perekonomian di masa sekarang maupun masa mendatang. Indeks keyakinan konsumen Kaltim berada di level 124,8, di atas tingkat nasional sebesar 118,3.

2.4. Capaian IPM Kaltim di level 76,88 menduduki posisi pertama apabila dibandingkan dengan provinsi lain se-Kalimantan. Sedangkan secara nasional, IPM Kaltim menduduki peringkat ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Namun demikian, capaian pemberdayaan dan pembangunan gender masih di bawah target nasional sehingga ketimpangan/ ketidaksetaraan gender masih relatif tinggi.

2.5. Tingkat kemiskinan Kaltim sebesar 6,27 persen pada September 2021 turun 0,37 persen poin (*yoy*). Sementara tingkat kemiskinan perkotaan di level 4,74 persen dan di perdesaan 9,63 persen. Garis kemiskinan tercatat sebesar Rp703.233,- per kapita per bulan. Tingkat ketimpangan juga mengalami penurunan 0,003 poin menjadi 0,331 di bulan September 2021. Selain itu, distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan ukuran Bank Dunia tercatat rendah, sebesar 20,62 persen pada kelompok penduduk 40 persen terbawah.

2.6. Secara *yoy*, Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur pada periode Agustus 2021 mengalami penurunan menjadi 6,83 persen walaupun masih lebih tinggi daripada tingkat nasional yang hanya 6,49 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga terpantau lebih rendah. Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Timur (21,99 persen), diikuti dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Perdagangan (20,84 persen), serta Akomodasi dan Makan Minum (7,66 persen).

2.7. Nilai Tukar Petani mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 129,93, sebaliknya Nilai Tukar Nelayan turun menjadi 102,00 dibandingkan tahun lalu. NTP Kaltim turun ke peringkat tiga di bawah Kalbar (143,61) dan Kalteng (131,07) untuk regional Kalimantan, walaupun masih jauh di atas NTP Nasional yang hanya 108,34.

3. Perkembangan dan Pengaruh Fiskal di Daerah (APBN-APBD)

3.1. APBN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mengalami defisit anggaran sebesar Rp8.030 miliar dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp22.355,63 miliar dan realisasi belanja negara sebesar Rp30.385,6 miliar. Defisit anggaran ini mengalami penurunan sebesar 45,26 persen (*yoy*).

3.2. Pendapatan negara tumbuh sebesar 27,04 persen (*yoy*) seiring pertumbuhan penerimaan pajak 28,19 persen (*yoy*) dan PNBP 15,00 persen (*yoy*). Bea keluar menjadi kontributor utama pertumbuhan penerimaan pajak dengan *growth* 7.797,49 persen (*yoy*). Sedangkan disisi PNBP, jasa layanan BLU menjadi kontributor utama pertumbuhan dengan angka 58,18 persen (*yoy*). Namun demikian, *Tax ratio* Kaltim relatif menurun dalam tiga tahun terakhir.

3.3. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh sebesar 10,01 persen (*yoy*), sedangkan realisasi TKDD mengalami kontraksi 11,33 persen (*yoy*). Kebijakan penyaluran BLT DD langsung tiga bulan ke rekening desa memberi dampak positif dengan telah tersalurkannya BLT DD seluruh desa di wilayah Kaltim sampai bulan ke-12.

3.4. Dari sisi pelaksanaan APBD tahun 2021, realisasi pendapatan daerah Kalimantan Timur tercatat Rp32,41 triliun atau sebesar 99,37 persen dari target dalam APBD Kaltim 2021. Apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu maka realisasi pendapatan daerah tersebut mengalami kontraksi 4,16 persen. Namun demikian, pendapatan asli daerah tumbuh positif sebesar 19,96 persen

3.5. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2021 mencapai Rp33,61 triliun dari pagu sebesar Rp40,21 triliun. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 1,17 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan realisasi tersebut ditunjang oleh komponen belanja operasi untuk jenis belanja barang dan jasa yang tumbuh 16,27 persen, disisi lain belanja pegawai turun 4,19 persen (*yoy*).

3.6. Tantangan pelaksanaan APBD tahun 2021 yaitu masih adanya kebijakan PPKM, *refocusing* dan realokasi belanja, keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan belanja pemerintah sebagai dampak dari pembatasan sosial pada kondisi pandemi Covid-19.

3.7. Total realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp30,54 triliun atau tumbuh 27,00 persen dibandingkan tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 68 persen merupakan pendapatan pemerintah pusat dan 32 persen merupakan pendapatan pemerintah daerah. Realisasi belanja dan transfer konsolidasian mencapai Rp41,33 triliun, tumbuh 7,65 persen, dimana 72 persen merupakan realisasi anggaran pemerintah daerah dan sisanya merupakan realisasi anggaran pemerintah pusat.

4. Analisis Tematik

4.1. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Sehingga pembangunan harus fokus pada manusia itu sendiri sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Namun hal ini seringkali dilupakan dan menganggap keberhasilan dari pembangunan hanya berorientasi pada aspek ekonomi.

4.2. Perkembangan IPM Kaltim menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, capaian IPM tersebut tidak selalu mencapai target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kaltim terutama di tahun 2017 dan 2018 yang masih mengacu pada RPJMD periode 2014-2018. Akan tetapi dalam tiga tahun terakhir capaian IPM Kaltim selalu berhasil melebihi target. Salah satu faktor yang mendukung ketercapaian IPM Kaltim terhadap targetnya adalah adanya penurunan target di RPJMD periode 2019-2023. Penurunan target tersebut

disesuaikan dengan kondisi terkini Kaltim dan mengakomodir adanya pemekaran wilayah baru yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

4.3. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh belanja pemerintah baik pusat maupun daerah yang tercermin dari APBN dan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model data panel dimana pendekatan ini membutuhkan data yang terukur. Variabel yang digunakan adalah belanja pemerintah (pusat dan daerah) fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai variabel independent dan IPM sebagai proksi dari kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependent.

4.4. Berdasarkan analisis, belanja fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap IPM Kaltim dengan kekuatan 48,3 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-veriabel yang lain. Namun secara parsial, hanya belanja fungsi kesehatan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan dua variabel lain berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

5. Rekomendasi Kebijakan

5.1. Akselerasi transformasi struktur perekonomian regional Kaltim, *unrenewable resources* ke *renewable resources*. Memberikan perhatian lebih baik program maupun alokasi dana untuk sektor-sektor potensial selain pertambangan dan penggalian, misalnya sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pariwisata. Untuk mendukung hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah, perlu dikeluarkan kebijakan insentif perpajakan. Misalnya memberikan insentif pajak pada barang jadi atau setengah jadi. Isu lingkungan imbas dari pertambangan dan penggalian harus lebih diperhatikan. Misalnya dengan pembatasan pembukaan lahan pertambangan baru dan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda untuk pemberian ijin pertambangan.

5.2. Untuk mendapatkan potensi pajak regional secara riil, perlu dibuat sistem yang dapat memberikan informasi setoran pajak atas objek pajak di daerah, bukan berdasarkan NPWP yang dimungkinkan dapat berasal dari luar daerah objek pajak. Sehingga rasio pajak riil daerah bisa diketahui dan untuk memetakan potensi perpajakan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

5.3. Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD, dapat diterapkan pembatasan revisi/ pergeseran dana untuk penambahan perjalanan dinas. Selain itu, untuk meningkatkan kedisiplinan satuan kerja baik vertikal maupun daerah, kebijakan relaksasi ataupun dispensasi pelaksanaan APBN

hendaknya ditiadakan. Hal ini untuk memberikan efek jera terhadap satuan kerja sehingga akan lebih disiplin dan taat peraturan.

5.4. Mempermudah sistem perhitungan dan penyaluran dana transfer ke daerah sehingga tidak terjadi keterlambatan transfer maupun kekurangan transfer. Misalnya dengan otomasi pembagian porsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat melakukan setoran. Untuk peraturan/ petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan hendaknya diterbitkan di awal tahun anggaran, utamanya dari Kementerian Teknis untuk pelaksanaan DAK Fisik, DAU dan DBH.

5.5. Meningkatkan peran program KUR dan UMi yang lebih fleksibel dan *go online* supaya bisa menekan pertumbuhan dan pemanfaatan pinjaman online (pinjol) ilegal yang sedang marak di masyarakat.

5.6. Akselerasi belanja APBD dilakukan sejak awal tahun sehingga manfaat belanja tersebut akan dapat dirasakan pada tahun berkenaan. Selain itu, optimalisasi SILPA untuk pembangunan infrastruktur dengan perencanaan yang lebih terarah dan terukur sehingga bisa dieksekusi langsung di awal tahun anggaran. Hal ini sebagai bagian dari sinergi pusat dan daerah yang harus memanfaatkan semua *resources* untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

5.7. Pembangunan IKN harus mewujudkan penghematan energi dan pemakaian sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca serta mempertahankan keanekaragaman hayati di Kaltim. Harus diperhatikan juga akselerasi/ peningkatan pembangunan SDM lokal sehingga memiliki daya saing serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses pemindahan IKN maupun ketika IKN telah berjalan.

5.8. Dukungan pemerintah melalui APBN dan APBD untuk penguatan basis produksi sesuai dengan UMKM unggulan daerah dan mendorong hilirisasi produk-produk UMKM. Dalam penciptaan daya saing, pemerintah hendaknya melakukan pendampingan/ pelatihan/ sosialisasi guna mendorong digitalisasi UMKM serta memfasilitasi/ mempermudah akses ekspor produk UMKM. Selain itu, kemudahan sertifikasi standar nasional maupun internasional.

5.9. Pemberian stimulus dalam bentuk kebijakan pro UMKM atau investasi/ pembiayaan mudah dan murah untuk peningkatan produksi UMKM. Ditambah dengan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pelaku UMKM yang sejenis untuk meng-*upgrade* pola pikir dan manajemen usaha.

PERKEMBANGAN
INDIKATOR EKONOMI MAKRO
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI yoy (persen)

Triwulan IV 2021

	2019	2020	2021
Kaltim	▲2,82	▼-2,83	▲2,91
Nasional	▲4,96	▼-2,17	▲5,02

Tahun 2021

TINGKAT KEMISKINAN (persen)

Nasional		Kaltim
9,41	Mar 2019	5,94
9,22	Sep 2019	5,91
9,78	Mar 2020	6,10
10,19	Sep 2020	6,64
10,14	Mar 2021	6,54
9,71	Sep 2021	6,27

TINGKAT KETIMPANGAN (indeks)

	Mar 2019	Sep 2019	Mar 2020	Sep 2020	Mar 2021	Sep 2021
Nasional	0,380	0,380	0,381	0,385	0,384	0,381
Kaltim	0,330	0,335	0,328	0,335	0,334	0,331

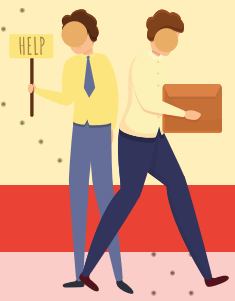

TINGKAT PENGANGGURAN (persen)

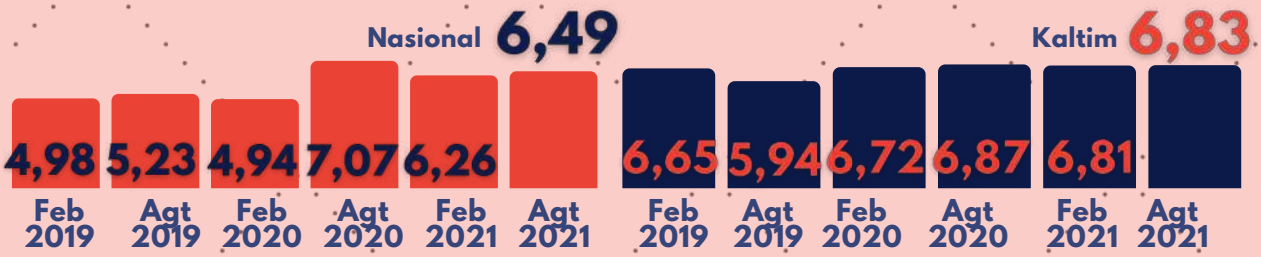

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(indeks)

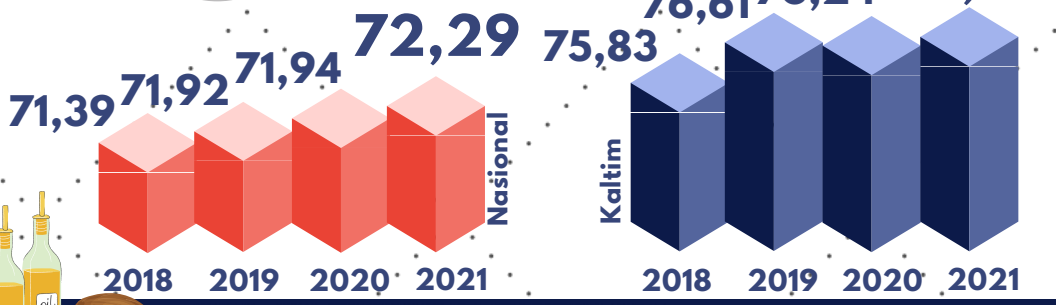

NILAI TUKAR PETANI
(indeks)

NILAI TUKAR NELAYAN
(indeks)

INFLASI
yoy (persen)

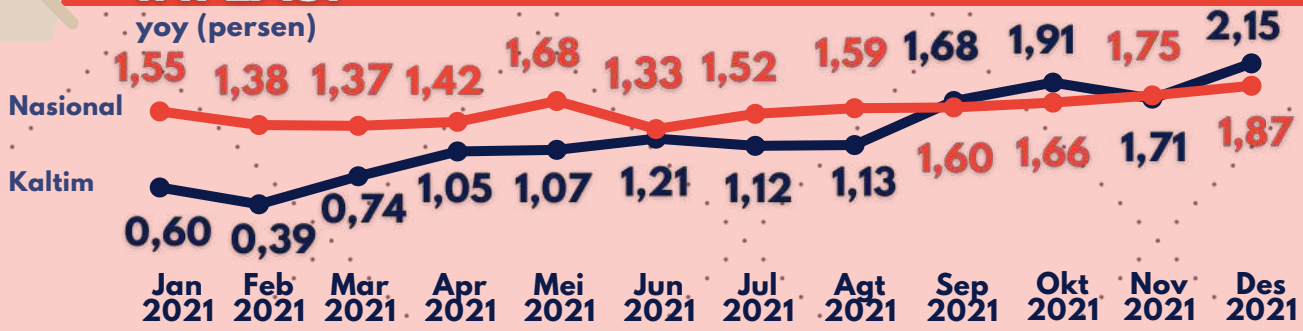

PERKEMBANGAN
INDIKATOR FISKAL REGIONAL
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

APBN

PENDAPATAN NEGARA
RP22,35T

Penerimaan Perpajakan
Rp20,59 T — 113,37%

PNBP
Rp1,76 T — 141,20%

BELANJA NEGARA
RP30,38 T

96,58%
Belanja Pemerintah Pusat
Rp9,14 T

98,63%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp21,23 T

DEFISIT
RP8,03 T

TAX RATIO 2,54%

ANGGARAN

PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
RP30,54 T

Penerimaan Perpajakan	Rp25,28 T
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp4,59 T
Penerimaan Hibah	Rp0,44 T
Transfer	Rp0,22 T

PEMBIAYAAN ▼RP6,92 T

APBD

PENDAPATAN DAERAH

RP32,41 T

- 114,91% — Pendapatan Asli Daerah Rp9,19 T
- 94,94% — Pendapatan Transfer Rp22,86 T
- 65,68% — Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp0,34 T

BELANJA DAERAH

RP33,61 T

- 84,16% — Belanja Operasional Rp20,23 T
- 80,68% — Belanja Modal Rp7,33 T
- 60,22% — Belanja Tidak Terduga Rp0,57 T
- 89,18% — Belanja Transfer Rp5,46 T

PEMBIAYAAN

RP6,91 T

SILPA

RP5,71 T

KONSOLIDASIAN

SIKPA ▲(RP3,85) T

Belanja Pemerintah Pusat Rp37,29 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp4,04 T

BELANJA KONSOLIDASIAN

RP41,33 T

PERKEMBANGAN
IPM & PRIORITAS PEMBANGUNAN
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

SASARAN
76,80

REALISASI
▲ 76,88

IPM KALTIM 2021

UHH 74,61 Tahun

RLS 9,84 Tahun

HLS 13,81 Tahun

PENDAPATAN 12,11 Juta

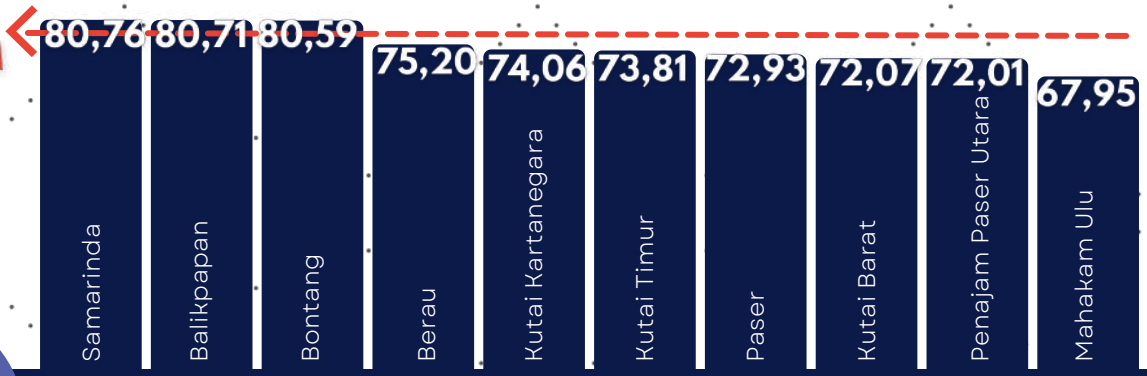

PENDIDIKAN

- KIP Kuliah Rp3.418,8 juta 318 Orang
- Rehab & Renov Sekolah Rp21.402,0 juta 5 Unit
- TPG Non PNS Rp24.358,6 juta 1.021 Orang
- Penerima BOS Rp18.970 juta 16.758 Orang

INFRASTRUKTUR

- Jembatan Rp244.072,5 juta 522 m
- Jalan Rp543.764.2 juta 77,403 km
- Bandar Udara Rp208.257,9 juta 7 Paket
- Bendungan Sepaku Semoi Rp198.400,0 juta 1 Unit

KESEHATAN

- Sarana Distribusi Obat Rp880,8 juta
- Orientasi Program HIV AIDS & PIMS Rp1.194,2 juta 160 Orang
- Sampel Makanan & Obat Rp1.239,2 juta
- Desa & Pasar Aman Rp971,1 juta 12 Desa & 4 Pasar

BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN & TANTANGAN DAERAH

Tantangan ekonomi daerah utamanya berkaitan dengan bagaimana menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Transformasi struktur ekonomi dari ***unrenewable resources*** ke ***renewable resources*** dan **pembangunan manusia yang lebih merata** baik secara wilayah maupun gender.

BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan kepada setiap daerah, untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019 dan terpilihnya wilayah di Kalimantan Timur menjadi calon IKN baru diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi Kaltim. Rencana tersebut dituangkan dalam Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadi isu strategis nasional yang harus mendapat dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat. Hal tersebut guna mendukung pemerataan pembangunan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dalam RPJMD dan RKPD tersebut harus *in line*/ selaras dengan RPJMN dan RKP pemerintah pusat.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

1.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahunan tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019. Selanjutnya, setiap tahun anggaran dijabarkan di dalam RKPD dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai satu kesatuan perencanaan yang utuh, penetapan arah pembangunan dalam RPJMD selalu memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan negara yang sama melalui harmonisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Adapun visi dari RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 yaitu "Kalimantan Timur yang Berdaulat" yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan antara lain:

Grafik 1.1. Misi Pembangunan Kaltim 2019-2023

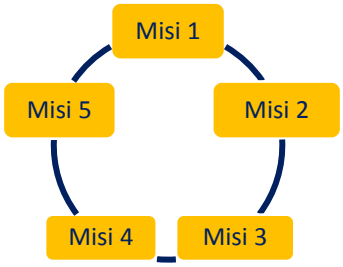

Sumber : RPJMD Kaltim 2019-2023, 2022 (data diolah).

Misi 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

Misi 2: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

Misi 3: Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

Misi 4: Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan

Misi 5: Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

1.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tema RKPD Tahun 2021 yaitu "Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4) Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
6) Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;
7) Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19.

Dari tujuh prioritas pembangunan Provinsi Kaltim tersebut, ditetapkan lima indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan atas visi dan misi pemerintah daerah. Berikut target dan realisasi indikator ekonomi makro dan kesejahteraan yang tercantum dalam RKPD Kaltim Tahun 2021:

Tabel 1.1. Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan pada RKPD Prov. Kaltim 2021

Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan	Target	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,80	76,88
Tingkat Kemiskinan (%)	6,88	6,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2±1%	2,48%
Indeks Rasio Gini	0,328-0,327	0,331*
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,34	6,83

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Dari beberapa target indikator makro dan kesra, hanya satu indikator yang tidak tercapai di tahun 2021 yaitu indeks rasio gini dari target 0,328 tercapai 0,331, yang berarti tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat lebih tinggi dari target.

1.3 Tantangan Daerah

Tantangan daerah utamanya berkaitan dengan upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati pada tahun 2015 dan telah diimplementasikan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini dengan memperhitungkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (*World Commission on Environment and Development,* 1990).

Indeks SDGs Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 73,2 sekaligus berada di peringkat 4 di antara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, setelah Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara (BPS Prov. Kaltim, 2021). Namun demikian, untuk mencapai seluruh tujuan SDGs, selain membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus didukung oleh *political will*, juga memerlukan komitmen yang sangat kuat tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh *stakeholders* yang terlibat. Menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan sangat penting demi mewujudkan Indonesia Maju di tahun 2045.

Tantangan ekonomi daerah Kaltim dihadapkan dengan terlalu ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian, utamanya batubara. Seperti tampak pada Grafik 1.2., pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan dan penggalian relatif lebih stabil dan tumbuh positif.

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Grafik 1.2. Tren Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2016- 2020

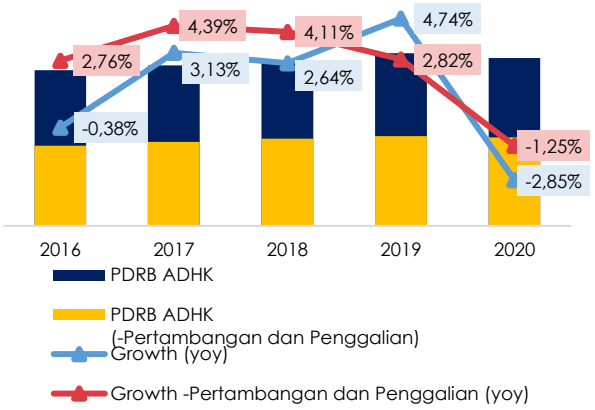

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Hal ini disebabkan sektor pertambangan dan penggalian sangat rentan (*volatile*) terhadap kondisi pasar global –terutama sangat dipengaruhi permintaan dari Tiongkok dan India. Selain itu, isu lingkungan hidup merupakan permasalahan pada sektor pertambangan dan penggalian, yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati, penggundulan hutan dan penyebab berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ditambah dengan kenyataan bahwa daerah penghasil tambang memiliki struktur ekonomi yang tidak inklusif dengan kesenjangan sosial yang tinggi dan tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada daerah non-tambang.

Untuk itu dalam pengelolaan pertambangan harus lebih bijak dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan sektor non-tambang. Pengembangan sektor non-tambang antara lain: sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, perdagangan, dll. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan sektor non-

tambang dan penurunan pengangguran/ kemiskinan.

Tabel 1.2. Data Pertambangan dan Kemiskinan per Kab./ Kota tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Pertambangan thd PDRB (%)
Kutai Timur	9,55	82,83
Paser	9,23	72,68
Kutai Kartanegara	7,31	69,69
Berau	5,19	61,85
Kutai Barat	9,29	54,39
Penajam Paser Utara	7,36	31,19
Samarinda	4,76	13,53
Mahakam Ulu	11,44	6,59
Bontang	4,38	0,70
Balikpapan	2,57	0,04

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Pada Tabel 1.2., dapat dilihat bahwa daerah yang didominasi sektor pertambangan sebagai pembentuk PDRB, memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi daripada daerah non-tambang. Hal ini dapat diartikan: 1. Hasil/ pendapatan dari tambang tersebut tidak dapat dimanfaatkan/ digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat, 2. Sektor ini juga membutuhkan modal yang besar/ padat modal, namun tidak banyak menyerap tenaga kerja, 3. Pertumbuhan sektor non-tambang sangat rendah dan bertumpu pada sektor pertambangan, sehingga menurunkan peluang kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.3. Distribusi Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha se-Kaltim 2019-2021

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Perdagangan Besar & Eceran	20,60%	22,07%	21,99%
Pertanian	19,19%	20,48%	20,84%
Akomodasi	7,32%	7,16%	7,66%
Administrasi Pemerintahan	6,64%	6,72%	7,20%
Pertambangan dan Penggalian	8,28%	7,27%	7,10%
Industri Pengolahan	7,60%	6,23%	6,59%
Lapangan Usaha Lainnya	30,38%	30,07%	28,63%

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Pada tabel 1.3. terlihat hanya sekitar 7 persen yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian untuk seluruh Kalimantan Timur. Relatif sedikit jika dibandingkan dengan sektor lain seperti perdagangan, pertanian dan akomodasi. Namun demikian, kontributor utama PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 1.4. Tingkat Pengangguran dan Angkatan Kerja Kaltim 2016-2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
Penduduk Usia Kerja	2.595.992	2.665.909	2.732.343	2.775.170	2.819.560
Angkatan Kerja	1.654.964	1.732.598	1.815.382	1.817.680	1.846.550
- Bekerja	1.540.675	1.618.285	1.704.808	1.692.800	1.720.360
- Pengangguran	114.289	114.313	110.574	124.880	126.190
Bukan Angkatan Kerja	941.028	933.311	916.961	957.490	973.020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,75	64,99	66,44	65,5	65,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91	6,6	6,09	6,87	6,83

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim masih relatif moderat, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,83 persen. Namun demikian, dengan potensi yang dimiliki, seharusnya Kaltim menjadi tempat yang akomodatif bagi pencari kerja apabila dapat memaksimalkan potensi perekonomian yang ada.

Upaya tersebut perlu ada dukungan investasi dari dalam maupun luar negeri. Dalam lima tahun terakhir, investasi di Kaltim selalu tumbuh positif kecuali tahun 2020 dimana terdapat pandemi Covid-19. Investasi yang masuk ke Kaltim sebagian besar masih ke sektor pertambangan. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung SDGs seperti industri, pertanian dan pariwisata.

Grafik 1.3. Tren Pertumbuhan Investasi di Kaltim 2016- 2021

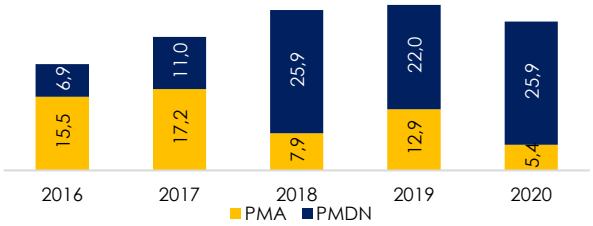

Sumber : BKPM, 2022(data diolah).

Walaupun investasi secara keseluruhan menurun, namun investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) di tahun 2020 mengalami pertumbuhan 17,7 persen (*yoy*). Sejalan dengan meningkatnya investasi di Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim membangun sebuah sistem perizinan berbasis online bernama E-PTSP. Sistem ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 8 Tahun 2021 dan dibangun untuk mendukung penerapan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Selain itu, DPMPTSP juga mengeluarkan SIMOSI (Sistem Informasi Promosi Investasi) yang berbasis aplikasi android dan SIPINTAR (Sistem Informasi Potensi Investasi Regional). Di dalam SIMOSI ini terdapat informasi mengenai investasi yang ada di Kalimantan Timur, mulai dari potensi dan peluang investasi yang ada di masing-masing daerah Kabupaten/ Kota. Pengguna juga dapat melakukan promosi usaha melalui menu *marketplace* dengan melakukan pendaftaran usaha di aplikasi ini untuk keperluan bisnis atau usaha.

Sedangkan SIPINTAR memuat informasi mengenai profil daerah antara lain data demografi, komoditas, pendapatan dan Upah Minimum Regional (UMR) dan tenaga kerja, sarana infrastruktur pendukung, regulasi serta informasi peluang investasi di Kalimantan Timur.

Tantangan ekonomi lainnya adalah faktor infrastruktur, terutama kondisi jalan di Kaltim. Sebagian besar struktur jalan di Kaltim berupa jalan aspal yang mencapai 65 persen. Sisanya berupa jalan kerikil, tanah dan lainnya.

Grafik 1.4. Struktur Jalan di Prov. Kaltim 2021

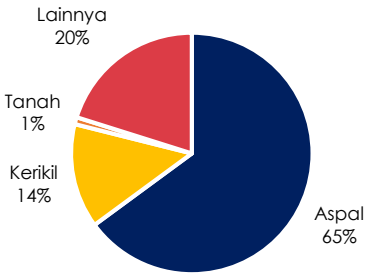

Sumber : Dinas PUPR, 2022(data diolah).

Grafik 1.5. Kondisi Jalan di Prov. Kaltim 2021

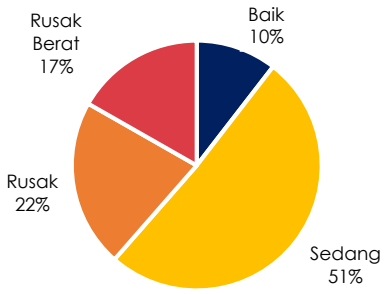

Sumber : Dinas PUPR, 2022(data diolah).

Namun demikian, jalan dengan kondisi baik di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sepanjang 93,75 km atau 10,47 persen, sisanya dalam kondisi sedang 50,97 persen, rusak 21,80 persen dan rusak berat 16,75 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian karena jalan merupakan jalur utama mobilitas penduduk maupun barang dan jasa.

Tabel 1.5. Rasio Elektrifikasi Kaltim 2017-2021

Kabupaten/Kota	Rasio Elektrifikasi (%)			
	2017	2018	2019	2020
Paser	67,09	75,6	84,05	84,8
Kutai Barat	67,2	85,88	94,99	93,74
Kutai Kartanegara	63,41	81,7	86,17	84,55
Kutai Timur	80,84	78,23	79,52	85,46
Berau	82,37	79,57	81,9	91,76
Penajam Paser Utara	81,94	78,51	81,2	82,11
Mahakam Ulu	65,14	47,38	48,13	90,8
Balikpapan	98,6	88,46	91,44	90,18
Samarinda	92,38	99,02	100	100
Bontang	98,85	83,6	87,37	88,85
Kalimantan Timur	**84,07**	**85,75**	**88,93**	**90,21**

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Sistem kelistrikan di Kalimantan Timur sampai dengan saat ini belum merata, karena unit pembangkit listrik yang ada belum merata atau cenderung terpusat pada Kota Samarinda. Wilayah Kalimantan Timur secara agregat memiliki rasio elektrifikasi yang cukup tinggi. Namun demikian rasio elektrifikasi per pemda masih cukup rendah, hal ini dikarenakan luasnya wilayah dan jarak antar rumah dengan sumber penerangan listrik.

1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Gambar 1.1. Sebaran Penduduk per Kab./ Kota di Kaltim 2020

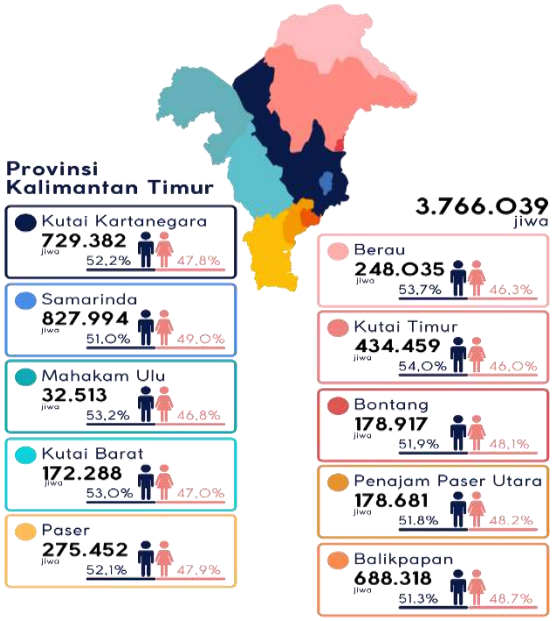

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Jumlah penduduk Kaltim berdasarkan sensus penduduk BPS Kaltim tahun 2020 sebanyak 3.766.039 jiwa dengan 52,09 persen laki-laki dan 47,91 persen perempuan. Namun demikian, sebagian besar penduduk di Kaltim masih terkonsentrasi di tiga daerah yaitu Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Utamanya Kota Samarinda dengan luas wilayah hanya sebesar 0,56 persen dari luas wilayah Kaltim, dihuni sebanyak 827.994 penduduk atau 21,99 persen dari total penduduk Kaltim. Daya tarik perekonomian wilayah yang membuat penduduk terkonsentrasi di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, hal tersebut mengindikasikan pembangunan ekonomi di Kaltim masih belum merata.

Namun demikian, sebenarnya Kaltim sedang menikmati masa bonus demografi. Hal ini ditandai dari persentase penduduk yang masih dalam usia produktif sebesar 70,28 persen jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif.

Selain itu, Kaltim juga belum memasuki era *ageing population* dengan persentase penduduk lansia hanya 6,22 persen/ kurang dari 10 persen. Keunggulan demografi ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pembangunan regional maupun nasional dengan menciptakan berbagai teknologi dan inovasi.

Dari aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang tercermin dari IPM, kondisi di Kaltim belum merata walaupun secara agregat IPM Kaltim dalam kategori tinggi di angka 76,88 di tahun 2021.

Grafik 1.6. Indeks Pembangunan Manusia per Kab./ Kota di Kaltim 2021

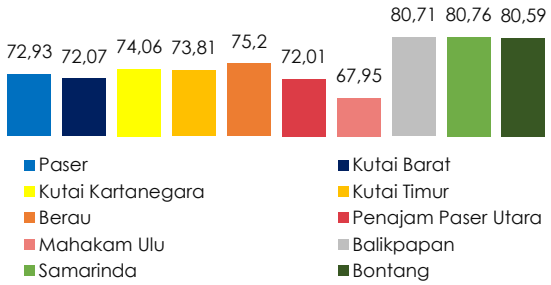

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Adapun capaian IPM Kalimantan Timur tahun 2021, disusun oleh beberapa komponen sebagai berikut:

1) Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 74,61 tahun, derajat kesehatan penduduk Kalimantan Timur melampaui standar nasional yang mencapai 71,57.
2) Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,81 tahun dengan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,84 tahun.
3) Pengeluaran per Kapita Riil yang disesuaikan yaitu Rp12,11 juta/ tahun.

Ketimpangan perekonomian antar gender menjadi isu menarik yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 1.6. Ketimpangan Perekonomian Antar Gender di Kaltim tahun 2020

Gender	TPT (%)	IPM	Upah (juta Rp)
Laki-laki	7,25	85,70	3,84
Perempuan	6,17	69,69	2,7

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (data diolah).

Laki-laki berkontribusi terhadap jumlah pengangguran lebih banyak daripada perempuan. Namun demikian, IPM dan upah laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan.

1.3.3. Tantangan Geografis Wilayah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas 16.732.065,18 ha dengan luas daratan sebesar 127.734.692 Ha. Terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur berada pada Kota Samarinda dan memiliki 10 kabupaten/ kota.

Tabel 1.7. Luas Wilayah Kab./ Kota dan Wilayah Administratif di Provinsi Kaltim

No	Kabupaten/ Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Samarinda	71.653	10	59
2	Balikpapan	51.225	6	34
3	Bontang	16.314	3	15
4	Kutai Barat	1.370.992	16	194
5	Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
6	Kutai Timur	3.105.171	18	141
7	Paser	1.109.696	10	144
8	Penajam Paser Utara	292.373	4	54
9	Berau	2.173.519	13	110
10	Mahakan Ulu	1.944.941	5	50
Kalimantan Timur		**12.734.692**	**103**	**1.038**

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023.

Karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan keberadaan area dengan kelerengan bervariasi dari lahan datar (kemiringan lereng 0-2%) yang umumnya terdapat di daerah pantai dan daerah paparan banjir dari sungai besar, area kemiringan landai (2-8%), perbukitan dan dataran bergelombang dengan kemiringan sedang (8-15%), agak curam (15-25%) hingga curam (25-40%). Dengan kondisi topografi seperti ini, area yang datar dan landai yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan cukup terbatas, sementara pada wilayah yang memiliki konfigurasi lapangan yang bergelombang hanya cocok untuk ditanami tanaman tahunan atau diselamatkan sebagai kawasan konservasi.

Secara geologi, wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks dengan adanya interaksi 3 Lempeng Utama, yakni Lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia (van Bemellen, 1949). Beberapa potensi mineral yang ada yaitu batubara, minyak dan gas bumi, emas dan lain-lain. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik, namun berpotensi mengalami bencana kebakaran, tanah longsor, banjir, angin topan dan konflik sosial. Potensi bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun waktu.

1.3.4 Tantangan Daerah Sebagai Dampak Covid-19

Tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi dan mengalami fluktuasi di tahun 2021 mendorong Pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai pembatasan pergerakan masyarakat guna menekan penularan virus. Hasilnya tampak dalam grafik 1.7. yang menunjukkan bahwa penyebaran virus bisa ditekan, bahkan sampai akhir tahun 2021 terdapat beberapa wilayah Kab./ Kota masuk zona hijau.

Grafik 1.7. Perkembangan Covid-19 Kalimantan Timur 2021

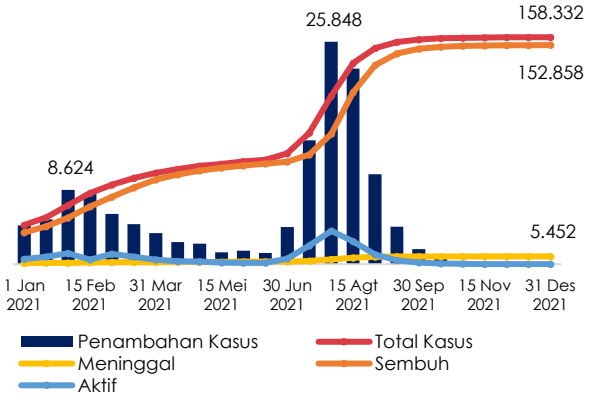

Sumber : Dinkes Prov. Kaltim, 2022 (data diolah).

Sementara itu, pemerintah daerah terus melakukan upaya akselerasi vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Tampak bahwa percepatan vaksinasi tersebut dilakukan di semester II 2021 terlihat pada grafik 1.8. Akselerasi vaksinasi tersebut sebagai upaya untuk menciptakan *herd imunity* sehingga masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pemda bekerjasama dengan unsur TNI/ Polri melaksanakan vaksinasi di berbagai tempat dan hasilnya di akhir tahun 2021 cakupan vaksinasi Kaltim telah mencapai lebih dari 80 persen untuk dosis pertama.

Grafik 1.8. Perkembangan Vaksinasi Covid-19 Kalimantan Timur 2021

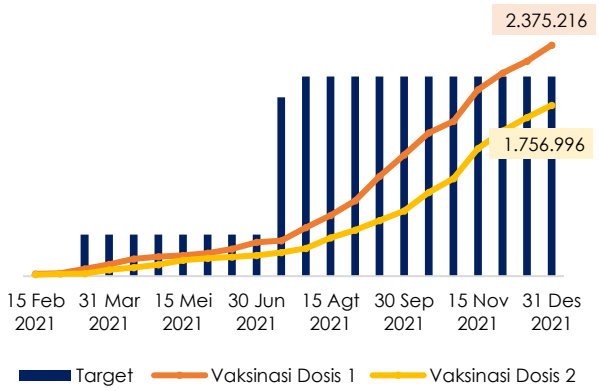

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, 2022 (data diolah).

Tantangan dalam pengendalian Covid-19 adalah menjaga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga penyebarannya dapat terkendali dan tidak mengganggu perekonomian. Selain itu, perlu upaya menumbuhkan sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dan melanjutkan program jaring pengaman sosial yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

- Halaman ini sengaja dikosongkan –

BAB II

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

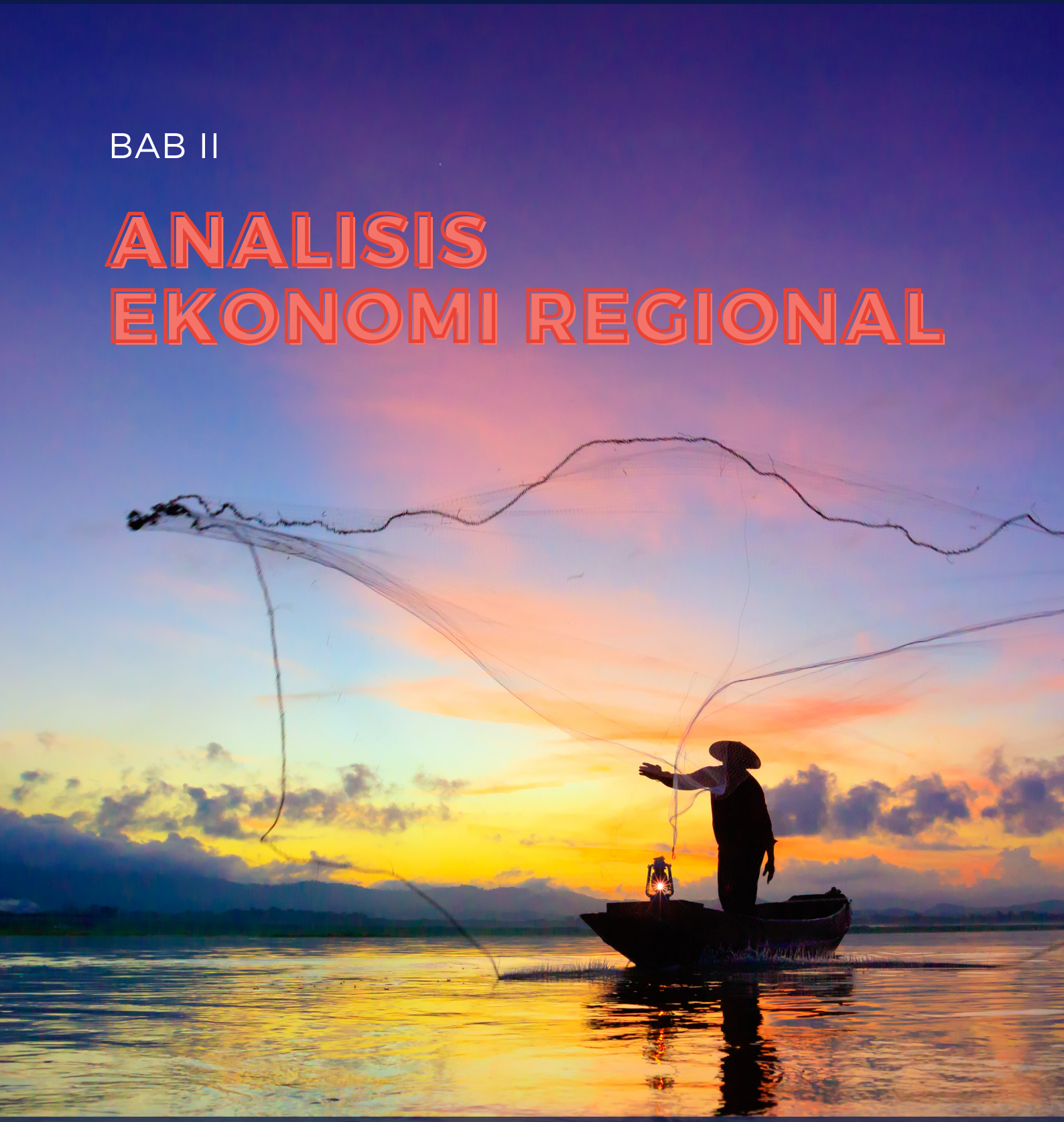

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 **tumbuh positif di level 2,48 persen,** mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,85 persen. Akselerasi **pelaksanaan vaksinasi dan penerapan PPKM** menjadi kunci keberhasilan menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, **kebijakan fiskal yang ekspansif dan bersifat *countercyclical* dapat menjaga kestabilan perekonomian**.

BAB II
ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Kondisi perekonomian regional Kalimantan Timur mengalami tren positif. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator perekonomian dan kesejahteraan yang membaik atau meningkat sepanjang tahun 2021. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah melalui APBN/ APBD dan program PC-PEN berdampak signifikan terhadap perbaikan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

2.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal, *no one left behind*. Semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Indikator perekonomian Kaltim berada pada tren positif. Pergerakan berbagai indikator perekonomian Kaltim mengalami fluktuasi ke arah positif sepanjang tahun 2021. Titik balik kondisi perekonomian Kaltim terjadi pada triwulan II, yang tumbuh positif 5,76 persen (*yoy*) setelah empat kuartal sebelumnya mengalami kontraksi. Perbaikan perekonomian Kaltim seiring dengan menurunnya kasus positif Covid-19 baik secara regional maupun nasional. Selain itu, perbaikan ekonomi juga ditopang oleh peningkatan capaian kinerja ekspor Kaltim sepanjang tahun 2021.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2021 tetap positif sebesar 2,91 persen (yoy).

Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan Nasional 2019-2021 (ADHK)

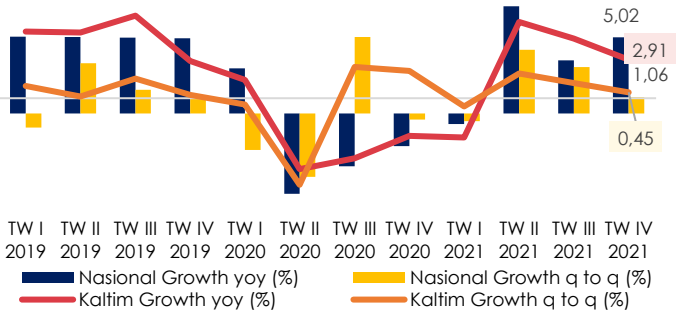

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat dalam penanganan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Tahun 2021 merupakan tahun yang berat dikarenakan diawali dengan resesi ekonomi yang melanda seluruh

daerah di Indonesia. Selain itu, pandemi Covid-19 yang belum usai disertai kemunculan varian-varian baru, memberikan ketidakpastian arah perekonomian.

Economic growth regional Kaltim triwulan IV 2021 sebesar 2,91 persen (*yoy*), lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 5,02 persen (*yoy*). Secara *qtq*, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih dalam level positif sebesar 0,45 persen sedangkan untuk pertumbuhan PDRB tahunan mencapai 2,48 persen. Hal ini menandakan pergerakan ekonomi Kaltim tetap berjalan positif sepanjang tahun 2021.

Akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan penerapan PPKM menjadi kunci keberhasilan menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, kebijakan fiskal yang ekspansif dan bersifat *countercyclical* dapat menjaga kestabilan perekonomian. Hal ini tercermin dari kelanjutan disertai penambahan alokasi pagu program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2021. Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut masih dipengaruhi basis perhitungan PDRB yang rendah (*low based effect*) di tahun sebelumnya.

Kaltim dominasi struktur perekonomian regional Kalimantan dengan share 49,66 persen. Secara umum pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan tumbuh positif 3,18 persen (*yoy*) dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,26 persen. Kalteng menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,61 persen (*yoy*), sedangkan terendah di Kaltim dengan 2,91 persen (*yoy*). Tidak dipungkiri bahwa sektor pertambangan, utamanya batubara telah mengangkat perekonomian Kaltim sehingga menguasai struktur perekonomian Pulau Kalimantan. Namun demikian, hal tersebut harus menjadi perhatian kedepannya.

Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dan Nasional Q4 2021

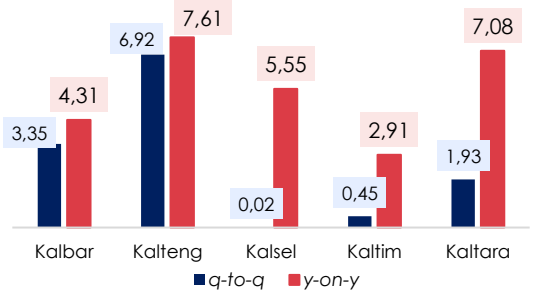

Grafik 2.3. Struktur Perekonomian Kalimantan Q4 2021

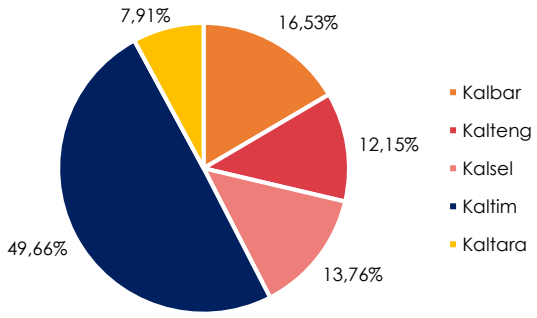

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Analisis tren pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan tampak lebih stabil dan relatif tumbuh positif. Tren tersebut terjadi disebabkan sektor pertambangan dan penggalian sangat rentan (*fragile*) terhadap kondisi pasar global. Selain itu, isu lingkungan hidup kerap terjadi di area pertambangan, ditambah dengan kenyataan bahwa daerah penghasil tambang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada daerah non-tambang. Oleh sebab itu, transformasi ekonomi dari *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus diakselerasi dan menjadi

prioritas untuk mendukung *sustainable development goals (SDGs)*.

Grafik 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tahun 2016-2021

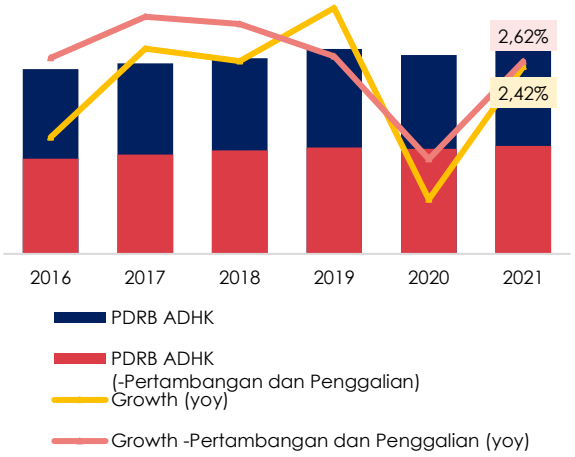

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

2.1.1.2 Nominal PDRB

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran *y-on-y* & *q-to-q* Q4 2021 (ADHK)

Komponen	Laju *y-on-y*	Laju *q-to-q*
Konsumsi Rumah Tangga	0,86	0,91
Konsumsi LNPRT	0,92	2,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,63	63,20
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,81	4,24
Perubahan Inventori	-	-
Ekspor Luar Negeri	1,32	(2,28)
Impor Luar Negeri	2,48	0,17
Laju PDRB	**2,91**	**0,45**

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan PMTB menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2021. Dari sisi pengeluaran, secara *yoy*, semua komponen PDRB mengalami pertumbuhan positif dengan komponen pertumbuhan tertinggi terdapat pada pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Bahkan secara *qtq*, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 63,20 persen yang didukung akselerasi pelaksanaan belanja APBN maupun APBD di triwulan IV 2021. Disisi lain, konsumsi rumah tangga dan LNPRT juga berperan positif atas pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Peranan belanja pemerintah berkontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dari grafik 2.5 tampak bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dimasa pandemi (2020 dan 2021). Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi tetap pada level positif. Hal tersebut ditunjang oleh turunnya kasus Covid-19 di triwulan IV yang berdampak positif bagi kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, jatuh tempo penyelesaian proyek-proyek infrastruktur/ belanja modal pemerintah ikut mendongkrak pengeluaran pemerintah tersebut.

Grafik 2.5. Tren Pertumbuhan PDRB *y-on-y* dan Belanja Pemerintah 2019 - 2021

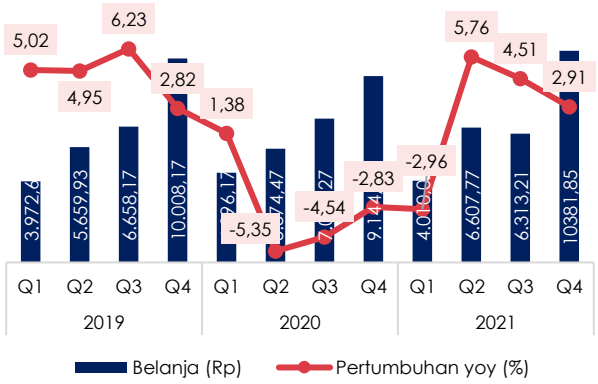

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Apabila diukur dari komposisi pembentuk PDRB tahun 2021, komponen net-ekspor dan PMTB memiliki kontribusi terbesar dengan 49,38 persen dan 30,24 persen, sedangkan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya 3,94 persen. Peningkatan PMTB pada komponen

PDRB dipengaruhi oleh kegiatan investasi baik dari asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) yang relatif cukup stabil. Selain itu, juga dipengaruhi meningkatnya industri konstruksi serta pertambangan dan penggalian. Kedepan kontribusi PMTB diperkirakan bakal naik seiring dengan dimulainya pemindahan IKN ke wilayah Kaltim.

Tabel 2.2. Komposisi dan Kontribusi Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2021 (ADHB)

Komponen	Komposisi (%)	Kontribusi (miliar Rp)	Growth yoy (%)
Konsumsi Rumah Tangga	16,61%	115.437,96	1,20
Konsumsi LNPRT	0,49%	3.407,57	0,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,94%	27.422,86	2,03
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,24%	210.237,72	8,03
Perubahan Inventori	0,06%	383,59	-
Ekspor Barang dan Jasa	114,02%	792.640,83	2,96
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	65,36%	454.372,20	5,43
Produk Domestik Regional Bruto	**100%**	**695.158,33**	**2,48**

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Dari sisi pengeluaran pemerintah, angka 3,94 persen memang relatif kecil, namun demikian *multiplier effect* yang didapat dari belanja pemerintah sangat luas. Belanja pemerintah, terutama program jaring pengaman sosial, berdampak pada kecepatan perputaran uang (*velocity of money*) yang menggerakkan sektor riil perekonomian. Hal inilah yang diharapkan pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Ekspor Kaltim sepanjang 2021 dipengaruhi oleh harga batubara acuan (HBA) yang mengalami kenaikan signifikan. Cuaca ekstrem yang terjadi di Tiongkok membuat kegiatan produksi dan distribusi batubara di negara tersebut terganggu. Hal ini menyebabkan permintaan (impor) batubara dari luar Tiongkok naik pesat yang membuat HBA mencapai titik tertinggi di bulan November sebesar US$215,01 per ton. Kenaikan HBA tersebut menjadi keuntungan bagi Kaltim karena komoditas utama ekspor Kaltim berupa batubara. Kinerja ekspor Kaltim menduduki peringkat dua nasional di bawah Jawa Barat dengan kontribusi 10,50 persen. Hal itu berdampak positif terhadap neraca perdagangan Kaltim yang tercatat surplus US$20,41 miliar.

Grafik 2.6. Tren Ekspor Kaltim dan HBA tahun 2021

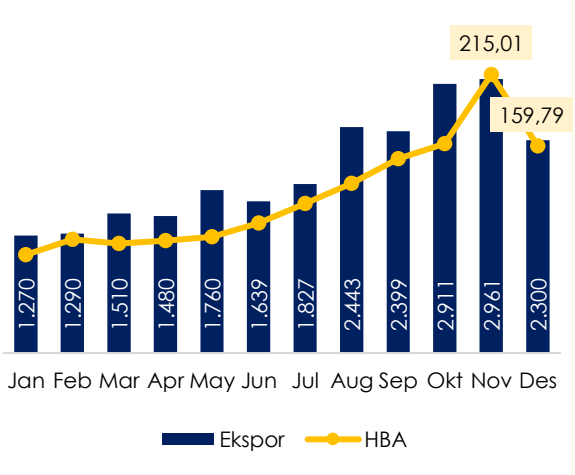

Sumber : ESDM dan BPS, 2022 (diolah).

Struktur PDRB LU tahun 2021 masih dikuasai sektor pertambangan dan penggalian dengan share 45,05 persen. Dalam satu dekade terakhir PDRB Kaltim identik dengan sektor pertambangan dan penggalian. Terutama dalam tiga bulan terakhir, dimana HBA mencapai harga tertinggi dalam sejarah yang berdampak pada kenaikan ekspor batubara yang cukup signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan memiliki andil 17,81 persen terhadap PDRB dengan subsektor industri batubara dan pengilangan migas menjadi penyumbang terbesar sektor ini. Sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kaltim terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan

eceran. Namun sektor tersebut tampak belum maksimal dalam struktur PDRB dengan masing-masing berkontribusi sebesar 8,48 persen dan 5,96 persen, bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencatatkan pertumbuhan negatif 0,26 persen sepanjang tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi perhatian dan prioritas kebijakan pemerintah kedepannya untuk mendorong sektor tersebut lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3. Komposisi dan Kontribusi per Sektor Lapangan Usaha 2021 (ADHB)

Sektor	Komposisi (%)	Kontribusi (miliar Rp)	Growth yoy (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,48	58.922,90	-0,26
Pertambangan dan Penggalian	45,05	313.164,49	2,26
Industri Pengolahan	17,81	123.809,01	2,29
Pengadaaan Listrik, Gas	0,06	395,46	2,34
Pengadaan Air	0,05	348,04	4,19
Konstruksi	8,95	62.227,32	4,41
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,96	41.468,04	3,77
Transportasi dan Pergudangan	3,34	23.195,36	2,33
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0,96	6.653,26	1,86
Informasi dan Komunikasi	1,46	10.183,25	7,96
Jasa Keuangan	1,62	11.244,16	2,55
Real Estate	0,84	5.868,36	-0,72
Jasa Perusahaan	0,2	1.380,14	2,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,9	13.201,13	1,98
Jasa Pendidikan	1,78	12.340,33	2,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	6.205,10	13,34
Jasa Lainnya	0,65	4.551,98	1,13
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**695.158,33**	**2,48**

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2021 terdapat pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,34 persen dibandingkan tahun 2020. Hal ini menandakan dampak pandemi Covid-19 memang masih sangat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai syarat tes kesehatan untuk melakukan perjalanan atau kegiatan ikut andil dalam pertumbuhan di sektor ini.

Dari sisi laju pertumbuhan pada triwulan IV, sektor konstruksi tercatat tumbuh paling tinggi mencapai 10,86 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didukung pengeluaran pemerintah pada jenis belanja modal yang sebagian besar jatuh tempo di bulan Desember 2021. Sektor administrasi pemerintahan juga tumbuh relatif tinggi 8,79 persen. Akselerasi vaksinasi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di triwulan IV memberikan ruang gerak bagi kegiatan pemerintahan.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB per Sektor Lapangan Usaha Q4 2021 (ADHK)

Sektor	Laju *y-on-y*	Laju *q-to-q*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,56	(2,69)
Pertambangan dan Penggalian	1,71	(2,65)
Industri Pengolahan	2,9	3,65
Pengadaaan Listrik, Gas	5,84	2,76
Pengadaan Air	5,82	1,14
Konstruksi	10,86	5,97
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,8	0,97
Transportasi dan Pergudangan	2,16	5,93
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	4,75	5,61
Informasi dan Komunikasi	9,4	5,63
Jasa Keuangan	0,75	1,87
Real Estate	1,12	0,33
Jasa Perusahaan	4,71	1,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,79	19,98
Jasa Pendidikan	-2,23	0,31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,44	0,23
Jasa Lainnya	2,54	4,88
Laju PDRB	**2,91**	**0,45**

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Sektor jasa pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, masih mengalami tekanan di triwulan IV dengan laju negatif 2,23 persen (*yoy*), walaupun dibandingkan dengan triwulan III tumbuh tipis 0,31 persen (*qtq*). Metode

pembelajaran daring menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan belajar di luar sekolah/ bimbingan les pada lembaga pendidikan.

Sektor unggulan disini didasari oleh kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB tahun 2021. Terdapat empat sektor unggulan di Kaltim yang memberi andil terbesar terhadap perekonomian dan kesejahteraan.

Tabel 2.5. Peranan Sektor Unggulan Q4 2021

Sektor	Kontribusi (miliar)	Komposisi (%)	Growth (yoy)
Pertambangan dan Penggalian	227.952,68	45,05	6,6
Industri Pengolahan	96.180,24	17,81	2,22
Konstruksi	36.949,56	8,95	5,46
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32.963,90	8,48	2,86

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Sektor pertambangan masih mendominasi di Kaltim, namun sektor ini tidak menjamin pembangunan berkelanjutan, terutama dengan tren negara-negara di dunia yang cenderung mulai beralih ke energi terbarukan (EBT). Oleh karena itu, Kaltim harus mempersiapkan sektor-sektor lain yang potensial untuk menopang perekonomian dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pemindahan IKN ke Kaltim merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan untuk *shifting* dari pertambangan ke sektor lain. Ketiga sektor tersebut sangat potensial dalam mendukung IKN, mulai dari pembangunan maupun kecukupan kebutuhan dasar/ pangan. Hal ini dapat memberikan gambaran fokus kebijakan kedepannya untuk meningkatkan sektor-sektor tersebut terutama untuk sektor pertanian, industri pengolahan dan konstruksi.

2.1.1.3 PDRB per Kapita

Indikator ini menunjukkan peranan setiap individu masyarakat terhadap perekonomian suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa.

Grafik 2.7. Tren PDRB per Kapita Kaltim dan Nasional 2016-2020

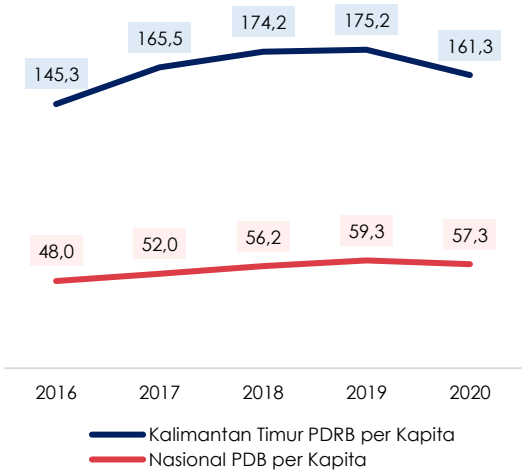

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

PDRB per kapita Kaltim selalu di atas Nasional. Selama lima tahun terakhir PDRB per kapita di Kaltim selalu jauh di atas PDB per kapita nasional, bahkan hampir tiga kali lipat. Hal ini didukung oleh sumber daya alam Kaltim yang begitu melimpah, misalnya: migas, batubara, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Namun demikian, dampak pandemi yang menghantam di tahun 2020 berpengaruh terhadap PDRB per kapita Kaltim yang terkontraksi 8 persen (*yoy*) menjadi Rp161,3 juta.

Secara spasial, PDRB per kapita Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur menjadi yang terbesar se-Kaltim dengan Rp312,15 juta dan Rp296,16 juta. Namun, apakah PDRB per kapita tersebut mencerminkan kesejahteraan masyarakat? Apakah PDRB yang besar tersebut dinikmati masyarakat setempat? Hal ini masih menjadi tantangan

Pemda karena sebagian besar daerah dengan PDRB per kapita tinggi, tingkat kemiskinan pun relatif tinggi seperti: Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Paser.

Tabel 2.6. Tren PDRB per Kapita Prov./ Kab./ Kota 2016-2020

Kabupaten/ Kota	PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	139,01	160,3	171,64	167,96	148,63
Kutai Barat	150,51	175,43	192,1	197,14	183,84
Kutai Kartanegara	173,97	198,41	210,47	206,1	185,65
Kutai Timur	285,34	346,12	353,74	355,99	296,16
Berau	143,44	161,63	166,27	168,34	148,9
Penajam Paser Utara	49,24	53,77	55,7	56,81	55,70
Mahakam Ulu	82,11	88,87	95,32	103,04	104,6
Balikpapan	128,12	137,92	151,3	159,91	155,98
Samarinda	63,56	69,29	74,08	77,57	75,04
Bontang	331,04	345,15	337,45	328,24	312,15
Kalimantan Timur	**145,34**	**165,55**	**174,16**	**175,25**	**160,11**

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

2.1.2 Tingkat Suku Bunga

Grafik 2.8. Perkembangan BI7DRR dan Rata-rata Suku Bunga Kredit Kaltim 2019-2021

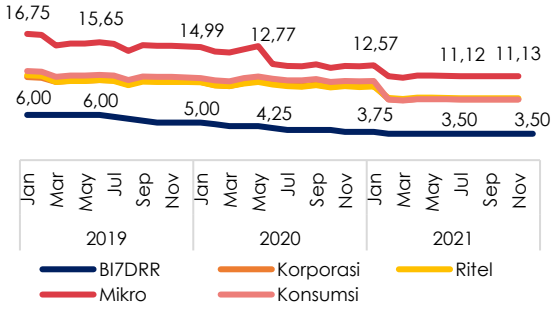

Sumber : BI dan OJK, 2022 (diolah).
Keterangan: Suku Bunga Kredit diolah dari Bank Himbara dan BPD Kaltimtara.

BI7DRR mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dan mencapai titik terendah sepanjang masa di level 3,50 persen sejak Februari 2021. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menurunkan suku bunga kredit perbankan di wilayah Kaltim. Suku bunga kredit di berbagai bank di Kaltim rata-rata sebesar 11-12 persen untuk kredit mikro dan 7-8 persen untuk kredit konsumsi, korporasi dan ritel. Suku bunga tersebut relatif masih tinggi dibandingkan suku bunga acuan yang dikeluarkan BI (BI7DRR).

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan juga kredit ultramikro (UMi). Kebijakan ini dirasakan sangat membantu masyarkat kecil terutama UMKM dalam menghadapi/ sekedar bertahan di tengah pandemi.

2.1.3 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting dan tolok ukur perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK) yang dikelompokkan dalam 11 kelompok pengeluaran berdasarkan pengembangan dari *The Classification of Individual Consumption by Purpose*.

Fenomena wabah Covid-19 yang masih berlanjut hingga tahun 2021 menyebabkan pergerakan inflasi yang fluktuatif. Namun demikian, Pemda di Kaltim terus berupaya menjaga harga komoditas di masyarakat dengan cara menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat, meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Pemda melalui TPID se-Kalimantan selalu berupaya dan berkoordinasi agar inflasi yang terjadi setiap tahun dapat terjaga dan terkendali. Pada tahun ini, TPID Kota Samarinda dan TPID Kabupaten Kutai Barat mendapat penghargaan TPID berkinerja terbaik dan TPID berprestasi se-Kalimantan sesuai

dengan Kepmenko Perekonomian Nomor 152 tahun 2021.

Grafik 2.9. Perkembangan Inflasi (*mtm*) Kaltim 2019-2021

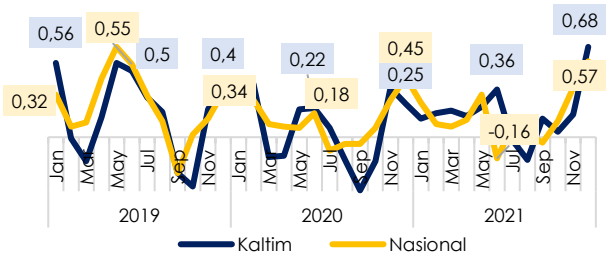

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila dilihat pergerakan inflasi Kaltim secara *mtm*, sejak tahun 2019 sampai 2021 telah terbentuk suatu *pattern* yang mirip. Inflasi akan menurun di triwulan I sampai bulan Maret (bisa terjadi deflasi), selanjutnya akan naik di triwulan ke II sampai bulan Juni-Juli, dan kembali menurun di triwulan ke III sampai bulan September (bisa terjadi deflasi). Di triwulan ke IV akan kembali naik sampai puncaknya di bulan Desember. Dengan pola yang sama dalam tiga tahun terakhir bisa menjadi rujukan kebijakan pemerintah, terutama Pemda, dalam mengatasi laju inflasi dan pola distribusi barang dan jasa, utamanya barang dan jasa yang sangat berpengaruh terhadap inflasi.

Grafik 2.10. Perkembangan Inflasi (*yoy*) Kaltim 2019-2021

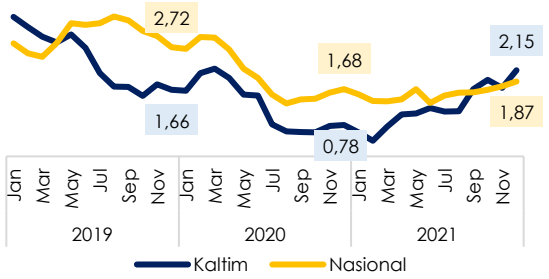

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila dilihat dari kelompok pengeluaran, kontributor tertinggi inflasi sepanjang tahun 2021 terdapat pada makanan, minuman dan tembakau yang mencapai 4,58 persen, diikuti perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,11 persen. Hal ini menandakan daya beli/ konsumsi masyarakat tetap terjaga di tengah pandemi. Kebijakan pemerintah melalui jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai maupun non tunai berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Tabel 2.7. Inflasi Per Kelompok Pengeluaran Kaltim 2021

Kelompok Pengeluaran	IHK	
	Des 2020	Des 2021
Makanan, Minuman, dan Tembakau	105,01	109,82
Pakaian dan Alas Kaki	97,67	96,67
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,22	103,32
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,8	109,09
Kesehatan	104,32	105,83
Transportasi	98,92	101,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,01	101,10
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	107,75	108,41
Pendidikan	106,98	107,96
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	109,45	110,40
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,74	115,38

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Secara garis besar, tingkat inflasi di Kaltim disebabkan oleh faktor infrastruktur dan cuaca yang mempengaruhi aliran distribusi barang dan jasa. Selain itu, pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas masyarakat dengan diberlakukannya PPKM.

2.1.4 Nilai Tukar (kurs)

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua

tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Grafik 2.11. Nilai Tukar IDR terhadap USD Kaltim 2019-2021

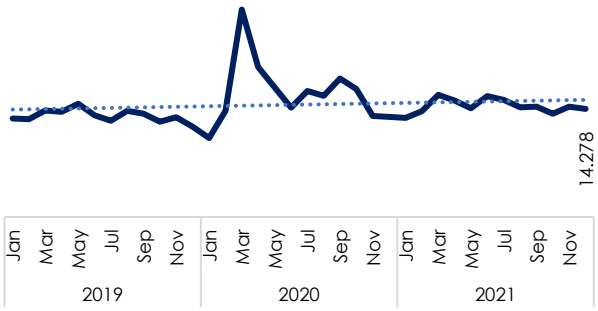

Sumber : BI, 2022 (diolah).

Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar sebagai mata uang utama dunia, dalam tiga tahun terakhir terpantau stabil di kisaran Rp14.000 per USD. Namun demikian nilai tukar rupiah sempat melemah diawal pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020. Pemerintah telah dan akan terus meningkatkan ruang stimulus fiskal dan memberikan kemudahan berusaha di sektor riil termasuk kegiatan pariwisata dan ekspor-impor, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas lain akan selalu berkoordinasi melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan memitigasi dampak risiko Covid-19 terhadap perekonomian domestik.

Selain itu, nilai tukar tidak berpengaruh dengan kegiatan ekspor-impor di Kaltim. Kinerja ekspor-impor di Kaltim membaik sepanjang 2021, bahkan menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Kaltim tetap positif.

2.1.5 Mobilitas Masyarakat

Berdasarkan data *Google Mobility Index (GMI),* mobilitas masyarakat Kaltim sudah meningkat. Hal ini menunjukkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi telah berjalan dengan baik.

Gambar 2.1. *Google Mobility Index* Kalimantan Timur Desember 2021

Sumber : Google, 2022 (diolah).

Berdasarkan lokasi, mobilitas masyarakat di retail dan rekreasi serta toko bahan makanan dan apotek mengalami peningkatan. Sedangkan tempat kerja dan area pemukiman masih berada di bawah aktivitas normal. Hal tersebut disebabkan masih berjalannya kebijakan *work from home* bagi sebagian pekerja kantoran. Namun demikian, kita harus tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menyebarnya varian baru-omicron.

2.1.6 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa konsumen di Kaltim merasa optimis terhadap kondisi perekonomian Kaltim, tercermin dari IKK Desember 2021 sebesar 124,8. IKK Kaltim masih lebih tinggi dari IKK tingkat Nasional yang hanya sebesar 118,3.

Grafik 2.12. IKK Kaltim dan Nasional 2020-2021

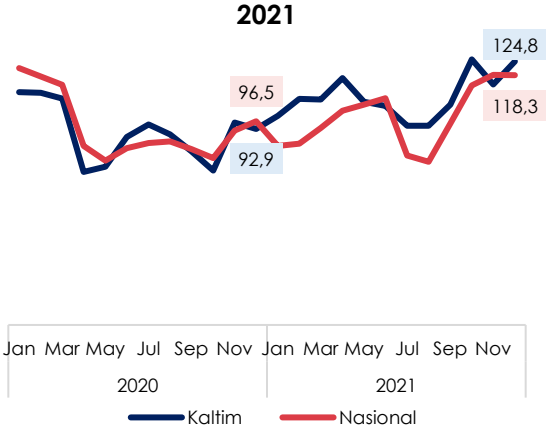

Sumber : Bank Indonesia, 2022 (diolah).

Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan perbaikan penghasilan masyarakat. Selain itu, akselerasi vaksinasi serta vaksin *booster* menambah kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas seperti sedia kala.

2.1.7 Pariwisata

Grafik 2.13. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Kaltim 2019-2021

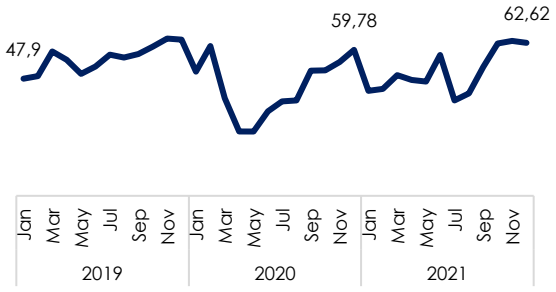

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Sektor pariwisata masih mengalami tekanan di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Desember 2021 sebesar 62,62 persen dengan rata-rata tamu menginap 1,46 hari. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kaltim tahun 2021 turun 69,01 persen (*yoy*).

2.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan suatu bangsa. Untuk mengukur keberhasilan/ ketercapaian pembangunan ekonomi atau kebijakan fiskal pemerintah digunakan indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan antara lain: indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, kondisi ketenagakerjaan/ tingkat pengangguran, NTP, dan NTN. Indikator kesejahteraan regional Kalimantan Timur secara umum mengalami perbaikan sepanjang tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Pandemi Covid-19 memberikan dampak tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga sektor perekonomian. Hampir semua indikator kesejahteraan mengalami kontraksi di tahun 2020. Berbagai kebijakan pembatasan sosial dikeluarkan untuk mencegah dan mengurangi transmisi/ penularan virus tersebut. Hal tersebut harus dilakukan karena kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Namun demikian, hal tersebut berbalik di tahun 2021. Ditemukannya vaksin Covid-19 menjadi "*game changer*" dalam situasi pandemi. Senada dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dengan cepat merespon dengan mengakselerasi program vaksinasi kepada masyarakat.

Hasilnya, di akhir tahun 2021 cakupan vaksinasi di Kaltim mencapai lebih dari 80 persen (tahap I) yang berada di atas rata-rata nasional. Vaksinasi telah menciptakan *herd imunity* dan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk kembali beraktivitas sehingga menggerakkan perekonomian.

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh proses pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan sebuah indeks yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia di sebuah daerah.

Grafik 2.14. Perkembangan IPM Per Provinsi di Kalimantan 2019-2021

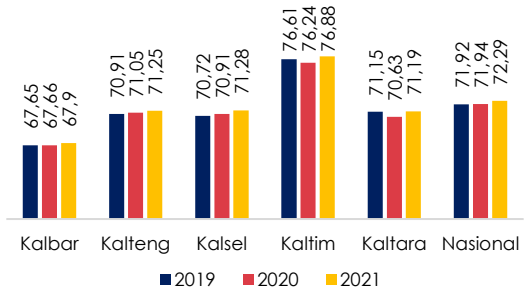

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Perkembangan IPM Kaltim relatif tumbuh positif dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 yang sedikit tertahan akibat dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, IPM Kaltim masih di posisi pertama apabila dibandingkan dengan provinsi lain se-Kalimantan. Sedangkan secara nasional, IPM Kaltim menduduki peringkat ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Sedikit kontradiktif dengan capaian IPM, indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG) Kaltim masih belum mencapai target nasional. IPG Kaltim baru mencapai 85,70 masih dibawah target nasional 91,07, sedangkan IDG Kaltim 66,54 juga dibawah target nasional 75,24. Hal ini menunjukan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan meskipun ketika melihat ukuran keberhasilan Pembangunan Manusia diukur melalui IPM.

Tabel 2.8. Perbandingan IDG dan IPG per Pemda se-Kalimantan Timur 2018-2020

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Paser	62.76	66.20	65.66	70.64	71.41	71.15
Kutai Barat	63.68	61.14	60.60	83.52	83.84	83.87
Kutai Kartanegara	56.44	63.74	61.43	78.83	79.14	78.90
Kutai Timur	55.72	56.35	53.77	76.03	76.51	76.26
Berau	50.55	57.66	57.91	87.92	87.93	87.61
Penajam Paser Utara	50.02	50.36	49.75	86.34	86.22	86.39
Mahakam Ulu	76.04	80.61	80.41	80.18	80.89	80.98
Balikpapan	66.33	69.11	68.97	89.76	89.71	89.65
Samarinda	69.61	66.29	70.65	89.42	89.41	89.27
Bontang	46.36	51.99	51.97	86.61	86.72	86.87
Kalimantan Timur	57.53	65.65	65.54	85.63	85.98	85.70

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Tingginya ketimpangan/ ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan kedepan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Sebagai informasi IDG adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sedangkan IPG adalah rasio IPM Perempuan dengan Laki-laki.

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Grafik 2.15. Tren Tingkat Kemiskinan Kaltim 2019-2021

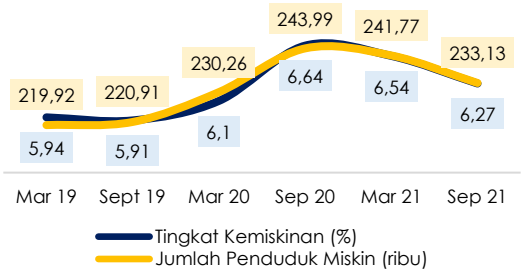

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Kemiskinan masih menjadi masalah multidimensi yang dihadapi di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional, seiring dengan agenda SDGs.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kaltim pada tahun 2021 sebesar 6,27 persen, mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin (*yoy*). Garis kemiskinan Kaltim meningkat 2,90 persen (*yoy*) menjadi Rp703.223,- per kapita per bulan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 70,50 persen pada garis kemiskinan.

Tabel 2.9. Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah di Kalimantan Timur 2019-2021

Tahun	Kota		Desa		Kota + Desa	
	Nilai Batas Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Nilai Batas Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Nilai Batas Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2019	614.221	107,67	597.451	112,25	609.155	219,9
2020	665.970	113,27	652.620	116,99	662.302	230,2
2021	695.824	127,28	673.636	114,48	689.035	241,7

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila dilihat secara spasial kota dan desa, penduduk miskin di desa selalu lebih banyak daripada di kota kecuali di tahun 2021, walaupun garis kemiskinan (GK) di desa selalu lebih rendah daripada kota. Hal ini dapat diartikan bahwa dampak pandemi memang lebih dirasakan di perkotaan dibandingkan perdesaan.

Tabel 2.10. Tingkat Kemiskinan Per Pemda di Kalimantan Timur 2019-2021 (persen)

Kabupaten/ Kota	Tingkat Kemiskinan		
	2019	2020	2021
Paser	8,95	9,23	9,73
Kutai Barat	9,09	9,29	10,2
Kutai Kartanegara	7,20	7,31	7,99
Kutai Timur	9,48	9,55	9,81
Berau	5,04	5,19	5,88
Penajam Paser Utara	7,18	7,36	7,61
Mahakam Ulu	11,3	11,4	11,9
Balikpapan	2,42	2,57	2,89
Samarinda	4,59	4,76	4,99
Bontang	8,41	4,38	4,62

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Namun demikian, apabila dilihat per Pemda, tingkat kemiskinan di Kota (Samarinda, Balikpapan dan Bontang) lebih rendah daripada di wilayah Kabupaten. Secara persentase, Kab. Mahakam Ulu berada di peringkat pertama dengan 11,9 persen penduduk miskin dan yang paling rendah adalah Kota Balikpapan dengan 2,89 persen. Hampir semua kabupaten/ kota mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dalam tiga tahun terakhir. Disisi lain, dilihat secara absolut menurut jumlah penduduk miskin, maka Kab. Kutai Kartanegara mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar sebanyak 62,36 ribu jiwa. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin terendah di Kab. Mahakam Ulu sebanyak 3,18 ribu jiwa.

2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Peningkatan pendapatan yang tinggi akan sedikit manfaatnya bagi masyarakat banyak apabila tingkat pemerataannya rendah, bahkan memungkinkan timbulnya ekses negatif berupa kerawanan sosial jika kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar.

Rasio Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan/ pengeluaran konsumsi di antara individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian menyimpang dari distribusi yang benar-benar merata. Rasio Gini nol mewakili pemerataan pendapatan sempurna dan 100, ketimpangan pendapatan sempurna.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, koefisien gini Kaltim berada di level sedang yaitu berkisar antara 0,3 sampai 0,5. Tingkat ketimpangan Kaltim mengalami penurunan 0,003 poin menjadi 0,331 di bulan September 2021. Selain itu, distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan ukuran Bank Dunia tercatat rendah, sebesar 20,62 persen pada kelompok penduduk 40 persen terbawah.

Selain koefisien gini, terdapat juga Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Grafik 2.16. Perkembangan Rasio Gini, Tingkat Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Kaltim 2019-2021

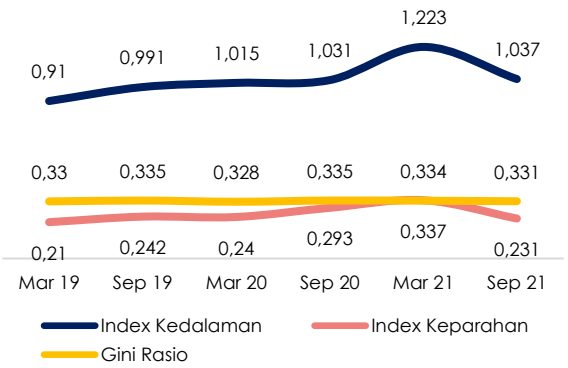

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kalimantan Timur tercatat sebesar 1,037 dan 0,231. Kedua nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin rendah.

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Indikator pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui kesempatan kerja yang memadai. Tersedianya lapangan kerja baru dapat menandakan tercapainya pembangunan ekonomi. Banyaknya masyarakat yang terserap dalam pasar tenaga kerja menjadi kunci dalam pembangunan. Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara *yoy*, TPT Kalimantan Timur pada periode Agustus 2021 mengalami penurunan, menjadi 6,83 persen. Selain itu, TPAK juga terpantau sedikit lebih rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Timur di tengah kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi ketat pada triwulan III 2021 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kebijakan pemerintah berupa PPKM berdampak positif dengan menekan penyabaran Covid-19, namun disisi lain tetap menjaga perekonomian tetap berjalan walaupun sedikit melambat.

Grafik 2.17. Perkembangan Tingkat Ketenagakerjaan dan Pengangguran Kaltim 2019-2021

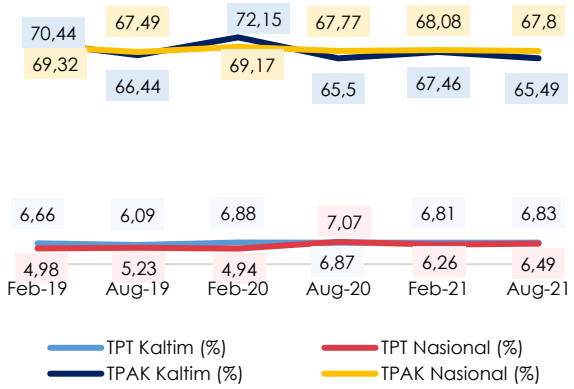

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Timur (21,99 persen), diikuti dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Perdagangan (20,84 persen), serta Akomodasi dan Makan Minum (7,66 persen).

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor utama perekonomian Kaltim, namun hanya menyerap sekitar 7,10 persen tenaga kerja, menurun 0,17 persen dibandingkan tahun 2020. Senada dengan itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami penurunan 0,08 persen. Pangsa penyerapan tenaga kerja yang mengalami peningkatan antara lain sektor pertanian (0,36 persen), sektor akomodasi (0,50 persen), sektor administrasi pemerintahan (0,48 persen) dan sektor industri pengolahan (0,36 persen).

Grafik 2.18. Komposisi Status Pekerja di Kaltim 2021 (persen)

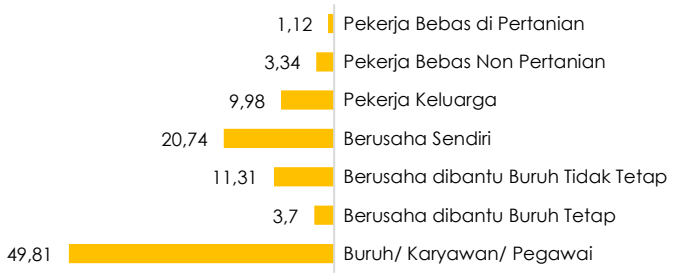

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan orang yang bekerja adalah status pekerjaannya. Jika dilihat komposisi status pekerja di Kalimantan Timur pada tahun 2021, mayoritas penduduk yang bekerja adalah sebagai karyawan/ buruh dengan proporsi mencapai 49,81 persen, kemudian disusul dengan penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 20,74 persen.

Grafik 2.19. Komposisi Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kaltim 2021(persen)

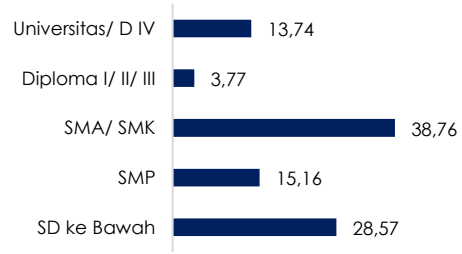

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kalimantan Timur yang berstatus bekerja,

pada tahun 2021 sebagian besar penduduk yang berstatus bekerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir lulusan SMA/SMK dan SD ke bawah.

2.2.5 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) naik signifikan mencapai 129,93. NTP sepanjang tahun 2021 menunjukkan tren positif sejak awal tahun hingga akhir tahun. NTP bulan Desember 2021 mencapai 129,93, naik cukup signifikan dibandingkan kondisi awal tahun yang berada di level 116,24.

Grafik 2.20. Perkembangan NTP Kaltim dan Nasional 2020-2021

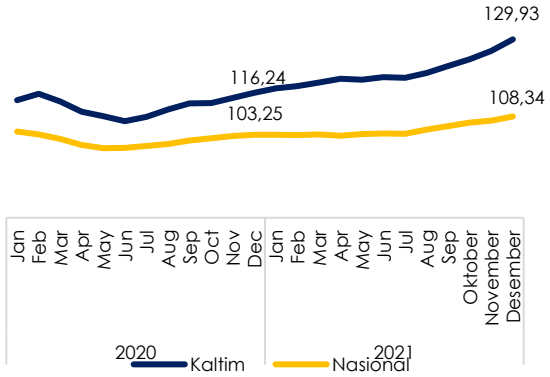

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani di Kaltim semakin membaik di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, NTP Kaltim turun ke peringkat tiga di bawah Kalbar (143,61) dan Kalteng (131,07) untuk regional Kalimantan. Walaupun NTP Kaltim masih jauh di atas NTP nasional yang hanya 108,34. Apabila dilihat NTP per subsektor, tanaman perkebunan rakyat sangat mendominasi pembentukan NTP di wilayah Kaltim. Subsektor ini didominasi oleh tanaman sawit dimana harga tandan buah segar (TBS) sawit cenderung naik selama tahun 2021. Sedangkan tiga subsektor lain yaitu hortikultura, peternakan dan perikanan masih relatif stabil serta telah berada diatas level 100. Subsektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah adalah subsektor tanaman pangan. NTP subsektor ini cenderung turun sepanjang tahun 2021, pada Desember 2021 NTP-nya hanya sebesar 93,93. NTP<100 menandakan petani di subsektor ini dapat dikatakan belum sejahtera. Padahal subsektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan.

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kaltim turun menjadi 102,00. NTN bulan Desember 2021 berada pada level 102,00, mengalami penurunan 0,57 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan pendapatan nelayan dipengaruhi oleh menurunnya hasil tangkapan karena faktor cuaca serta permintaan ikan yang menurun akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan diantaranya melalui program asuransi nelayan, kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat, berbagai fasilitas pendanaan dan pelatihan diversifikasi usaha.

Grafik 2.21. Perkembangan NTN Kaltim dan Nasional 2020-2021

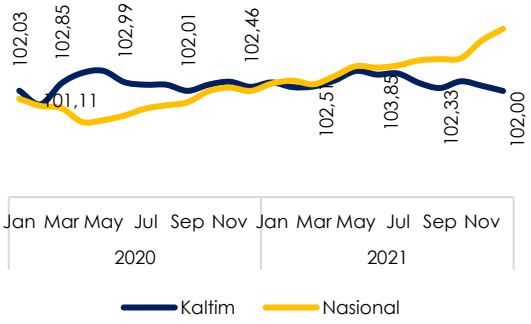

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

2.3 REVIU CAPAIAN KINERJA MAKRO KESRA REGIONAL

Sampai dengan akhir tahun 2021, kinerja ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Kaltim secara umum telah berjalan dengan baik. Beberapa sasaran indikator makro kesra telah dapat dicapai bahkan beberapa diantaranya melampaui target seperti IPM dan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat kemiskinan dan rasio gini masih belum mencapai target yang telah dicanangkan pada RPJMD.

Tabel 2.11. Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Pembangunan Prov. Kaltim 2021

No.	Sasaran Makro Kesra	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Hasil Reviu
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	75,56	76,88	75,76	Tercapai, IPM tahun 2021, telah tercapai melebihi target
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,87	6,27	5,78	Belum tercapai, berdasarkan data bulan September 2021
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	2,48	3,5±1	Belum tercapai, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 secara yoy
4	Indeks Rasio Gini	0,328	0,331	0,327	Belum tercapai, berdasarkan data bulan September 2021

Sumber : RPJMD Prov. Kaltim, 2022 (diolah).

IPM Kaltim tahun 2021 sebesar 76,88 telah melebihi target 75,56. Untuk target tahun 2022 pun masih lebih rendah dari capaian tahun 2021. Dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembangunan manusia yang telah ada, besar kemungkinan target tahun 2022 akan tercapai. Namun demikian, tantangan pembangunan manusia di Kaltim ada pada peningkatan kesetaraan pembangunan dan pemberdayaan gender.

Sedangkan untuk tingkat kemiskinan, realisasi tahun 2021 masih belum memenuhi target. Ditambah dengan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Kaltim. Pemda di Kaltim harus terus berupaya untuk memberikan atau membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh masyarakat untuk mengaksesnya. Selain itu, pemerintah pusat-daerah harus mengakselerasi realisasi belanjanya dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim tetap dalam level positif sepanjang tahun 2021, namun demikian realisasi pertumbuhan tersebut masih tipis dibawah target.

Walaupun Kaltim menguasai struktur ekonomi regional Kalimantan dengan *share* hampir 50 persen, namun dilihat dari indikator kesejahteraan rakyat, Kaltim tidak selalu lebih baik dari daerah lain. Kaltim hanya memiliki satu indikator terbaik se-Kalimantan melalui IPM. Dua indikator yaitu tingkat kemiskinan dan nilai tukar petani berada di posisi ketiga, dan dua indikator lainnya yaitu tingkat ketimpangan dan nilai tukar nelayan berada diperingkat terakhir. Hal ini menandakan masih banyak tantangan atau pekerjaan rumah bagi Kaltim untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan merata.

Tabel 2.12. Perbandingan Indikator Kesejahteraan Rakyat Regional Kalimantan 2021

Indikator Makro Kesra	Kaltim	Kalbar	Kalsel	Kalteng	Kaltara	Periode
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,88	67,9	71,28	71,25	71,19	2021
Tingkat Kemiskinan	6,54	7,15	4,83	5,16	7,36	Mar-21
Tingkat Ketimpangan	0,334	0,313	0,330	0,323	0,292	Mar-21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,83	5,82	4,95	4,53	4,58	Aug-21
Nilai Tukar Petani (NTP)	129,93	143,61	110,8	131,07	108,67	Dec-21
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,00	106,8	102,08	102,89	105,93	Dec-21

Sumber : BPS Kaltim, 2022 (diolah).

2.4 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Tahun 2022 diprakirakan menjadi momentum bagi ekonomi Kaltim untuk tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Prakiraan tersebut didasari oleh membaiknya aktivitas masyarakat di Kaltim seiring akselerasi program vaksinasi baik tahap I dan II serta *booster*. Disisi lapangan usaha, tren positif kinerja pertanian, industri pengolahan dan konstruksi diprakirakan memberikan kontribusi lebih besar terhadap ekonomi Kaltim. Selain itu, proses pemindahan IKN baru ke wilayah Kaltim yang akan dimulai tahun 2022 akan berdampak positif dan diharapkan memberikan *multiplier effect* pada seluruh sektor lapangan usaha. Hal itu juga akan memacu peningkatan sisi investasi dengan menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri.

Sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi lapngan usaha terbesar di Kaltim diprakirakan sedikit tertahan di tahun 2022. Sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar di sepanjang tahun 2021 akan tetap bertahan, namun demikian pertumbuhannya diprakirakan sedikit tertahan. Pasca *the 26th UN Climate Change Conference of The Parties* (COP 26) yang dilaksanakan pada triwulan IV 2021, berbagai negara di dunia termasuk Tiongkok berkomitmen untuk membatasi penggunaan batu bara dan segera beralih ke sumber energi baru terbarukan (EBT). Hal ini akan memicu/ mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap harga komoditas batubara seiring dengan menurunnya permintaan dari berbagai negara terutama Tiongkok.

Inflasi pada tahun 2022 diprakirakan akan tetap stabil walapun dimungkinkan pergerakannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi yang berjalan positif sepanjang tahun 2021 akan tetap berlanjut di tahun 2022. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat sehingga berimbas pada kenaikan daya beli. Selain itu, inflasi juga diprakirakan bersumber dari terjadinya *revenge travel* yang membuat melonjaknya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan terutama untuk liburan setelah sebelumnya pemerintah melakukan pembatasan yang ketat. Adanya putusan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% juga menjadi *upside risk* tekanan inflasi Kaltim. Pemerintah, utamanya Pemda harus lebih waspada dan memberikan perhatian terutama pada pasokan barang/ sektor produksi kebutuhan pokok supaya tingkat inflasi tetap terkendali.

Tingkat kesejahteraan petani (NTP) diprakirakan akan tetap tumbuh positif. Pemerintah pusat siap menggelontorkan dana dalam pembiayaan *food estate* atau program menjaga ketahanan pangan di Kaltim sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan IKN baru di Kaltim. Selain itu, Bappeda Kaltim telah mengusulkan kegiatan *food estate* dalam *major project* yang dituangkan dalam perubahan RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023.

BAB III

ANALISIS FISKAL REGIONAL

Total realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp30,54 triliun atau **tumbuh 27,00 persen** dibandingkan tahun 2020. Dan dari sisi belanja, realisasi belanja dan transfer konsolidasian mencapai Rp41,33 triliun, **tumbuh 7,65 persen (*yoy*)**.

BAB III
ANALISIS FISKAL REGIONAL

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Tabel 3.1. *I-Account* APBN Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Uraian	2019			2020			2021			Growth%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	(Realisasi yoy)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**22.675,10**	**21.634,30**	**95,41%**	**17.916,3**	**17.597,1**	**98,22%**	**19.413,7**	**22.355,63**	**115,15%**	**27,04%**
Penerimaan Perpajakan	21.601,4	20.063,4	92,88%	16.759,0	16.066,3	95,87%	18.167,0	20.595,2	113,37%	28,19%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.073,70	1.570,90	146,31%	1.157,3	1.530,8	132,27%	1.246,7	1.760,4	141,20%	15,00%
Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
BELANJA NEGARA	**37.562,39**	**35.280,55**	**93,93%**	**33.164,9**	**32.267,3**	**97,29%**	**31.004,8**	**30.385,7**	**98,00%**	**-5,83%**
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	**9.171,59**	**8.408,15**	**91,68%**	8.980,7	8.314,0	**92,58%**	9.470,1	9.146,1	**96,58%**	**10,01%**
Belanja Pegawai	3.129,97	3.065,44	**97,94%**	3.230,2	3.065,6	**94,90%**	3.077,7	3.052,5	**99,18%**	**-0,43%**
Belanja Barang	3.526,39	3.238,91	**91,85%**	3.615,2	3.238,0	**89,57%**	3.243,4	3.056,8	**94,25%**	**-5,60%**
Belanja Modal	2.501,46	2.092,91	**83,67%**	2.125,4	2.000,6	**94,13%**	3.142,5	3.030,4	**96,43%**	**51,47%**
Belanja Bantuan Sosial	13,77	10,89	**79,08%**	9,9	9,8	**98,99%**	6,5	6,4	**98,44%**	**-34,69%**
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	**28.390,80**	**26.872,40**	**94,65%**	**24.184,2**	**23.953,3**	**99,05%**	**21.534,7**	**21.239,6**	**98,63%**	**-11,33%**
Dana Bagi Hasil	18.621,0	17.365,3	**93,26%**	14.339,4	14.284,5	**99,62%**	11.414,2	11.414,2	**100,00%**	**-20,09%**
Dana Alokasi Umum	5.547,0	5.518,0	**99,48%**	5.435,5	5.393,1	**99,22%**	5.327,7	5.327,7	**100,00%**	**-1,21%**
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.147,8	1.060,2	**92,37%**	1.016,1	898,1	**88,39%**	1.285,1	1.100,0	**85,60%**	**22,48%**
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.007,9	1.881,4	**93,70%**	1.999,8	1.993,8	**99,70%**	2.120,4	2.024,5	**95,48%**	**1,54%**
Dana Insentif Daerah	197	186,9	**94,87%**	493,6	484,8	**98,22%**	448,3	448,3	**100,00%**	**-7,53%**
Dana Otsus dan DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Dana Desa	**870,1**	**860,6**	**98,91%**	**899,8**	**899,0**	**99,91%**	**939,0**	**924,9**	**98,50%**	**2,88%**
SURPLUS/ (DEFISIT)	**(14.887,29)**	**(13.646,25)**	**91,66%**	**(15.248,6)**	**(14.670,2)**	**96,21%**	**(11.591,1)**	**(8.030,1)**	**69,28%**	**-45,26%**
PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
Penerimaan Pembiayaan	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	**0,00%**
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	**0,00%**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**(14.887,29)**	**(13.646,25)**	**91,66%**	**(15.248,6)**	**(14.670,2)**	**96,21%**	**(11.591,1)**	**(8.030,1)**	**69,28%**	**-45,26%**

Sumber : Kanwil DJPb Kaltim, Aplikasi OMSPAN, 2022 (diolah).

Realisasi pendapatan negara regional Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat Rp22.355 miliar atau sebesar 115,15 persen dari target dalam APBN 2021. Apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu maka realisasi pendapatan negara tersebut mengalami pertumbuhan 27,04 persen. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp30.385 miliar dari pagu sebesar Rp31.004 miliar. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,83 persen dibandingkan periode tahun 2020.

3.1.1 Pendapatan Negara

Grafik 3.1. Pendapatan Negara Regional Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Sumber : DJP Kaltimtara dan DJBC Kalbagtim, 2022 (diolah).

Secara *yoy*, pendapatan negara regional Kaltim tahun 2021 tumbuh positif. Bangkitnya perekonomian Kaltim ditandai dengan capaian pendapatan negara regional Kaltim sebesar Rp22,35 triliun atau tumbuh 27,04 persen dibandingkan tahun lalu.

3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 28,19 persen *(yoy)*. Penerimaan Perpajakan

adalah kontributor terbesar pada pendapatan negara tingkat regional Kalimantan Timur. Besaran kontribusi penerimaan perpajakan adalah sebesar 92,13 persen dari keseluruhan realisasi pendapatan tahun 2021. Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, total realisasi penerimaan perpajakan lingkup Kalimantan Timur tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp4.528,9 miliar atau 28,19 persen dibanding realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Tingginya pertumbuhan penerimaan perpajakan tersebut disokong oleh penerimaan bea keluar sebesar Rp2.967,5 miliar atau tumbuh 7.797,49 persen dibandingkan tahun 2020. Kinerja ekspor impor yang luar biasa di tahun 2021 terutama dari sektor pertambangan dan penggalian memberikan dampak positif bagi pendapatan negara.

Tabel 3.2. Perkembangan Pendapatan Perpajakan Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Jenis Penerimaan Perpajakan	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PPh	13.182,6	11.967,7	9.220,5	8.873,4	10.499,8	8.476,8
PPN & PPnBM	6.615,8	5.982,6	6.182,1	5.309,5	6.076,5	6.962,9
PBB	1.022,3	1.430,8	786,3	1.270,0	873,1	1.155,1
Cukai	0,7	1,0	0,2	0,9	0,3	0,6
Pajak Lainnya	177,4	99,6	95,8	111,1	195,6	145,2
Bea Masuk	590,6	559,1	454,0	464,0	504,0	887,1
Bea Keluar	12,2	22,6	20,3	37,6	17,8	2.967,5
Total	**21.601,6**	**20.063,4**	**16.759,1**	**16.066,4**	**18.167,1**	**20.595,3**

Sumber : DJP Kaltimtara dan DJBC Kalbagtim, 2022 (diolah).

Kinerja perpajakan Kaltim secara umum berjalan dengan baik. Hampir seluruh target penerimaan perpajakan dapat dicapai kecuali untuk jenis penerimaan PPh dan pajak lainnya yang masih dibawah target.

Kebijakan insentif PPh Pasal 21, 22, 23, 25 dan PPh final jasa konstruksi untuk mendorong perekonomian di masa pandemi membuat penerimaan PPh masih tertahan. Selain itu, pandemi Covid-19 membuat serapan tenaga kerja belum normal kembali dengan masih adanya pemutusan hubungan kerja atau pengurangan jam kerja. Namun demikian, tekanan di sektor tenaga kerja ini direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan kartu pra kerja yang memberikan peluang untuk peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja sehingga memberikan semangat dan peluang kerja lebih baik kedepannya.

Grafik 3.2. Perkembangan dan Komposisi Pendapatan Perpajakan Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

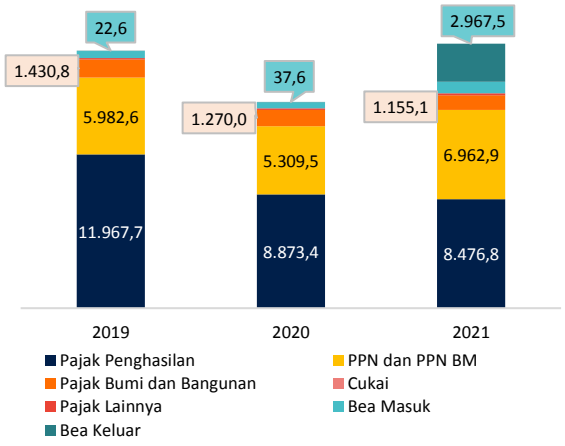

Sumber : DJP Kaltimtara dan DJBC Kalbagtim, 2022 (diolah).

Walaupun belum mencapai target dan realisasi penerimaan PPh juga menurun dibandingkan tahun lalu, namun PPh masih menjadi kontributor utama penerimaan perpajakan di regional Kaltim. Kontribusi PPh masih sangat tinggi mencapai 43,68 persen dari total penerimaan perpajakan, sedangkan PPN dan PPnBM menyumbang 35,88 persen, duduk diposisi kedua.

Adanya insentif PPnBM yang ditanggung oleh pemerintah untuk kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu memberikan dampak positif terhadap total penjualan

yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Insentif tersebut tidak hanya memberikan *benefit* pada industri otomotif semata, namun juga memberikan *multiplier effect* pada sektor-sektor lain. Masyarakat dan pemerintah pun ikut menikmati kebijakan insentif perpajakan tersebut.

Tabel 3.3. Perkembangan dan Komposisi Pendapatan Perpajakan Kaltim 2019-2021

Jenis Penerimaan Perpajakan	Growth Target	Growth Realisasi	Kontribusi
PPh	13,87%	-4,47%	43,68%
PPN & PPnBM	-1,71%	31,14%	35,88%
PBB	11,05%	-9,05%	5,95%
Cukai	7,03%	-30,52%	0,00%
Lainnya	104,27%	30,77%	0,75%
Bea Masuk	11,03%	91,19%	4,57%
Bea Keluar	-12,36%	7797,49%	15,29%

Sumber : DJP Kaltimtara dan DJBC Kalbagtim, 2022 (diolah).

Sementara itu, tingginya harga batubara sepanjang tahun 2021 memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan untuk jenis bea keluar. Pertumbuhan penerimaan jenis ini mencapai 7.797,49 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan komoditi ekspor utama Kaltim adalah batubara.

Grafik 3.3. Tren Rasio Pajak Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

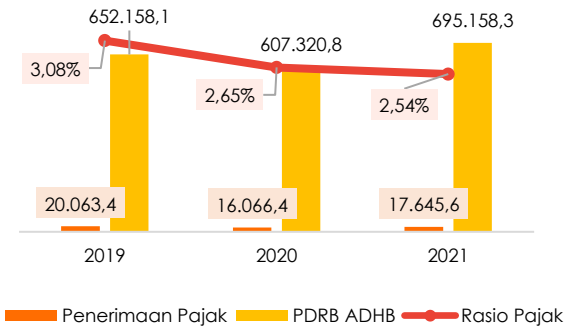

Sumber : DJP Kaltimtara, DJBC Kalbagtim dan BPS Kaltim, 2022 (diolah).

***Tax Ratio* masih rendah**. *Tax ratio*/ rasio pajak digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak dengan cara realisasi penerimaan pajak dibagi PDRB. Di wilayah Kaltim rasio pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan bahkan sudah dibawah 3 persen di tahun 2021. Selain adanya insentif dibidang perpajakan, penurunan/ rendahnya *tax ratio* disebabkan oleh sebagian wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki NPWP di luar wilayah Kaltim sehingga tidak dihitung sebagai penerimaan Kaltim. Dengan demikian pemungutan pajak riil yang terjadi di wilayah Kaltim tidak dapat terdeteksi dengan akurat.

Tabel 3.4. Rasio Pajak terhadap PDRB pada 7 Lapangan Usaha Kaltim 2019-2021

Kab./ Kota	2019	2020	2021
Jasa Perusahaan	37,89%	41,52%	41,04%
Jasa Lainnya	36,86%	35,53%	33,88%
Pengadaan Listrik dan Gas	28,21%	20,07%	23,18%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Ulang	17,61%	17,42%	23,18%
Jasa Keuangan	8,17%	6,63%	3,95%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,70%	6,57%	7,66%
Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,35%	7,00%	6,79%

Sumber : DJP Kaltimtara, DJBC Kalbagtim dan BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila dilihat dari rasio pajak per lapangan usaha, LU jasa perusahaan dan jasa lainnya mencatatkan rasio pajak yang sangat tinggi. Sementara itu, LU pertambangan dan penggalian yang menguasai lebih dari 40 persen total PDRB, rasio pajaknya tercatat hanya 2,03 persen.

Realisasi insentif perpajakan di Kaltim naik di tahun 2021. Insentif pajak untuk mendongkrak perekonomian dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha di Kaltim dengan realisasi insentif mencapai Rp630,6

miliar, naik daripada tahun 2020 sebesar Rp466,5 miliar.

Tabel 3.5. Realisasi Insentif Pajak Kaltim 2020-2021 (miliar Rp)

Insentif Pajak	2020	2021
PPh Pasal 21 DTP	101,9	193,2
Pembebasan PPh 22 Impor	15,7	18,8
Diskon Angsuran PPh Pasal 25	199,0	229,5
Percepatan Restitusi PPN	149,9	189,0
Total	**466,5**	**630,6**

Sumber : DJP Kaltimtara, 2022 (diolah).

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP tumbuh 15,00 persen (yoy). Realisasi PNBP menyumbang 7,87 persen dari total pendapatan negara regional Kaltim. Realisasi tersebut di tahun 2021 mencapai Rp1,76 triliun atau 141,20 persen dari target. Komponen PNBP Lainnya tumbuh 3,60 persen, sedangkan komponen pendapatan BLU naik 58,18 persen (*yoy*).

Tabel 3.6. Target dan Realisasi PNBP Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

PNBP	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Lainnya	810,10	1.274,80	867,60	1.211,10	909,40	1.254,70
Pendapatan BLU	263,60	296,10	289,70	319,70	337,30	505,70
Jumlah	**1.073,70**	**1.570,90**	**1.157,30**	**1.530,80**	**1.246,70**	**1.760,40**

Sumber : Aplikasi OMSPAN, 2022 (diolah).

Grafik 3.4. Perkembangan dan Komposisi PNBP Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

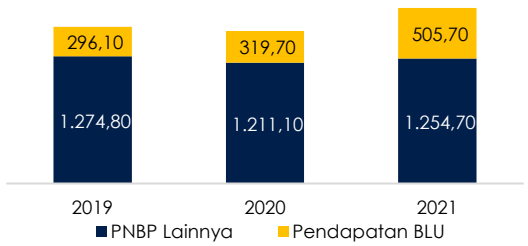

Sumber : Aplikasi OMSPAN, 2022 (diolah).

Jasa layanan umum badan layanan umum (BLU) dan jasa transformasi, komunikasi dan informatika serta jasa kepelabuhanan memberikan kontribusi tertinggi untuk PNBP Kaltim tahun 2021. Peningkatan pergerakan aktivitas masyarakat membuat sektor pelayanan publik kembali ke titik normal. Kebiasaan akan komunikasi secara luring maupun daring dirasa semakin membuat efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan. Selain itu, memberikan efek positif terhadap penerimaan di bidang komunikasi.

Grafik 3.5. Pertumbuhan PNBP Kaltim 2019-2021

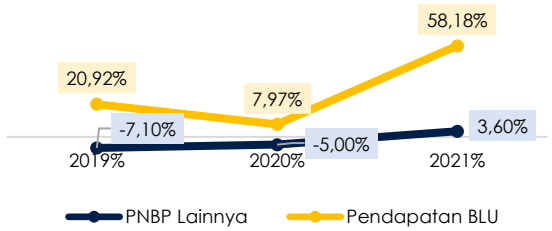

Sumber : Aplikasi OMSPAN, 2022 (diolah).

3.1.2 Belanja Negara

Belanja negara regional Kaltim masih mengalami kontraksi di tahun 2021. Dorongan belanja negara sebagai instrumen utama pemulihan ekonomi tetap berlanjut meskipun sedikit tertahan di tahun 2021.

Grafik 3.6. Perkembangan Belanja Negara Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

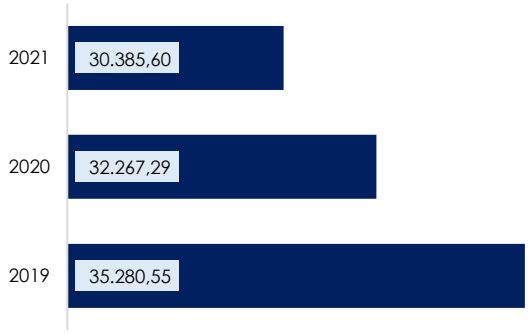

Sumber : Aplikasi SIKRI dan DJPK, 2022 (diolah).

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Perkembangan belanja pemerintah pusat di regional Kaltim mengalami peningkatan baik dari alokasi maupun realisasi. Alokasi pagu meningkat 5,4 persen (*yoy*) seiring dengan perencanaan yang lebih matang dalam menghadapi situasi pandemi,

sehingga realokasi dan refocusing relatif menurun dibandingkan tahun 2020.

Grafik 3.7. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Regional Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

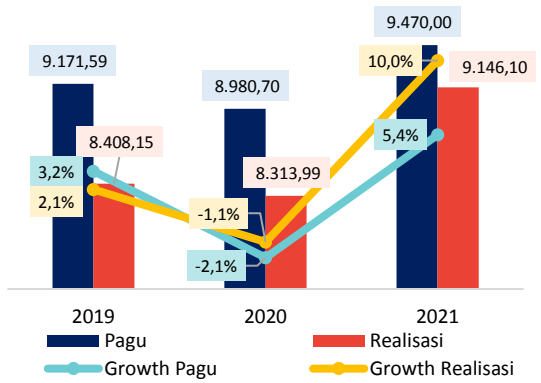

Sumber : Aplikasi SIKRI, 2022 (diolah).

Per 31 Desember 2021, realisasi BPP mencapai 96,58 persen dari pagu, tumbuh 10,01 persen (*yoy*). Hal tersebut tidak terlepas dari peran Ditjen Perbendaharaan yang mendorong percepatan belanja Kementerian/ Lembaga. Capaian tersebut menjadi salah satu katalis dalam pemulihan ekonomi regional Kaltim yang ditandai berbagai perbaikan indikator makro ekonomi maupun kesejahteraan.

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, jenis belanja modal yang merupakan cerminan komitmen pembangunan nasional tumbuh signifikan mencapai 51,47 persen (*yoy*). Sedangkan realisasi jenis belanja lainnya relatif masih sama dengan tahun lalu. Belanja modal tahun 2021 juga sangat penting karena diarahkan untuk proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, bendungan Sepaku-Semoi dan penyelesaian jembatan Pulau Balang. Ketiga proyek tersebut utamanya untuk mendukung IKN baru serta peningkatan perekonomian regional Kaltim.

Grafik 3.8. Perkembangan BPP per Jenis Belanja Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

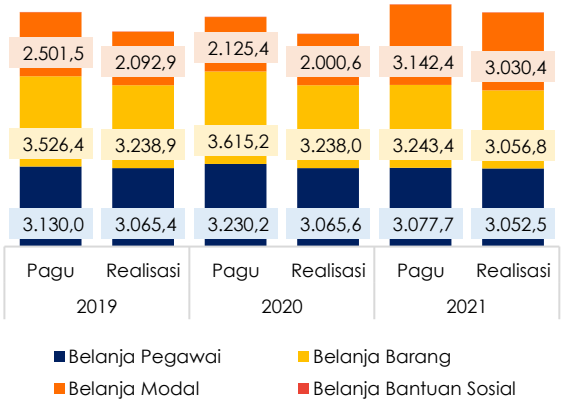

Sumber : Aplikasi SIKRI, 2022 (diolah).

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/ Lembaga

Grafik 3.9. Perkembangan BPP pada 10 K/L Terbesar Kaltim 2021

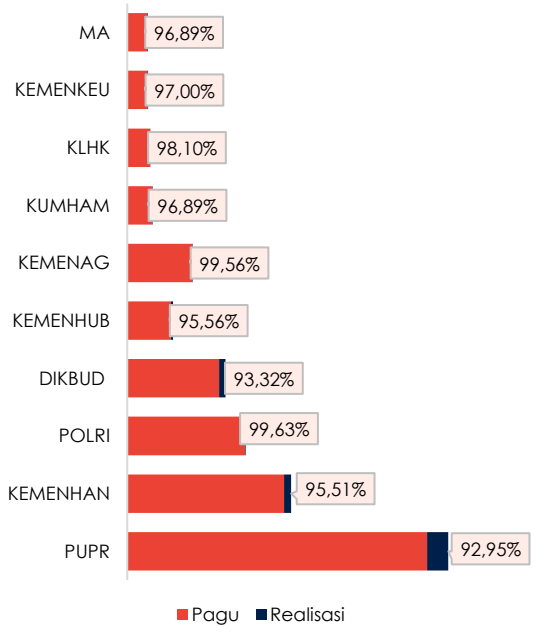

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Kementerian PUPR mendapat porsi belanja paling tinggi di Kaltim. Belanja-belanja strategis di Kementerian PUPRdi tahun 2021 diantaranya pembangunan jalan tol

Samarinda-Balikpapan, pembangunan bendungan Sepaku Semoi yang menjadi salah satu bendungan penyedia air baku untuk IKN dan bendungan Marangkayu di Kab. Kutai Timur. Selain itu juga terdapat pembangunan berbagai jembatan dan jalan nasional untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kaltim.

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Grafik 3.10. Perkembangan BPP per Fungsi Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

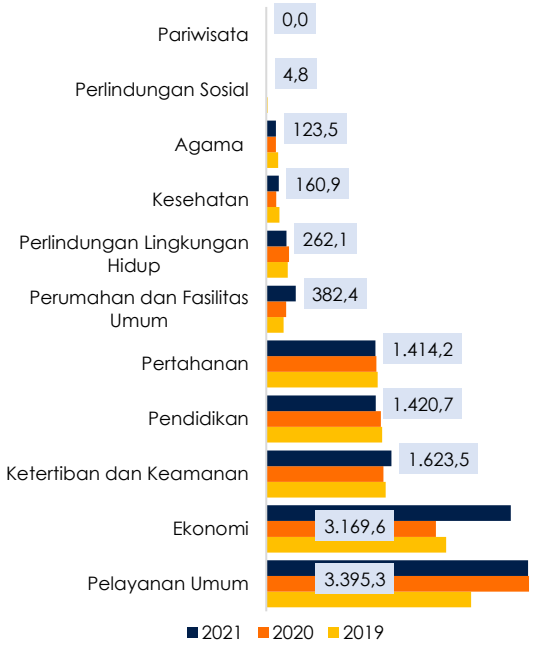

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Respon pemerintah terhadap pandemi tercermin dengan peningkatan belanja fungsi ekonomi. Belanja fungsi ini terutama terdapat pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Fungsi ekonomi merupakan belanja pendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan serta menggerakkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Untuk belanja fungsi-fungsi lainnya relatif tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik 3.11. Struktur Realisasi TKDD Kaltim 2019-2021

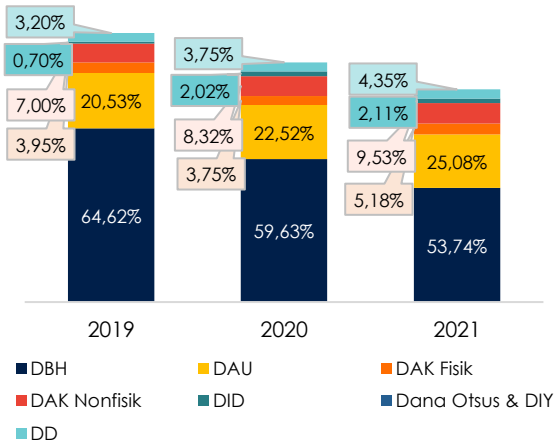

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Realisasi TKDD masih didominasi dari komponen DBH dan DAU masing-masing sebesar 53,74 persen dan 25,08 persen di tahun 2021. Disisi lain realisasi TKDD secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu terutama disebabkan adanya penurunan porsi DBH Kaltim.

Grafik 3.12. Realisasi TKDD Kaltim 2021

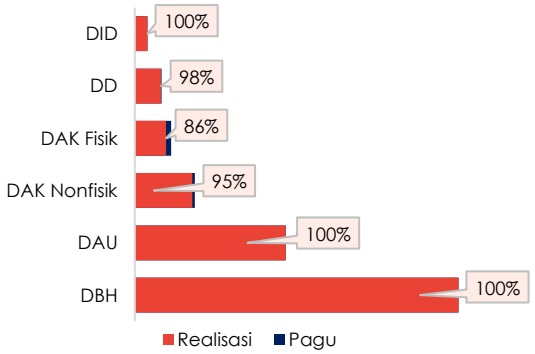

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Realisasi TKDD per komponen cukup baik, dengan hanya komponen DAK Fisik yang mencatatkan realisasi rendah yaitu hanya 86 persen. Penyebab penurunan realisasi

TKDD dibandingkan tahun lalu antara lain: 1)alokasi pagu TKDD turun sebesar 24,9 persen; 2)tidak ada kebijakan relaksasi pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa; dan 3)keterlambatan pencairan dana transfer umum (DBH dan DAU).

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Grafik 3.13. Perkembangan DAU Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

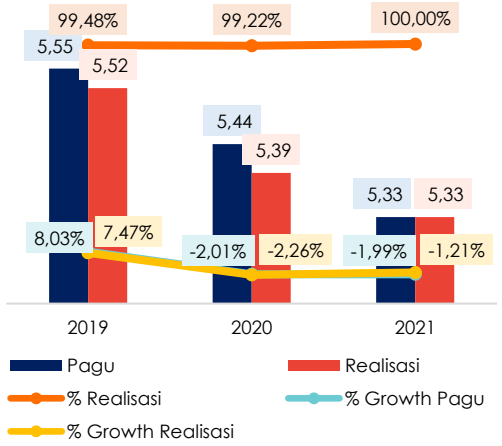

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Realisasi DAU dan DBH Kaltim tahun 2021 sebesar 100 persen. Alokasi pagu DBH Kaltim mengalami penurunan sebesar 20,40 persen. Hal ini disebabkan proyeksi penerimaan DBH yang ditargetkan turun disebabkan dampak pandemi. Namun demikian, kondisi global yang menguntungkan sehingga mengerek harga komoditi utama Kaltim (batubara) membuat aktivitas penambangan batubara mengalami kenaikan berimbas pada setoran royalti eksploitasi/ eksplorasi meningkat.

Grafik 3.14. Perkembangan DBH Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

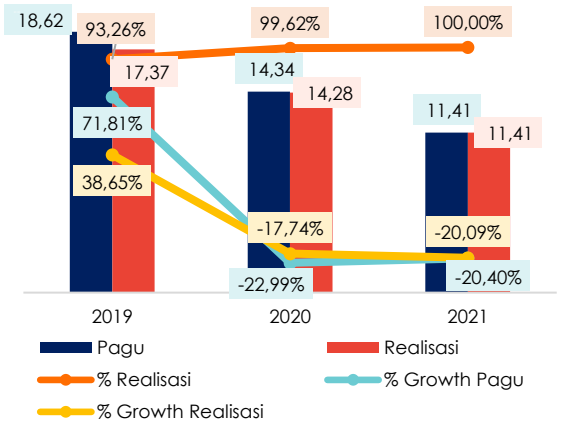

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.

Grafik 3.15. Perkembangan DAK Fisik Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

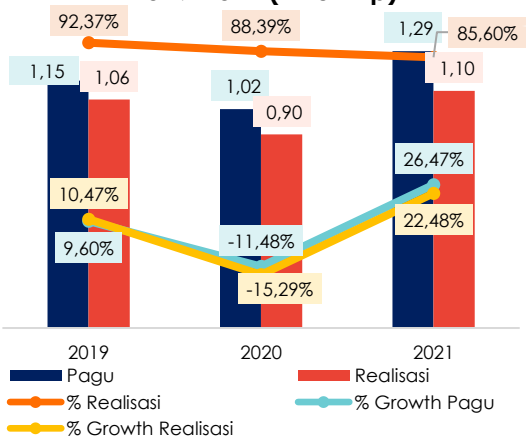

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Realisasi DAK Fisik Kaltim tahun 2021 tumbuh positif 22,48 persen. Walaupun masih belum optimal, namun realsasi DAK Fisik Kaltim tahun 2021 tumbuh positif 22,48 persen. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran DAK Fisik tersebut antara lain: 1. Adanya verifikasi APIP daerah

terhadap kontrak, tidak adanya standar verifikasi membuat penyaluran DAK Fisik sedikit mengalami kendala di awal tahun; 2. Keterlambatan proses lelang/ terjadinya gagal lelang; dan 3. Adanya kegagalan dalam penyelesaian kontrak oleh pihak ketiga.

Untuk DAK Non Fisik yang berupa dana BOS, realisasi di tahun 2021 tumbuh 1,54 persen (*yoy*). Namun demikian, persentase realisasi terhadap pagu turun menjadi 95,48 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 99,70 persen. Dilihat dari portal bos.kemendikbud untuk Kaltim sudah diajukan 486 sekolah, namun yang divalidasi hanya 467 sekolah.

Grafik 3.16. Perkembangan DAK Nonfisik Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

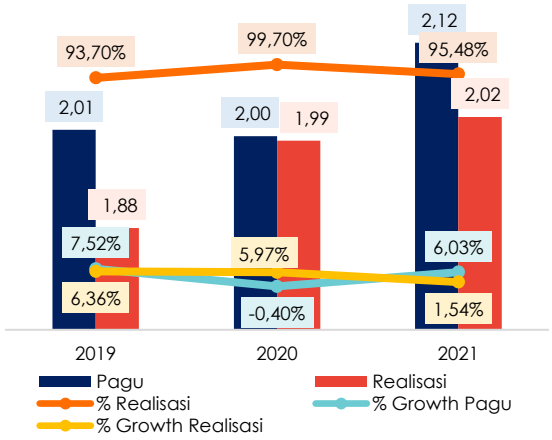

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

3.1.3.3 Dana Insentif Daerah (DID)

DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. DID juga berfungsi memberikan dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan kinerja APBD mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Grafik 3.17. Perkembangan DID Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

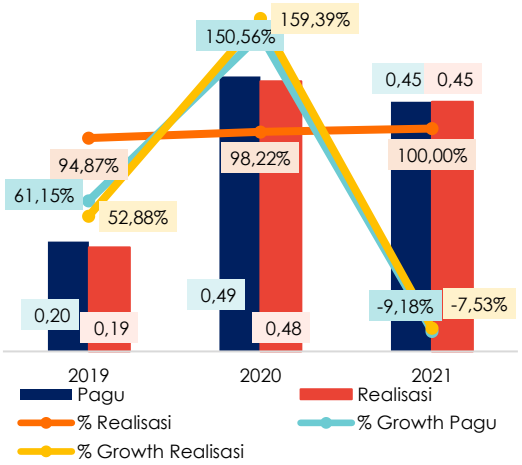

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Penurunan pagu DID di tahun 2021 disebabkan kinerja Pemda di Kaltim yang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah dengan salah satu Pemda yaitu Kutai Timur tidak mendapatkan alokasi DID karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan APBD-nya.

3.1.3.4 Dana Desa (DD)

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ kota dan digunakan unuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa tumbuh 2,88 persen. Peningkatan realisasi Dana Desa utamanya digunakan untuk peningkatan perekonomian desa melalui kegiatan/ proyek dengan skema padat karya untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan fasilitas lainnya. Dana Desa juga digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDes untuk penguatan BUMDes

tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa.

Grafik 3.18. Perkembangan Dana Desa Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

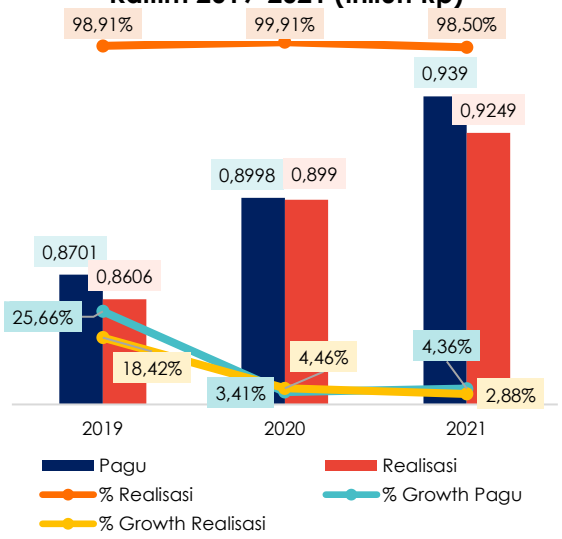

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Disisi lain, BLT DD telah tersalurkan sampai dengan bulan ke-12. Kebijakan penyaluran BLT DD tiga bulanan memberikan dampak positif, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan haknya secara tepat waktu. Dengan tersalurkannya BLT DD tepat waktu, pemulihan ekonomi terutama di perdesaan dapat diakselerasi dikarenakan BLT DD tersebut sebagian besar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok.

3.1.4 Surplus/ Defisit APBN

Grafik 3.19. Perkembangan Surplus/ Defisit Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

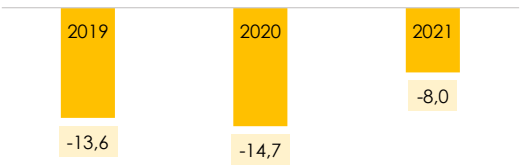

Sumber : Aplikasi SIMTRADA, 2022 (diolah).

Defisit APBN regional Kaltim tahun 2021 turun. Tahun 2021 defisit APBN regional Kaltim sebesar Rp8,03 triliun atau mengalami penurunan 45,26 persen (*yoy*). Hal ini menandakan perbaikan pelaksanaan APBN baik dari sisi penerimaan maupun belanja serta ditopang oleh membaiknya perekonomian Kaltim. Selain itu juga memberikan bukti bahwa kebijakan fiskal pemerintah berjalan positif dalam menanggulangi pandemi serta mengakselerasi pemulihan ekonomi.

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

Sampai dengan tahun 2021, Kaltim memiliki lima satker BLU. Perubahan dari satker biasa ke satker BLU dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisien, efektif dan produktif tanpa mengutamakan keuntungan/ *non-profit oriented*.

Tabel 3.7. Nilai Aset dan Pagu BLU Pusat Tahun 2021 (miliar Rp)

No	Jenis Layanan	BLU	Nilai Aset	Pagu PNBP	Pagu RM	Jumlah Pagu
1	Pendidikan	Universitas Mulawarman*	4.332,6	273,1	208,7	481,8
2	Kesehatan	RS Bhayangkara Balikpapan	151,2	69,5	5,1	74,6
3	Kesehatan	RS Hardjanto	147,9	64,2	20,7	84,9
4	Bandar Udara	Bandar Udara Kalimarau	734,0	12,5	47,4	59,8
5	Pendidikan	Politeknik Kesehatan Kaltim	260,8	12,2	57,7	69,9

Sumber : Aplikasi OMSPAN dan E-RekonLK, 2022 (diolah).

BLU yang terbesar baik secara pagu atau aset yang dimiliki terdapat pada Universitas Mulawarman yang bergerak dibidang layanan pendidikan yang merupakan BLU tertua di Kaltim. Sedangkan yang termuda adalah RS Hardjanto di Balikpapan yang menjadi satker BLU di tahun 2020. Terdapat satu BLU dibidang perhubungan yaitu Bandara Kalimarau yang berada di Kab. Berau.

Grafik 3.20. Perkembangan Nilai Aset dan Pagu BLU di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

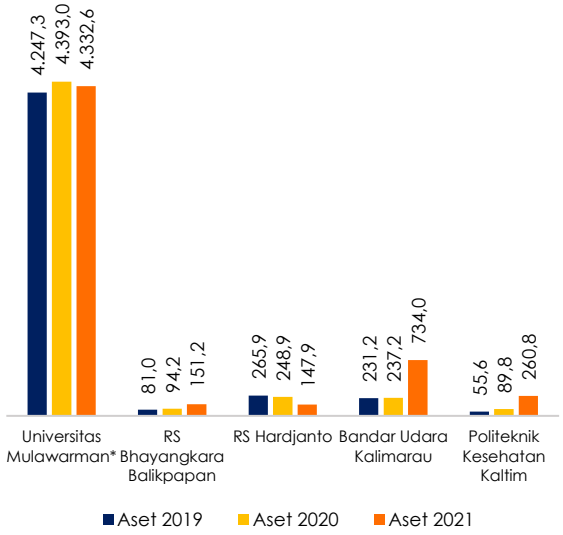

Sumber : Aplikasi OMSPAN dan E-RekonLK, 2022 (diolah).

Perkembangan aset satker BLU dalam tiga tahun terakhir, secara umum mengalami kenaikan. Namun demikian terdapat dua satker BLU yaitu Unmul dan RS Hardjanto yang asetnya turun. Hal tersebut disebabkan kinerja keuangan Unmul yang tidak dapat mencapai target di tahun 2021, sehubungan dengan kebijakan keringanan UKT untuk mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19. Penyebab lain yaitu penyesuaian/ penurunan UKT untuk mahasiswa tingkat akhir.

Disisi lain, perkembangan pagu satker BLU di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama untuk satker BLU pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Secara tidak langsung satker BLU tersebut berperan atas tercapainya IPM Kaltim tahun 2021 yang berstatus tinggi. Walaupun demikian pengembangan dalam pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan untuk memberikan keadilan dan kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.8. Perkembangan Pagu BLU Pusat Tahun 2019-2021 (miliar Rp)

BLU	Jenis Pagu	Jumlah Pagu		
		2019	2020	2021
Universitas Mulawarman*	Pagu PNBP	261,3	234,2	273,1
	Pagu RM	197,9	238,4	208,7
RS Bhayangkara Balikpapan	Pagu PNBP	28,0	28,7	69,5
	Pagu RM	4,3	4,7	5,1
RS Hardjanto	Pagu PNBP	70,0	61,9	64,2
	Pagu RM	21,1	20,8	20,7
Bandar Udara Kalimarau	Pagu PNBP	20,9	16,3	12,5
	Pagu RM	34,2	41,5	47,4
Politeknik Kesehatan Kaltim	Pagu PNBP	9,9	9,1	12,2
	Pagu RM	36,7	30,6	57,7

Sumber : Aplikasi OMSPAN, 2022 (diolah).

Salah satu tujuan diberikannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the gorvernment*). Oleh karena itu, satker BLU didorong untuk menciptakan kemandirian terhadap dirinya sendiri. Kemandirian satker BLU dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu Rp murni (RM). Satker BLU dapat dikatakan telah mandiri apabila porsi pagu PNBP mencapai 65 persen dari total pagu.

Terdapat dua satker BLU yang telah memenuhi ambang batas kemandirian tersebut yaitu RS Bhayangkara dan RS Hardjanto di Balikpapan. Pada RS Bhayangkara bahkan telah melebihi 90 persen tingkat kemandiriannya, sedangkan RS Hardjanto meski statusnya BLU termuda namun telah menyandang predikat mandiri.

Kemandirian satker BLU tak terlepas dari peningkatan kinerja BLU itu sendiri dan juga

peran Kanwil DJPb Kaltim yang selalu berupaya memberikan asistensi, pembinaan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BLU tersebut.

Grafik 3.21. Perkembangan Kemandirian BLU Pusat di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

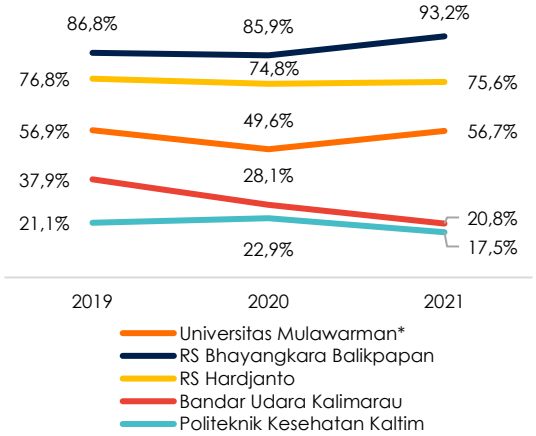

Sumber : Aplikasi OMSPAN dan E-RekonLK, 2022 (diolah).

Selain satker BLU, di Kaltim juga terdapat satker PNBP yang potensial untuk di-*upgrade* menjadi satker BLU. Tingkat kemandirian satker-satker PNBP ini bahkan melebihi beberapa satker yang telah menjadi BLU di Kaltim.

Grafik 3.22. Perkembangan Kemandirian Satker PNBP Potensial di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

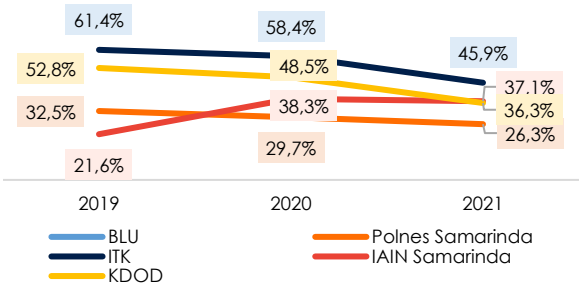

Sumber : Aplikasi OMSPAN dan E-RekonLK, 2022 (diolah).

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) memiliki tingkat kemandirian mencapai 45,9 persen di tahun 2021, walaupun rasio kemandirian tersebut menurun dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, terdapat satker Politeknik Negeri Samarinda, IAIN Samarinda dan Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (KDOD) yang memiliki potensi untuk menjadi satker BLU. Perubahan satker menjadi BLU sangat penting untuk meningkatkan standar pelayanan kepada *stakeholder*/ masyarakat dan juga meringankan beban keuangan negara.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

Selain pengelolaan Badan Layanan Umum, *special mission* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang lain adalah menatausahakan investasi pemerintah khususnya kredit program dan penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*/ SLA).

3.1.6.1 Penerusan Pinjaman

Sesuai data pada aplikasi SLIM (*Subsidiary* Loan *Information Management*) sampai dengan posisi 31 Desember 2021, tidak ada daftar penerusan pinjaman di lingkungan pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

3.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Grafik 3.23. Perkembangan KUR di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

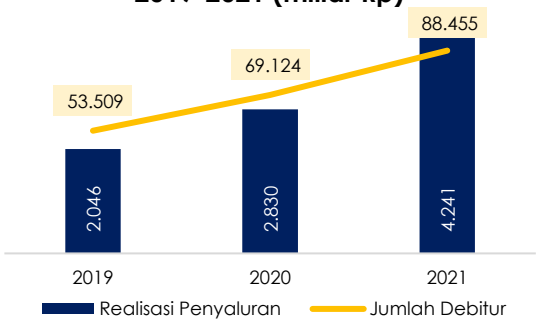

Sumber : Aplikasi SIKP KUR, 2022 (diolah).

Sesuai dengan data Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2021 di

Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp4.241 dan disalurkan kepada 88.455 debitur. Tiga daerah dengan jumlah penyaluran KUR terbesar yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikapapan yang mendominasi capaian penyaluran KUR sebesar 55,88 persen.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, meminta lembaga perbankan terus menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk meringankan beban finansial UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Peran UMKM sangat penting sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja pada masa pandemi.

Grafik 3.24. Perkembangan Skema KUR di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

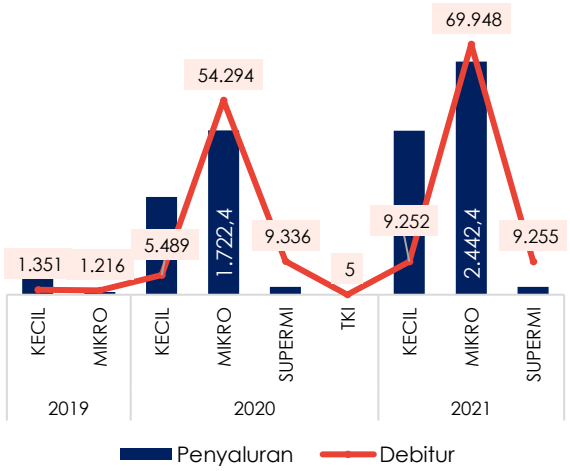

Sumber : Aplikasi SIKP KUR, 2022 (diolah).

Penyaluran KUR di Kaltim tahun 2021 terbagi dalam tiga skema yaitu KUR super mikro, KUR mikro dan KUR kecil. Terdapat peningkatan penyaluran KUR untuk skema mikro dan kecil, sedangkan super mikro turun tipis dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan membaiknya perekonomian dan meningkatnya keyakinan akan kondisi ekonomi kedepan, para pelaku UMKM mulai berani menarik pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah juga tetap melanjutkan kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon untuk meringankan beban para debitur.

Tabel 3.9. Perkembangan KUR per Kab./ Kota di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Kab./ Kota	2021	2020	2019
Samarinda	901,3	623,4	409,4
Kutai Kartanegara	878,3	569,4	414,0
Kota Balikpapan	590,4	450,0	360,1
Paser	479,1	326,8	244,8
Kutai Timur	405,2	213,7	134,9
Berau	323,6	230,0	179,0
Penajam Paser Utara	268,1	162,0	127,0
Bontang	200,0	128,8	99,8
Kutai Barat	185,3	123,6	73,3
Mahakam Hulu	9,2	1,6	3,0
Kalimantan Timur	0,1	0,4	0,3

Sumber : Aplikasi SIKP KUR, 2022 (diolah).

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar debitur berasal dari sektor perdagangan, namun demikian Pemerintah terus mendorong sektor produksi/ non-perdagangan yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian untuk mengakses pembiayaan KUR.

Grafik 3.25. Perkembangan KUR pada 5 Lapangan Usaha Terbesar di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

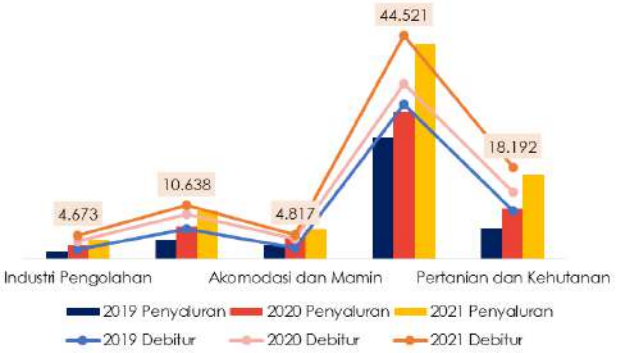

Sumber : Aplikasi SIKP KUR, 2022 (diolah).

3.1.6.3 Kredit Ultra Mikro (UMi)

Total penyaluran pembiayaan UMi lingkup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar Rp32 miliar dengan total debitur sebanyak 8.244. Capaian ini mengalami penurunan secara nilai sebesar 44,82 persen, sedangkan dari jumlah debitur turun 41,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Grafik 3.26. Perkembangan UMi di Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

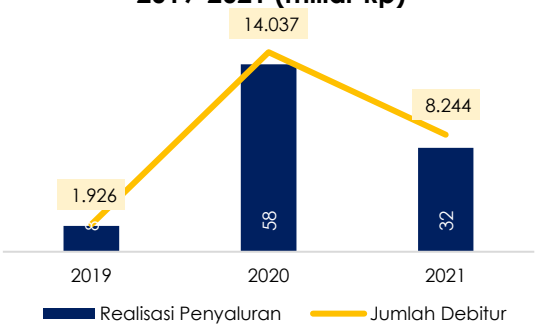

Sumber : Aplikasi SIKP UMi, 2022 (diolah).

Realisasi penyaluran UMi masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara itu dengan membaiknya perekonomian para debitur terutama di perkotaan lebih memilih instrumen KUR yang memiliki plafon pinjaman lebih besar dari UMi. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan debitur UMi di Kaltim selama 2021. Disisi lain, perluasan kantor cabang penyalur/ lembaga *linkage* di wilayah kabupaten/ pedesaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk memberikan kemerataan akses pembiayaan kepada seluruh masyarakat. Perkembangan penyaluran UMi di Kaltim per daerah dapat terlihat pada tabel 3.21. Tidak terdapat penyaluran UMi di Kab. Mahakam Ulu, padahal banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Hal ini menjadi bukti belum meratanya akses pembiayaan di Kaltim.

Tabel 3.10. Perkembangan UMi per Kab./ Kota di Kaltim 2019-2021 (juta Rp)

Kab./ Kota	2021	2020	2019
Kutai Barat	594,9	693,0	9,5
Paser	655,6	3.326,7	721,7
Kutai Timur	707,2	1.971,5	223,0
Bontang	906,8	4.193,3	343,5
Penajam Paser Utara	1.892,1	2.091,1	295,0
Kutai Kartanegara	3.275,0	7.878,3	560,0
Berau	3.923,1	2.285,8	203,0
Samarinda	6.754,3	11.161,4	2.091,6
Balikpapan	13.311,4	24.108,5	3.523,8

Sumber : Aplikasi SIKP UMi, 2022 (diolah).

Dilihat dari penyalurnya, PT. Pegadaian dan PNM masih mendominasi. Namun demikian, debitur PT. Pegadaian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020.

Grafik 3.27. Perkembangan UMi per Peyalur di Kaltim 2019-2021

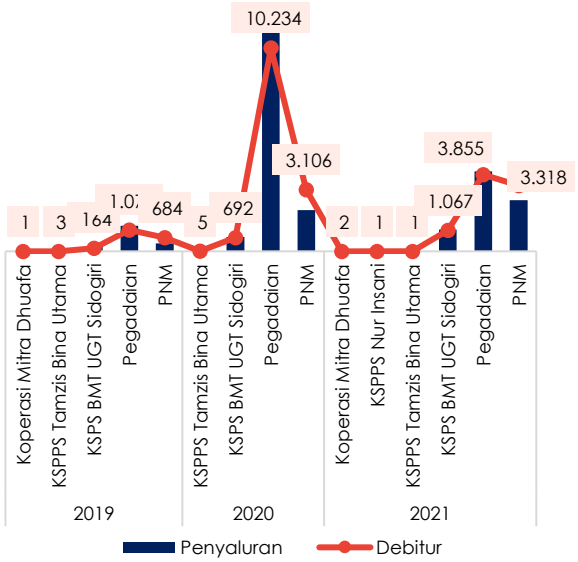

Sumber : Aplikasi SIKP UMi, 2022 (diolah).

Kanwil DJPb Kaltim ikut aktif dalam pengembangan UMi dengan menggandeng PNM untuk melaksanakan program UMKM binaan. Dalam program tersebut diselenggarakan pembinaan UMKM mulai dari produksi, pemasaran dan pembukuan maupun dari sisi perpajakan. Program KUR dan UMi merupakan komitmen

Pemerintah dalam membantu UMKM untuk terus berkembang dan menjadi "sokoguru" perekonomian Indonesia.

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Pelaksanaan APBN tahun 2021 tak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun tantangan. Beberapa isu strategis pelaksanaan APBN di Kaltim sebagai berikut:

1. Refocusing kegiatan, realokasi dan penghematan anggaran.
2. Kendala dalam proses lelang, kegagalan maupun keterlambatan dalam proses pengadaan barang/ jasa.
3. Termin kontrak tidak dicairkan sesuai jadwal.
4. Kewajiban pengisian BAST bantuan pemerintah online.
5. Eksekusi belanja PEN untuk kegiatan padat karya tunai tidak optimal.
6. Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai jadwal.
7. Rendahnya realisasi belanja pada satker PNBP.
8. Perubahan pola pelaksanaan kegiatan menjadi daring.
9. SDM yang menangani APBN masih kurang memahami proses pelaksanaan APBN.
10. Proses revisi anggaran yang memakan waktu cukup lama jika revisi tersebut merupakan wewenang pusat/ DJA.
11. Keterlambatan pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU.

Selain itu, untuk tetap melanjutkan pertumbuhan ekonomi regional, APBN tahun 2022 memiliki enam fokus kebijakan yaitu:

1. Melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. Memperkuat agenda peningkatan SDM unggul, berintegritas dan berdaya saing.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting* untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat-daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Berbagai kebijakan tersebut untuk mendukung/ memperkuat salah satu isu strategis pemerintah pusat di Kaltim yaitu pemindahan IKN ke wilayah Kaltim. Dengan konsep *green and new smart city* serta untuk menjembatani pembangunan nasional yang lebih merata, pemindahan IKN selayaknya disikapi dengan serius. IKN akan dijadikan *showcase* transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja basis ekonomi, teknologi dan lain-lain. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia. Pemindahan IKN harus diikuti pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.

3.2 PELAKSANAAN APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)

Tabel 3.11. *I-Account* APBD Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Uraian	2019			2020			2021			Growth yoy
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	(realisasi)
PENDAPATAN DAERAH	**38.189,2**	**39.861,1**	**104,38%**	**32.337,2**	**33.822,9**	**104,59%**	**32.620,6**	**32.414,2**	**99,37%**	**-4,16%**
Pendapatan Asli Daerah	8.391,9	9.501,9	113,23%	6.487,4	7.668,7	118,21%	8.005,8	9.199,1	114,91%	**19,96%**
Pendapatan Transfer	28.772,4	29.465,6	102,41%	24.340,1	25.199,2	103,53%	24.087,1	22.868,5	94,94%	**-9,25%**
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.024,9	893,6	87,19%	1.509,6	955,0	63,26%	527,7	346,6	65,68%	**-63,71%**
BELANJA DAERAH	**42.826,3**	**37.297,9**	**87,09%**	**39.601,6**	**33.221,9**	**83,89%**	**40.216,8**	**33.610,7**	**83,57%**	**1,17%**
Belanja Operasi	24.037,1	20.777,2	86,44%	23.242,1	19.621,0	84,42%	24.046,7	20.237,7	84,16%	**3,14%**
Belanja Pegawai	10.580,3	9.270,4	87,62%	10.848,6	9.557,5	88,10%	10.283,3	9.157,4	89,05%	**-4,19%**
Belanja Barang dan Jasa	11.867,7	10.101,7	85,12%	10.851,8	8.860,6	81,65%	12.736,4	10.302,3	80,89%	**16,27%**
Belanja Bunga	26,1	25,9	99,35%	10,8	10,8	99,46%	21,7	16,6	76,80%	**54,27%**
Belanja Subsidi	6,6	4,0	60,01%	0,3	0,0	0,00%	13,0	12,0	92,31%	**100,00%**
Belanja Hibah	1.449,8	1.287,5	88,80%	1.358,4	1.100,2	80,99%	952,1	722,1	75,84%	**-34,37%**
Belanja Bantuan Sosial	106,7	87,8	82,23%	172,2	92,0	53,41%	40,2	27,3	67,98%	**-70,27%**
Belanja Modal	11.250,8	9.319,7	82,84%	8.867,8	7.356,6	82,96%	9.095,5	7.337,9	80,68%	**-0,25%**
Belanja Modal	11.250,8	9.319,7	82,84%	8.867,8	7.356,6	82,96%	9.095,5	7.337,9	80,68%	**-0,25%**
Belanja Tidak Terduga	106,4	15,4	14,49%	1.729,3	1.056,3	61,08%	946,5	570,0	60,22%	**-46,04%**
Belanja Tidak Terduga	106,4	15,4	14,49%	1.729,3	1.056,3	61,08%	946,5	570,0	60,22%	**-46,04%**
Belanja Transfer	7.432,0	7.185,5	96,68%	5.762,4	5.188,1	90,03%	6.128,1	5.465,1	89,18%	**5,34%**
Belanja Bagi Hasil	3.101,4	2.904,4	**93,65%**	1.925,1	1.876,2	**97,46%**	2.525,6	2.466,3	**97,65%**	**31,46%**
Belanja Bantuan Keuangan	4.330,6	4.281,2	**98,86%**	3.837,3	3.311,9	**86,31%**	3.602,5	2.998,8	**83,24%**	**-9,45%**
SURPLUS/ (DEFISIT)	**-4.637,0**	**2.563,2**	**-55,28%**	**-7.264,4**	**601,0**	**-8,27%**	**-7.596,2**	**-1.196,5**	**15,75%**	**-299,09%**
PEMBIAYAAN	**4.637,0**	**4.762,0**	**102,69%**	**7.264,4**	**6.993,8**	**96,28%**	**7.583,8**	**6.916,4**	**91,20%**	**-1,11%**
Penerimaan Pembiayaan	4.887,6	4.885,2	99,95%	7.544,4	7.189,4	95,29%	7.778,3	7.041,2	90,52%	**-2,06%**
Pengeluaran Pembiayaan	250,6	123,2	49,17%	280,0	195,6	69,84%	194,5	124,8	64,15%	**-36,20%**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,0**	**7.325,2**	**-**	**0,0**	**7.594,8**	**-**	**-12,5**	**5.719,9**	**-45868,44%**	**-24,69%**

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

APBD merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah yang menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, APBD juga menjadi penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Realisasi pendapatan daerah Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 tercatat Rp32,41 triliun atau sebesar 99,37 persen dari target dalam APBD Kaltim 2021. Apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu maka realisasi pendapatan daerah tersebut mengalami kontraksi 4,16 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2021 mencapai Rp33,61 triliun dari pagu sebesar Rp40,21 triliun. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 1,17 persen dibandingkan tahun 2020.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah regional Kaltim tahun 2021 mengalami kontraksi. Apabila dilihat dari struktur realisasi pendapatan, sebagian besar pendapatan daerah Kalimantan Timur tahun 2021 masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mencapai 70,55 persen, walaupun nominal pendapatan transfer tersebut turun 9,25 persen dibandingkan tahun lalu.

Grafik 3.28. Perkembangan Pendapatan APBD se-Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

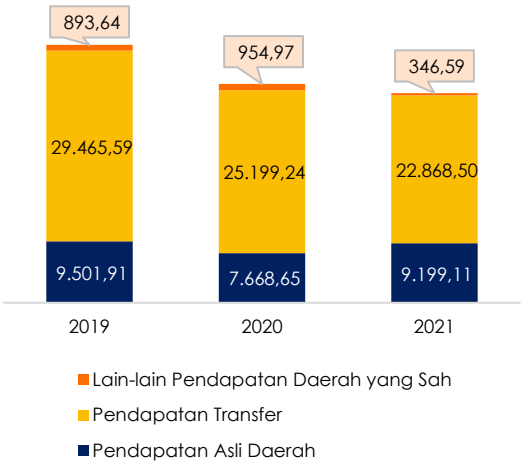

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Namun demikian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,96 persen, dari Rp7,66 triliun di tahun 2020 menjadi Rp9,19 triliun di tahun 2021. Penurunan terbesar ada pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terkontraksi 77,04 persen. Penurunan pendapatan tersebut sebagian besar masih berasal dari dampak pandemi yang belum usai. Namun demikian, sepanjang tahun 2021 ini kinerja ekspor terutama batubara yang melonjak sangat signifikan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Selain itu, insentif PPnBM yang dikeluarkan pemerintah untuk kendaraan dengan spesifikasi tertentu memberikan dampak positif terhadap PAD.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Grafik 3.29. Perkembangan dan Komposisi PAD 2019-2021 (miliar Rp)

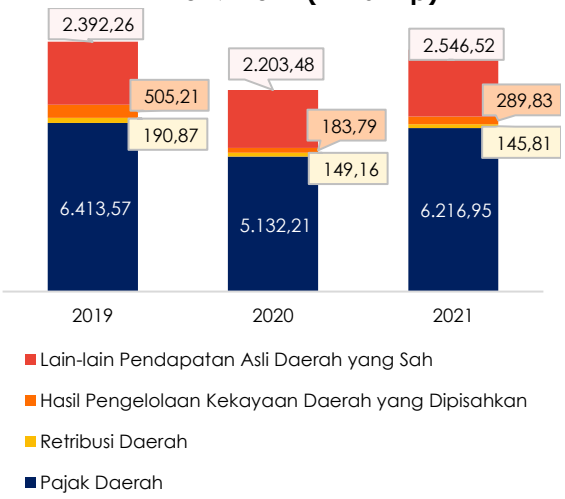

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Dari sisi PAD, hampir semua komponen pendapatan mengalami pertumbuhan positif. Perbaikan dan pemulihan ekonomi regional Kaltim telah berjalan *on track* sehingga memacu pendapatan daerah.

Perkembangan PAD di tahun 2020 yang terkontraksi 19,29 persen akibat pandemi, telah berhasil dibalikkan keadaanya di tahun 2021. Pertumbuhan PAD tahun 2021 tercatat positif di angka 19,96 persen. Hal ini menandakan perekonomian Kaltim telah kembali normal, walaupun pertumbuhan tersebut juga didasari oleh *low based effect* pendapatan tahun lalu. Penurunan kasus positif Covid-19 serta peningkatan aktivitas masyarakat ikut berperan dalam peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan okupansi hotel dan menggeliatnya sektor pariwisata mendukung tumbuhnya retribusi daerah.

Grafik 3.30. Pertumbuhan PAD 2019-2021

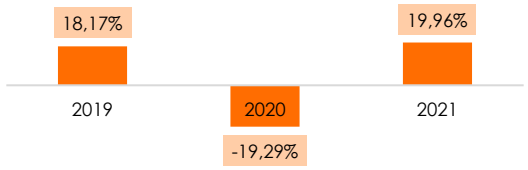

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila disandingkan dengan PDRB, maka kontribusi PAD sangat kecil dibawah 2 persen, walaupun sedikit naik apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemangku kebijakan pendapatan daerah untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah demi menunjang pembangunan daerah.

Grafik 3.31. Kontribusi PAD terhadap PDRB 2019-2021

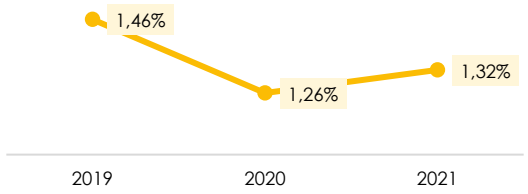

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim dan BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah memberikan wewenang pemerintah daerah untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah sehingga meningkatkan kapasitas fiskal yang akan berdampak pada tingkat kemandirian fiskal daerah.

Secara spasial per Pemda, rasio PAD terhadap pendapatan APBD dalam tiga tahun terakhir tampak pada grafik di atas. Rasio PAD tersebut relatif masih sama dari tahun ke tahun, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan rasio dan beberapa lainnya mengalami penurunan. Dilihat dari persentase, hanya Prov. Kaltim yang mampu mencapai kemandirian fiskal lebih dari lima puluh persen atau tepatnya 56,21 persen. Sedangkan daerah yang lain masih dibawah 50 persen yang artinya masih sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat.

Grafik 3.32. Komposisi PAD terhadap Pendapatan APBD per Kab./ Kota 2019-2021

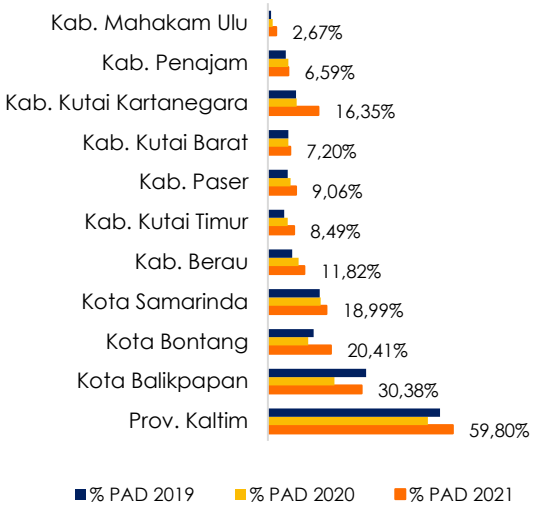

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Pengesahan UU HKPD menjadi angin segar bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemda antara lain:

1. Penyusunan potensi dan *profiling* pendapatan daerah;
2. Pemberdayaan potensi lokal dan peningkatan daya beli masyarakat;
3. Evaluasi proses bisnis pajak daerah dengan menggandeng institusi terkait seperti Ditjen Pajak dan BPKP.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir juga mengalami tren negatif. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah masih mengalami fluktuasi yang relatif stabil.

Turunnya pendapatan transfer tersebut disebabkan alokasi/ pagu transfer ke daerah yang ada dalam APBN mengalami penurunan. Terutama dalam dua tahun terakhir karena dampak pandemi sehingga pemerintah melakukan kebijakan pengetatan anggaran serta refocusing anggaran.

Grafik 3.33. Perkembangan Pendapatan Transfer 2019-2021 (miliar Rp)

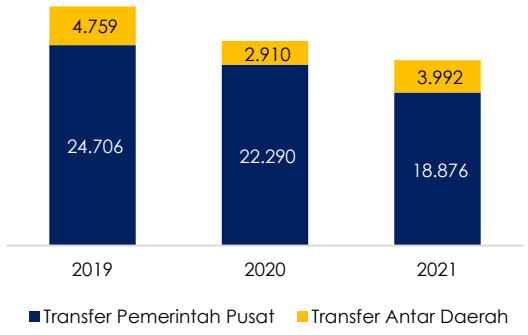

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Kontribusi pendapatan transfer bagi pemda sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan hampir semua Pemda se-Kaltim masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat untuk menjalankan operasional daerahnya. Hampir semua kebutuhan belanja operasional daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja opersional perkantoran, dan lainnya berasal dari pendapatan transfer tersebut. Namun demikian, pada hakikatnya pendapatan transfer berupa DBH merupakan hak daerah karena pengelolaan sumber daya alam. Konsep desentralisasi fiskal seharusnya bisa menunjukkan potensi riil pendapatan daerah, sehingga tidak rancu dengan konsep transfer ke daerah.

Grafik 3.34. Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan APBD 2021

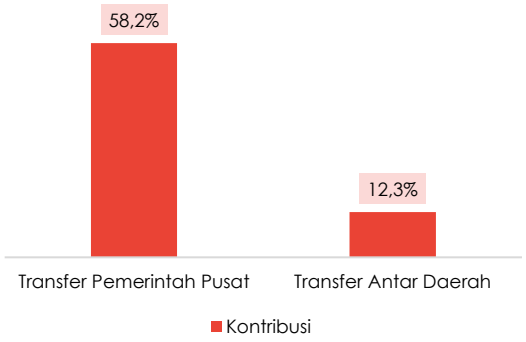

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Secara rata-rata, kontribusi transfer pemerintah pusat mencapai 58,2 persen dari total pendapatan dalam APBD sedangkan transfer antar daerah berperan dengan kontribusi 12,3 persen.

Grafik 3.35. Pertumbuhan Pendapatan Transfer 2019-2021 (miliar Rp)

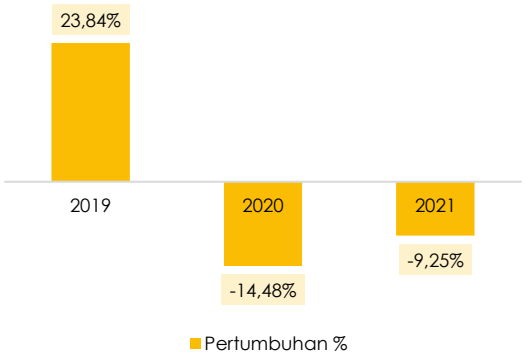

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Menurunnya pendapatan transfer yang terjadi dalam dua tahun terakhir menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah daerah yang harus bisa mengoptimalkan pendapatan yang ada untuk diselaraskan dengan belanja daerah. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi adalah terlambatnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang menyebabkan penundaan pembayaran tunjangan pegawai di salah satu kabupaten di Kaltim. Kedepan seharunya dibangun sebuah sistem yang secara *real time* bisa membagi habis penerimaan negara sesuai porsi pemerintah pusat maupun daerah.

3.2.1.3 Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grafik 3.36. Perkembangan LLPDyS 2019-2021 (miliar Rp)

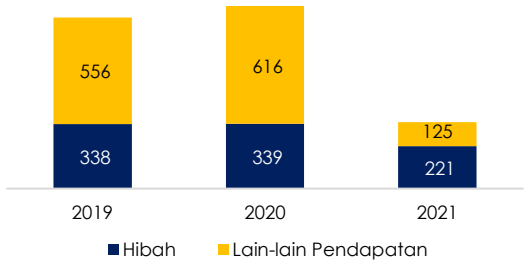

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Senada dengan pendapatan transfer, LLPDyS juga mengalami kontraksi di tahun 2021. Komponen hibah menurun sejumlah Rp80 miliar dan bahkan untuk komponen lain-lain pendapatan hanya terealisasi Rp61 juta, sangat jauh dibandingkan tahun lalu yang terealisasi Rp616 miliar. Apabila disandingkan dengan pagu/ target LLPDyS, di tahun 2021 memang mengalami penurunan signifikan dari pagu/ target tersebut sehingga realisasinyapun turun 77,04 persen (*yoy*).

Grafik 3.37. Pertumbuhan LLPDyS 2019-2021 (miliar Rp)

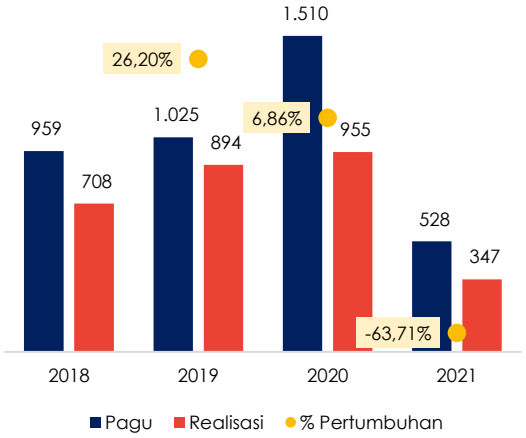

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

3.2.2 Belanja Daerah

Pagu dan realisasi belanja Pemda se-Kaltim tumbuh positif di tahun 2021. Pagu dan realisasi belanja daerah dalam APBD di wilayah Kaltim yang turun di tahun lalu, membaik di tahun 2021. Dampak pandemi Covid-19 memang masih dirasakan disepanjang tahun 2021 akan tetapi Pemerintah daerah se-Kaltim bergerak lebih ekspansif untuk menjaga perekonomian regional tetap berjalan positif. Walaupun tetap berhati-hati dan menjaga likuiditas daerah dalam rangka mengantisipasi kelanjutan pandemi yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Peningkatan PAD dan optimalisasi SiLPA tahun lalu menjadi dorongan positif

pelaksanaan anggaran daerah. Alokasi pagu mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen (*yoy*), begitu juga dengan realisasi yang tumbuh positif sebesar 1,17 persen (*yoy*). Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjadikan tahun 2021 sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi setelah terkontraksi di tahun 2020.

Grafik 3.38. Pagu dan Realisasi Belanja APBD 2019-2021 (miliar Rp)

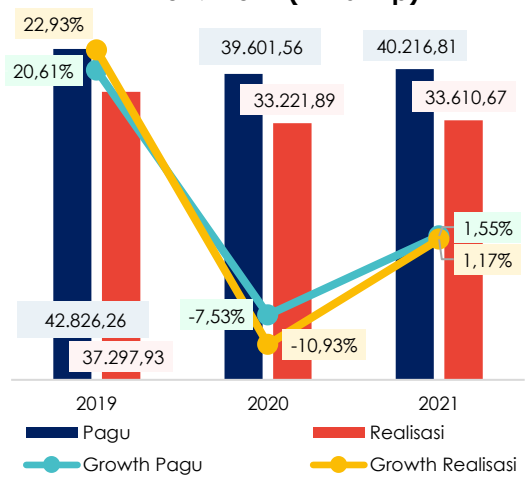

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Belanja operasi masih dominasi realisasi belanja daerah tahun 2021. Struktur belanja daerah terbagi menjadi empat yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi belanja operasi masih mendominasi struktur realisasi belanja daerah di Kaltim dengan 60,21 persen, selanjutnya belanja modal dengan kontribusi 21,83 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar alokasi dana APBD masih untuk kebutuhan opersional, sedangkan untuk belanja pembangunan yang tercermin dalam belanja modal masih relatif kecil. Belanja operasi juga mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen, sebaliknya belanja modal turun 0,25 persen dibandingkan tahun lalu.

Grafik 3.39. Komposisi Realisasi Belanja APBD 2019-2021 (miliar Rp)

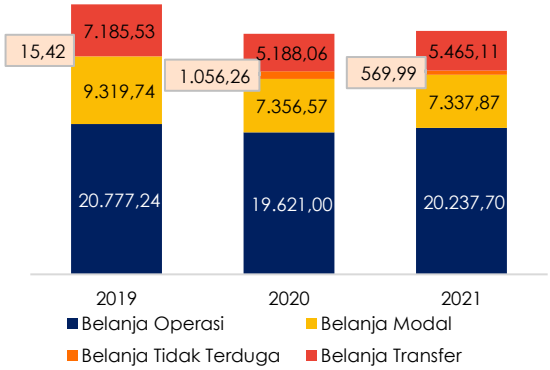

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Secara agregat, realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp33,61 triliun tumbuh positif dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp33,22 triliun. Walaupun pagu di tahun 2021 juga mengalami penuruan, akan tetapi akselerasi pemulihan ekonomi nasional maupun regional seharusnya dapat memacu realisasi belanja daerah. Realisasi belanja daerah di tahun 2021 ini hanya mencapai 83,57 persen, jauh dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai 96,58 persen. Walaupun demikian, Kanwil DJPb Provinsi Kaltim selalu berusaha mendorong dan mengakselerasi belanja pemerintah daerah. Kegitan FGD Akselerasi Belanja APBD selalu dilakukan setiap bulannya dengan mengundang BPKAD dan OPD terkait. Kedepan akselerasi realisasi belanja APBD harus menjadi perhatian lebih terutama bagi pemangku kepentingan di daerah dan pimpinan daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota.

Grafik 3.40. Komposisi Realisasi Belanja per Pemda 2021

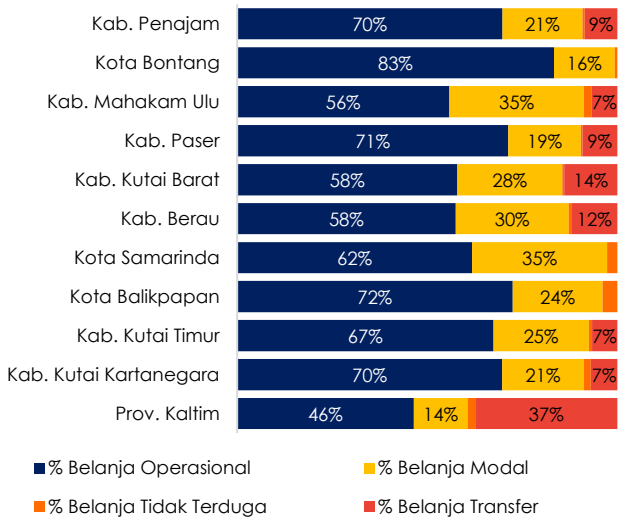

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila di-*breakdown* lagi per Pemda, tampak bahwa Kota Bontang memiliki komposisi belanja operasi paling tinggi mencapai 83 persen dari total belanja, sedangkan Prov. Kaltim dengan 46 persen menjadi Pemda yang paling rendah komposisi belanja operasinya. Selain itu, belanja modal yang masih relatif kecil hampir di semua Pemda harus digenjot di tahun-tahun berikutnya. Apalagi dengan pemindahan IKN baru ke wilayah Kaltim membuat Kab./ Kota di Kaltim menjadi daerah penyangga IKN. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur harus diakselerasi atau diperbesar porsinya dibanding belanja yang lain.

3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pada tahun 2021 belanja operasi kembali mengalami kenaikan baik pagu maupun realisasinya.

Grafik 3.41. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi 2019-2021 (miliar Rp)

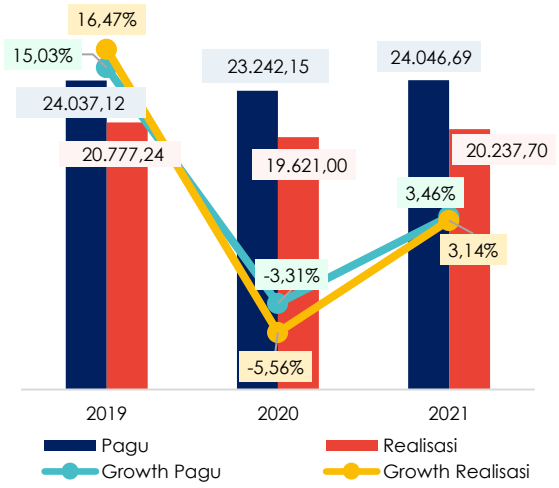

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Realisasi belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai 45,25 persen dan belanja barang dan jasa 50,91 persen dari total belanja operasi. Tantangan kedepan adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Grafik 3.42. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Operasi 2019-2021 (miliar Rp)

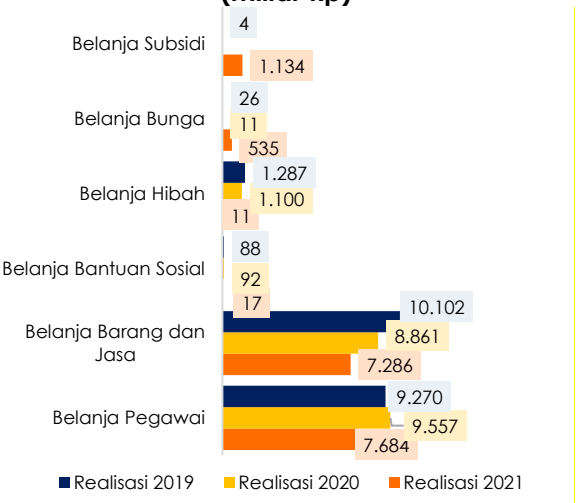

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Grafik 3.43. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Modal 2019-2021 (miliar Rp)

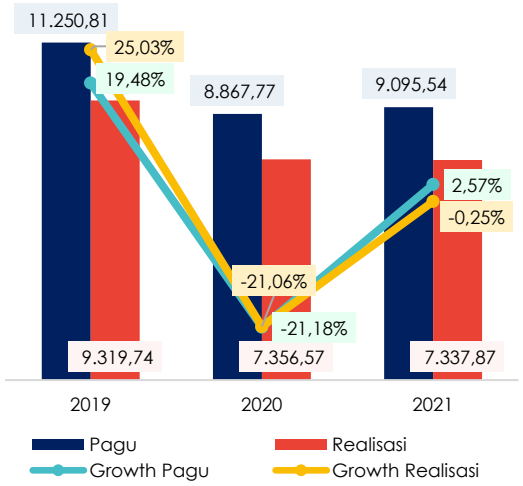

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Disisi lain, belanja modal yang merupakan cerminan komitmen pembangunan daerah mengalami kenaikan pagu alokasi sebesar 2,57 persen, namun demikian realisasi belanja modal tersebut malah turun 0,25 persen. Pemda sudah benar dengan meningkatkan alokasi belanja modal, tapi dengan penurunan realisasi seakan-akan kenaikan pagu tersebut menjadi tidak berarti. Permasalahan lain yang terjadi, realisasi belanja modal ini sebagian besar terjadi pada triwulan IV bahkan sampai akhir-akhir bulan Desember. Masalah-masalah klasik yang kerap muncul seperti keterlambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan, proses lelang, kesulitan bahan bangunan, dan lainnya hendaknya dapat dimitigasi sejak awal tahun. Pimpinan dan pejabat daerah hendaknya lebih *aware* terhadap masalah-masalah tersebut karena sebenarnya semua sudah ada solusinya tinggal bagaimana *action* di lapangan.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Grafik 3.44. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga 2019-2021 (miliar Rp)

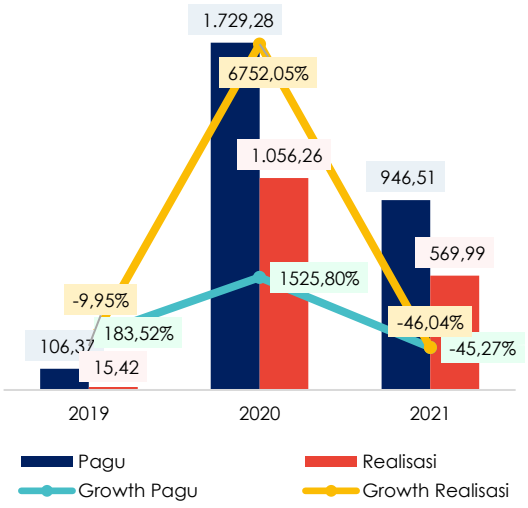

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Belanja tak terduga mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 disebabkan realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 berada pada pos tersebut. Di tahun 2020, dimana Covid-19 pertama kali muncul, belanja tak terduga mengalami kenaikan signifikan mencapai 6.752 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2021 alokasi belanja tak terduga turun 45,27 persen menjadi Rp946,51 miliar. Pengalaman penanganan pandemi di tahun 2020

menjadi dasar perencanaan di tahun 2021 yang lebih terarah dan terukur sehingga lebih tepat sasaran. Realisasi belanja tak terduga tersebut hanya sebesar 60,22 persen disebabkan penurunan kasus Covid-19 di wilayah Kaltim bahkan di akhir tahun beberapa kabupaten/ kota berstatus zona hijau.

3.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Grafik 3.45. Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Transfer 2019-2021 (miliar Rp)

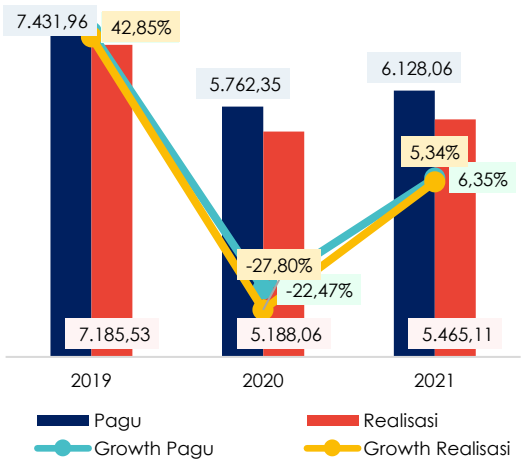

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Belanja transfer mengalami peningkatan di tahun 2021. Pagu belanja transfer naik 6,35 persen, begitu juga dengan realisasinya tumbuh 5,34 persen. Realisasi belanja transfer tersebut terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp2,46 triliun dan belanja bantuan keuangan Rp2,99 triliun. Kenaikan belanja transfer tersebut disebabkan naiknya belanja bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/ kota. Peningkatan ekspor batubara selama tahun 2021 memberikan keuntungan bagi daerah penghasil dengan naiknya pendapatan dari transfer. Sedangkan komponen belanja bantuan keuangan sedikit mengalami penurunan. Dengan terkendalinya kasus Covid-19 di semua Kab. /Kota di wilayah Kaltim, maka proposal bantuan keuangan yang masuk ke Pemprov menurun dibandingkan dengan tahun 2020.

3.2.2.5 Belanja per Fungsi

Grafik 3.46. Perkembangan Realisasi Belanja per Fungsi 2019-2021 (miliar Rp)

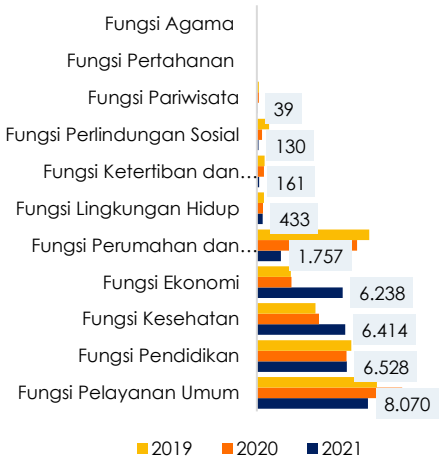

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Realisasi belanja fungsi pelayanan umum menjadi yang terbesar diantara fungsi-fungsi yang lain, sedangkan fungsi agama dan pertahanan tidak ada realisasi karena fungsi tersebut merupakan tugas pemerintah pusat. Namun demikian, kenaikan cukup signifikan terjadi pada fungsi ekonomi yang tumbuh 148,63 persen, sedangkan penurunan terbesar terdapat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum yang turun 75,87 persen dibandingkan tahun lalu. Selain itu, fungsi kesehatan juga meningkat 41,83 persen (*yoy*). Naiknya fungsi ekonomi dan kesehatan merupakan

strategi pemerintah untuk menanggulangi pandemi dengan tetap menjaga perekonomian tetap di level positif.

Grafik 3.47. Pertumbuhan Belanja per Fungsi 2021

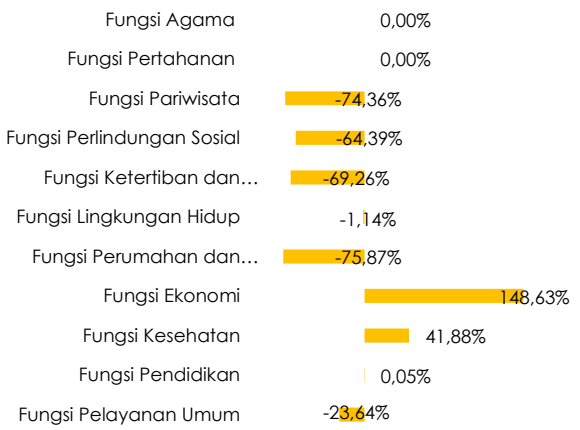

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Hal tersebut sejalan dengan progam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terutama tahun 2021 merupakan fase awal dari pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, peran pemerintah mulai berubah dari memberi bantuan sosial yang masif ke upaya menggerakkan sendi-sendi perekonomian sehingga masyarakat menjadi semakin mandiri meskipun di tengah pandemi. Sedangkan untuk fungsi pelayanan umum, turunnya realisasi tidak berdampak pada kualitas dan kuantitas layanan. Akan tetapi karena perubahan *standar operating procedure* layanan yang sebagian besar memanfaatkan teknologi informasi atau secara daring sehingga lebih menghemat anggaran.

3.2.3 Surplus/ Defisit APBD

Surplus / Defisit APBD merupakan selisih lebih/ kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya disebut defisit.

Grafik 3.48. Perkembangan Surplus/ Defisit Kaltim 2019-2021

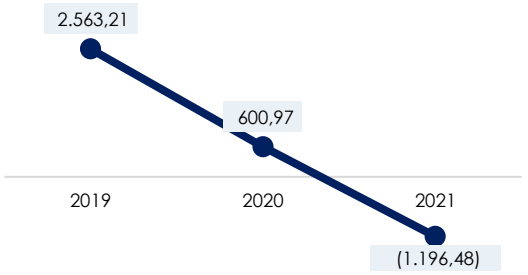

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Pertama dalam tiga tahun belakangan APBD Kaltim mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp1,19 triliun. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemda se-Kaltim untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi. Walaupun pendapatan daerah turun, namun belanja daerah tetap didorong tumbuh positif.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel 3.12. Penyertaan Modal Daerah se-Kaltim 2021

Kab/ Kota	Penyertaan Modal Daerah
Prov . Kaltim	3.650.000.000
Kota Balikpapan	-
Kota Bontang	-
Kota Samarinda	-
Kab. Berau	1.260.000.000
Kab. Kutai Timur	5.000.000.000
Kab. Paser	11.490.000.000
Kab. Kutai Barat	10.175.000.000
Kab. Kutai Kartanegara	24.400.000.000
Kab. Penajam	19.600.000.000
Kab. Mahakam Ulu	2.850.000.000

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

Sebagian besar Pemda melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD atau perusahaan daerah untuk mendukung likuiditas serta sebagai wujud nyata pemulihan ekonomi. Hal ini sangat bagus untuk memajukan perusahaan-perusahaan daerah terutama yang mengalami kesulitan modal padahal prospek dari perusahaan tersebut bagus dan berdampak positif pada masyarakat. Penyertaan modal terbesar terdapat pada Kab. Kukar dengan jumlah Rp24,5 miliar. Kab. Kukar melakukan penyertaan modal ke Bank Kaltimtara sebesar Rp19 miliar sebagai upaya membantu pelaku UMKM terdampak pandemi dengan skema kredit bunga rendah dan sebagai program gerakan melawan rentenir. Sementara sisanya sebesar Rp5,4 miliar ditujukan ke Perumda Tirta Mahakam. Penyertaan modal ke Perumda Tirta Mahakam merupakan dana talangan dari Pemkab Kukar yang seharusnya berasal dari bantuan pemerintah pusat untuk memenuhi persentase standar nasional sebesar 80 persen layanan ke masyarakat. Sehingga penyertaan modal ke Perumda tersebut nantinya akan diganti pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Senada dengan Kab. Kukar, Pemda-pemda yang lain juga melakukan penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara dengan nilai bervariasi. Hal tersebut sebagai bentuk semangat membangkitkan UMKM yang merupakan motor perekonomian serta upaya mengatasi rentenir atau pinjaman *online* yang sedang marak terjadi.

Penurunan SILPA di Kaltim utamanya disebabkan turunnya realisasi dana transfer dari pusat berupa DBH dan DAU. SILPA di daerah menjadi sorotan karena menciptakan *idle cash* sedangkan pembangunan secara nasional masih dihadapkan dengan masalah anggaran. Optimalisasi SILPA daerah harusnya dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

Grafik 3.49. Analisis Pendapatan DBH dan DAU dibanding SILPA Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

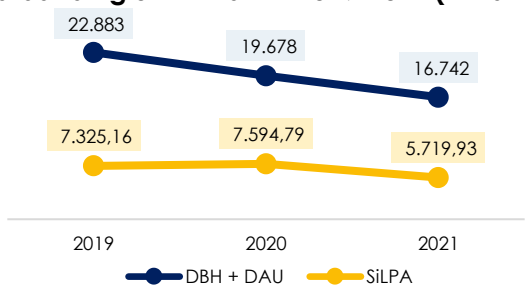

Sumber : LRA *Unaudited* 2021 BPKAD Prov./Kab./Kota se-Kaltim, 2022 (diolah).

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Prov. Kaltim pada tahun 2021 sebanyak 19 satker. Apabila dilihat dari jenis layanan, BLUD terbanyak ada pada bidang Kesehatan sebanyak 18 satker atau 95 persen dari total BLUD. Hanya terdapat satu BLUD dengan jenis layanan lain yaitu BLUD UPT UPDB Koperasi dan UMKM Kab. Kutai Barat, dengan layanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Grafik 3.50. Profil BLUD per Bidang Layanan tahun 2021

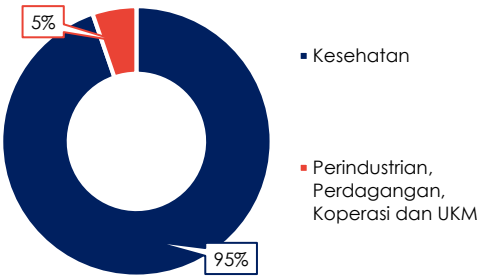

Sumber : BLUD se-Kaltim, 2021 (diolah).

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Tabel 3.13. Peta Kapasitas Fiskal Prov./ Kab./ Kota se-Kaltim 2021

Kab/ Kota	Indeks	Kategori
Prov. Kaltim	0,975	Tinggi
Kab. Kutai Kartanegara	2,738	Sangat Tinggi
Kab. Kutai Timur	2,605	Sangat Tinggi
Kota Balikpapan	2,247	Sangat Tinggi
Kota Samarinda	1,972	Sangat Tinggi
Kab. Berau	1,657	Tinggi
Kab. Kutai Barat	1,650	Tinggi
Kab. Paser	1,021	Sedang
Kab. Mahakam Ulu	0,953	Sedang
Kota Bontang	0,876	Sedang
Kab. Penajam	0,754	Sedang

Sumber : PMK 116/PMK.07/2021, 2022.

Kapasitas fiskal pemerintah daerah di Kaltim sebenarnya relatif bagus dengan sebagian besar pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Namun demikian, tantangan dihadapkan dengan bagaimana caranya memaksimalkan/ mengoptimalkan kapasitas fiskal/ anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Tantangan atau isu strategis dalam pelaksanaan APBD sebagai berikut:

1. Akselerasi pelaksanaan APBD masih terkendala berbagai hal yaitu:
   a. Keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan pada OPD;
   b. Keterlambatan dan gagalnya proses lelang sehingga harus diulang;
   c. Proses pengesahan APBD-P membutuhkan waktu yang lama;
2. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih naik turun menjadikan kegamangan Pemda untuk mengeksekusi/ melakukan kegiatan.
3. Faktor alam seperti cuaca yang tidak bersahabat serta bencana banjir dan longsor menghambat kegiatan/ proyek yang sedang dilaksanakan.

3.3 PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Tabel 3.14. *I-Account* Realisasi Anggaran Konsolidasian Wilayah Prov. Kalimantan Timur 2019-2021 (miliar Rp)

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			% Growth
	Realisasi	% PP	% PD	Realisasi	% PP	% PD	Realisasi	% PP	% PD	
A. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	**29.761,82**	**73%**	**27%**	**24.055,28**	**74%**	**26%**	**30.549,32**	**68%**	**32%**	**27,00%**
Penerimaan Perpajakan	26.476,98	76%	24%	21.198,63	76%	24%	25.288,62	75%	25%	19,29%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.908,72	54%	46%	2.518,08	65%	35%	4.595,60	38%	62%	82,50%
Penerimaan Hibah	337,56	0%	100%	338,57	0%	100%	443,97	0%	100%	31,13%
Transfer	38,56	0%	0%	-	0%	0%	221,13	0%	0%	100,00%
B. BELANJA KONSOLIDASIAN	**40.807,34**	**21%**	**79%**	**38.395,63**	**22%**	**78%**	**41.331,89**	**28%**	**72%**	**7,65%**
Belanja Pemerintah	38.519,13	22%	78%	36.618,85	23%	77%	37.291,80	25%	75%	1,84%
Transfer	2.288,21	0%	100%	1.776,78	0%	100%	4.040,09	64%	36%	127,38%
C. SURPLUS/DEFISIT	**(11.045,52)**	**-120%**	**220%**	**(14.340,35)**	**-64%**	**164%**	**(10.782,57)**	**-84%**	**184%**	**-24,81%**
D. PEMBIAYAAN	**4.761,95**	**0%**	**100%**	**6.993,82**	**0%**	**100%**	**6.924,45**	**0%**	**100%**	**-0,99%**
Penerimaan Pembiayaan	4.885,17	0%	100%	7.189,38	0%	100%	7.040,11	0%	100%	-2,08%
Pengeluaran Pembiayaan	123,22	0%	100%	195,56	0%	100%	115,66	0%	100%	-40,86%
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(6.283,57)**	**-211%**	**311%**	**(7.346,53)**	**-124%**	**224%**	**(3.858,12)**	**-236%**	**336%**	**-47,48%**

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, 2022 (diolah).

Realisasi pendapatan negara konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp 30,54 triliun atau tumbuh 27,00 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja konsolidasian juga mengalami peningkatan 7,65 persen (*yoy*). Kinerja pelaksanaan anggaran konsolidasian tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020 ditunjukkan oleh penurunan defisit sebesar 24,81 persen dan SIKPA turun 47,48 persen.

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Timur pada akhir periode pelaporan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan proporsi sebesar 82,77 persen dan tumbuh 19,29 persen.

Grafik 3.51. Komposisi Komponen Pendapatan Konsolidasian Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

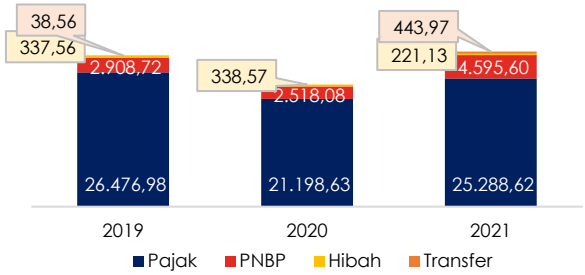

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Dilihat dari komponen pendapatan, pertumbuhan tertinggi terdapat pada pendapatan transfer, diikuti pendapatan PNBP.

Grafik 3.52. Analisis Pertumbuhan Komponen Pendapatan Konsolidasian Kaltim 2019-2021

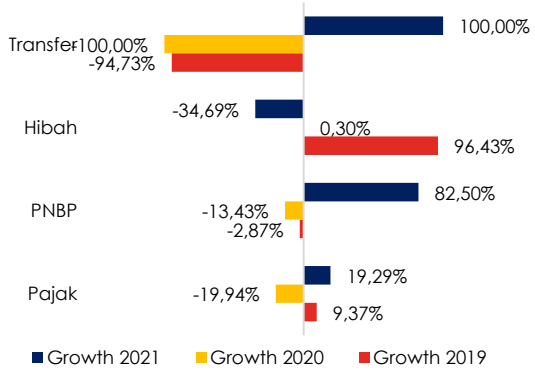

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Kinerja pendapatan konsolidasian telah membaik dibandingkan tahun lalu dengan hampir semua komponen mengalami pertumbuhan positif.

Grafik 3.53. Komposisi Kontribusi Pusat dan Daerah pada Pendapatan Konsolidasian Kaltim 2019-2021

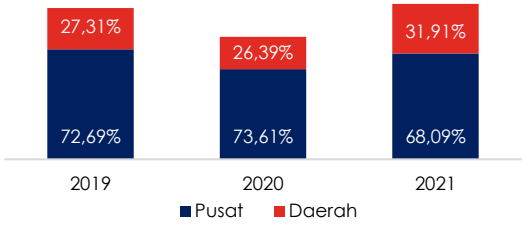

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Kontribusi Pemerintah pusat masih lebih tinggi daripada pemerintah daerah pada pendapatan konsolidasian sampai akhir periode pelaporan. Namun demikian, kontribusi pemerintah pusat mengalami penuruan secara persentase. Hal ini menandakan kinerja pendapatan daerah semakin baik dari tahun lalu.

Grafik 3.54. Analisis *Tax Ratio* Kaltim 2019-2021 (triliun Rp)

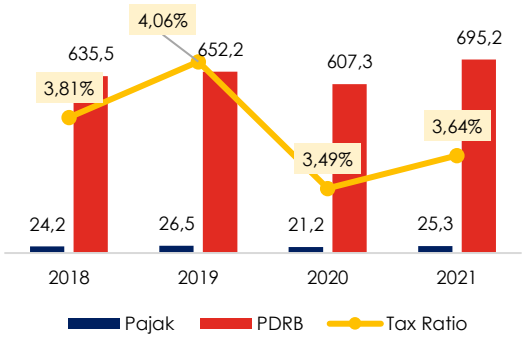

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim dan BPS, 2022 (diolah).

Tax ratio tahun 2021 meningkat jika dibaningkan tahun lalu, namun masih lebih rendah daripada tahun 2019, masa sebelum pandemi. Dampak pandemi memang masih dirasakan, selain itu ketidakpastian berakhirnya pandemi membuat kinerja pendapatan sedikit tertahan.

3.3.2 Belanja Konsolidasian

Tabel 3.15. Komponen Belanja Konsolidasian Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Jenis Belanja	2019	2020	2021
Belanja Barang	13.339,24	12.091,98	13.359,11
Belanja Pegawai	12.335,82	12.623,06	12.209,93
Belanja Modal	11.412,66	9.634,76	10.368,32
Transfer	2.288,21	1.776,78	4.040,09
Belanja Hibah	1.287,45	1.100,22	721,97
Belanja Lain-lain	15,42	1.056,26	569,99
Belanja Bansos	98,65	101,79	33,84
Belanja Bunga	25,91	10,78	16,64
Belanja Subsidi	3,98	-	12,00

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Belanja konsolidasian didominasi jenis belanja barang yang mencapai Rp13,35 triliun, sementara belanja pegawai mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp12,20 triliun.

Tabel 3.16. Pertumbuhan Komponen Belanja Konsolidasian Kaltim 2019-2021

Jenis Belanja	Growth 2019	Growth 2020	Growth 2021
Belanja Pegawai	1,60%	2,33%	-3,27%
Belanja Barang	29,40%	-9,35%	10,48%
Belanja Modal	19,41%	-15,58%	7,61%
Belanja Bunga	100,00%	-58,39%	54,34%
Belanja Subsidi	-17,27%	-100,00%	100,00%
Belanja Hibah	-12,27%	-14,54%	-34,38%
Belanja Bansos	99,58%	3,18%	-66,75%
Belanja Lain-lain	-6,83%	6749,94%	-46,04%
Transfer	18,38%	-22,35%	127,38%

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Dari sisi pertumbuhannya, belanja bantaun sosial mengalami penurunan paling besar yaitu 66,75 persen. Sedangkan belanja transfer tumbuh paling tinggi mencapai 127,38 persen. Hal tersebut dipengaruhi peningkatan transfer bagian daerah atas pemanfaatan sumber daya alam.

Grafik 3.55. Komposisi Kontribusi Komponen Belanja Konsolidasian Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

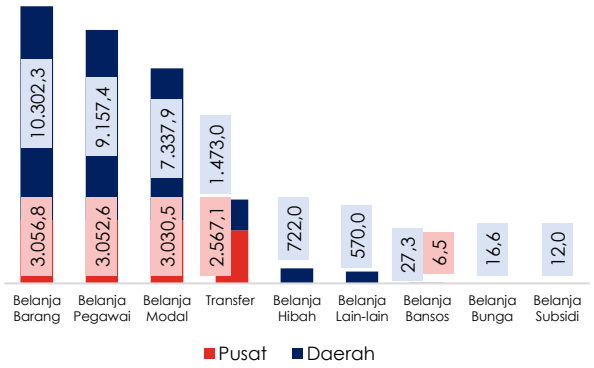

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Porsi belanja daerah pada realisasi belanja konsolidasian lebih besar dari belanja pemerintah pusat. Hal ini disebabkan realisasi belanja transfer ke daerah di sisi pemerintah pusat dieliminasi.

Grafik 3.56. Analisis Kontribusi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kaltim 2021 (miliar Rp)

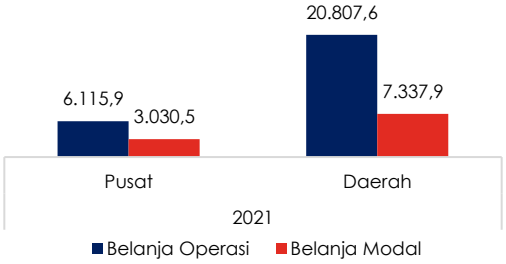

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Proporsi belanja operasi masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat menjadi perhatian kedepannya untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelanggaraan pemerintahan. Selain itu, komitmen

pemerintah dalam pembangunan nasional tercermin dari seberapa besar belanja modal yang dialokasikan dan direalisasikan.

3.3.3 Surplus/ Defisit

Grafik 3.57 Analisis Pertumbuhan Surplus/ Defisit Konsolidasian Kaltim 2018-2021 (miliar Rp)

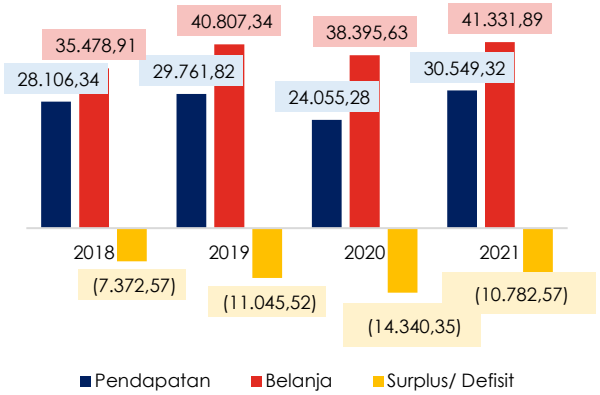

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Dalam empat tahun terakhir, pelaksanaan anggaran konsolidasian selalu mengalami defisit. Paling dalam terjadi di tahun 2020 sebesar Rp14,34 triliun, namun membaik di tahun 2021 menjadi Rp10,78 triliun. Kebijakan fiskal yang ekspansif di tengah pandemi memang dibutuhkan sebagai motor penggerak roda perekonomian disaat sektor swasta mengalami kontraksi.

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Grafik 3.58. Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Konsolidasian Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

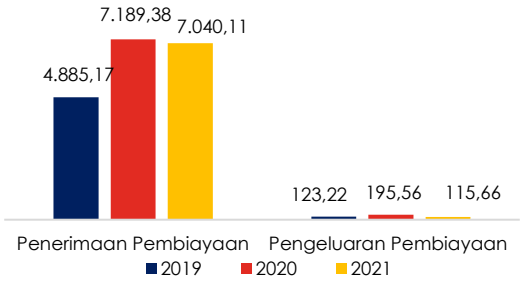

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

Pembiayaan konsolidasian berasal dari pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA tahun lalu dan pengeluaran pembiayaan berupa penanaman modal pemda ke BUMD atau perusahaan daerah.

3.3.5 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian

Kontribusi pengeluaran pemerintah dari sisi belanja pemerintah dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan 0,09 persen poin dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, dari sisi investasi, kontribusi pemerintah menurun 0,12 persen poin, walaupun secara nominal tumbuh Rp576 miliar. Kontribusi tersebut masih belum kembali seperti tahun 2019, dimasa sebelum pandemi.

Tabel 3.17. Analisis Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Perekonomian Regional Kaltim 2019-2021 (miliar Rp)

Uraian	2019	2020	2021
PDRB	652.158,06	607.320,78	695.158,33
Belanja Pemerintah*)	36.661,20	26.498,28	30.963,57
Kontribusi Belanja Pemerintah	**5,62%**	**4,36%**	**4,45%**
Investasi Pemerintah**)	11.412,66	9.634,76	10.210,75
Kontribusi Investasi Pemerintah	**1,75%**	**1,59%**	**1,47%**

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Kaltim dan BPS, 2022 (diolah).
Ket.: *) Belanja Pemerintah pada LO GFS
**) Akuisisi Aset Non Keuangan Netto pada LO Statistik Keuangan Pemerintah

Pandemi Covid-19 masih berlanjut di tahun 2021 dan belum ada kepastian kapan akan selesai. Kebijakan fiskal pemerintah masih melanjutkan kebijakan tahun lalu, dimana pemerintah lebih ekspansif dalam melakukan belanja negara walaupun pendapatan negara masih mendapat tekanan.

Dukungan pemerintah bagi pembangunan ekonomi tidak hanya soal alokasi pagu, namun juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunan. Terutama pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN & POTENSIAL REGIONAL

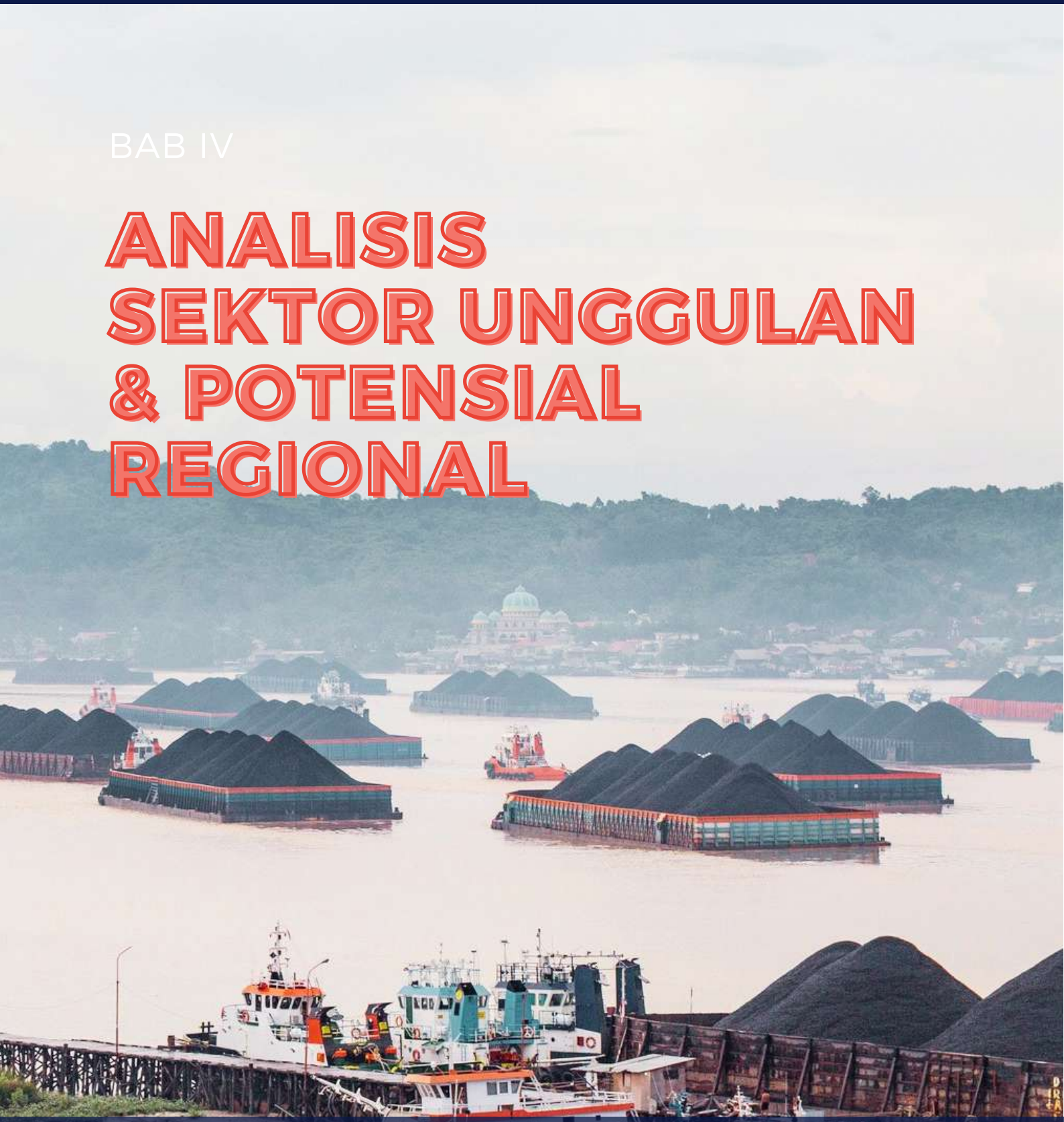

Secara umum, sektor unggulan di kaltim berdasarkan lapangan usaha adalah **pertambangan dan penggalian**. Namun demikian, apabila dilihat spasial per Pemda maka terdapat sektor unggulan yang berbeda-beda dari masing-masing Pemda.

BAB IV
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

4.1 PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Kaltim kembali positif di tahun 2021 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Kebijakan fiskal pemerintah baik pusat maupun daerah yang terarah dan terukur telah berhasil meredam dampak pandemi Covid-19 yang masih berlanjut di tahun 2021.

Sejalan dengan kelanjutan pemulihan ekonomi, tema RKPD Kaltim 2021 adalah "Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Arah dari kebijakan pembangunan tersebut adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi. Selain itu, penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik dan pemulihan ekonomi serta perbaikan kondisi masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19.

Dalam mewujudkan kebijakan pembangunan tersebut, Daerah Kaltim secara alamiah memiliki keunggulan, karena letak geografis yang strategis, wilayah yang luas dan potensi kekayaan sumber daya alam yang besar. Kondisi ini niscaya bisa menjadi modal besar bagi Kaltim untuk menumbuhkan perekonomian regional. Letak geografis Kaltim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur II, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sangat strategis dalam konteks lalu lintas transportasi dan perdagangan. Selain itu, rencana pemindahan IKN baru ke wilayah Kaltim telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Hal ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Kaltim pada umumnya. Harapannya akselerasi pembangunan di Kaltim bukan hanya sekedar infrastruktur namun juga pembangunan manusia/ masyarakat lokal sehingga memiliki daya saing untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam wilayah IKN.

Berbagai faktor yang menjadi nilai tambah tersebut harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pengelola fiskal daerah untuk dapat memetakan potensi perekonomian unggulan dan potensial sehingga bisa menentukan program-program prioritas yang akan dibiayai dari APBN maupun APBD. Keterbatasan fiskal/ ruang fiskal yang ada harus bisa

dimanfaatkan semaksimal mungkin utnuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pemetaan sektor unggulan dan potensial tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Dalam tipologi Klassen ini sektor perekonomian akan diklasifikasikan dalam empat kuadran yang masing-masing kuadran menggambarkan situasi sektor perekonomian tersebut dengan memperhatikan sektor perekonomian unggulan/basis wilayah (analisis *Location Quotient (LQ)*) dan perubahan pertumbuhan sektor perekonomian wilayah (*Differential Shift (DS)*). Data yang diolah adalah data PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan PDB tahun 2018 s.d. 2021 menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan tahun 2010.

Gambar 4.1. Tipologi Klassen Berdasarkan PDRB ADHK Lapangan Usaha Kaltim

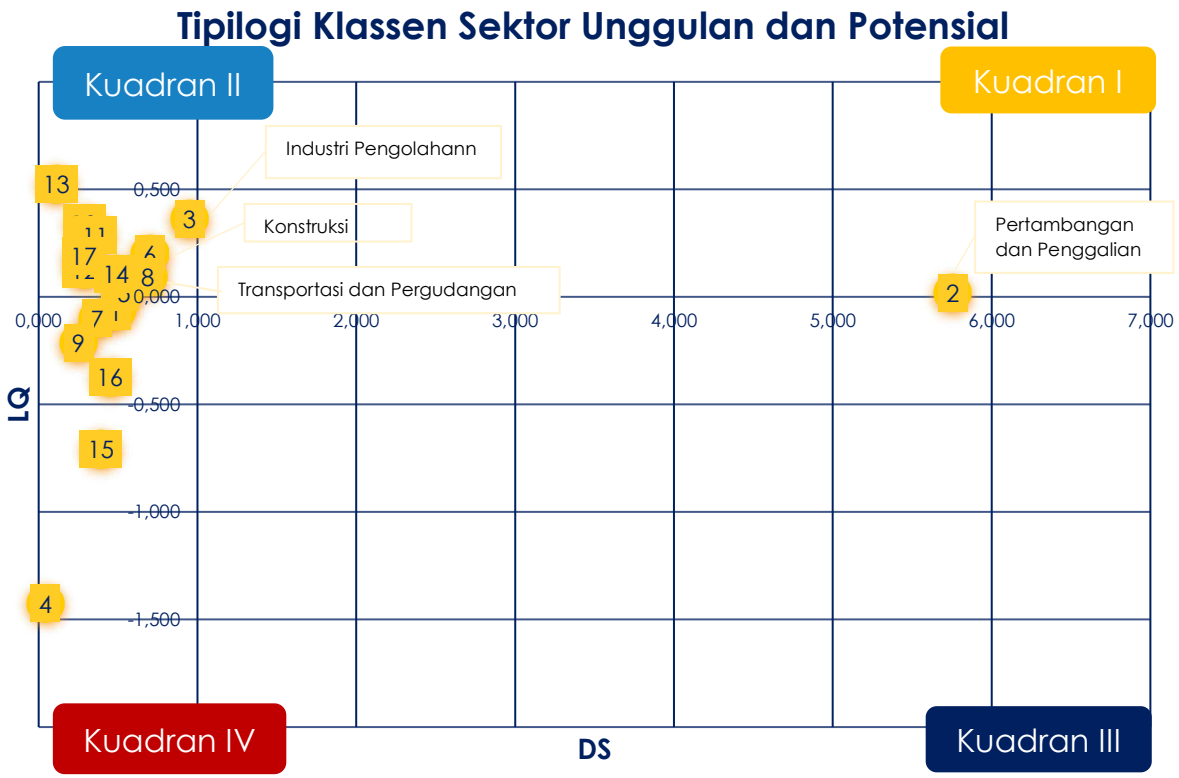

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat terlihat bahwa sektor perekonomian Kalimantan Timur yang berada di kuadran I hanya satu sektor yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yang mana sektor ini memang menjadi tumpuan utama perekonomian Kaltim, akan tetapi dengan nilai DS yang sangat kecil 0,020, maka sektor ini sudah pada titik jemu/ tidak bertumbuh. Yang menarik banyaknya sektor yang masuk dalam kuadran II (10 sektor), hal ini berarti banyak sektor potensial di Kaltim, akan tetapi selama ini belum dikembangkan dengan optimal. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan sektor-sektor potensial tersebut sehingga dapat menjadi alternatif penopang perekonomian.

Dari hasil analisis tabel I-O, terdapat dua metode analisis yang dapat digunakan untuk pemetaan sektor potensial penggerak perekonomian regional Kaltim. Analisis tersebut adalah analisis pengganda output dan *income* (*multiplier*) dan analisis keterkaitan antara sektor perekonomian(*linkages*).

Tabel 4.1. Angka Pengganda Output dan Pendapatan Menurut Industri Prov. Kaltim

Sub Sektor Lapangan Usaha	*Multiplier*	
	Output	*Income*
Ketenagalistrikan	2,9475	0,225
Industri Makanan dan Minuman	2,0222	0,311
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,983	0,3784
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,9094	0,2562
Angkutan Udara	1,8009	0,2076
Jasa Pendidikan	1,3313	0,6039
Jasa Penunjang Keuangan	1,4279	0,5585
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,3067	0,5211
Pertanian Tanaman Pangan	1,3315	0,5128
Industri Furnitur	1,5271	0,5122

Sumber : Tabel I-O BPS Prov. Kaltim, 2022 (diolah).

Dari tabel 4.1 ditampilkan lima sub sektor pengganda terbesar baik dari output maupun pendapatan.

Analisis pengganda output digunakan untuk mengetahui dampak perubahan permintaan akhir (*final demand*) suatu sektor/ sub sektor terhadap penciptaan output semua sektor/ sub sektor di wilayah tersebut. Nilai pengganda output terbesar terdapat pada sub sektor ketenagalistrikan dengan nilai 2,9475. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir di sektor tersebut sebesar Rp1 juta, sementara sektor lainnya diasumsikan tetap, maka akan meningkatkan output seluruh sektor di dalam perekonomian sebesar Rp2,9475 juta. Selanjutnya ada sub sektor industri makanan dan minuman dengan nilai 2,0222 dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 1,9830.

Sedangkan angka pengganda pendapatan menunjukkan jumlah pendapatan rumah tangga yang tercipta akibat adanya tambahan satu unit uang permintaan akhir di industri tersebut. Untuk wilayah Kaltim, sub sektor yang memiliki pengganda pendapatan terbesar adalah jasa pendidikan dengan nilai 0,6039. Hal ini dapat diartikan, jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada sektor tersebut sebesar Rp1 juta, sementara sektor lainnya diasumsikan tetap, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat pada semua sektor dalam perekonomian sebesar Rp603,9 ribu. Nilai pengganda pendapatan terbesar selanjutnya terdapat pada sub sektor jasa penunjang keuangan (0,5585) dan pertanian tanaman hortikultura semusim, hortikultura tahunan dan lainnya (0,5211).

Tabel I-O juga bisa digunakan untuk mengukur/ menganalisis keterkaitan antar sektor/ sub sektor (*industrial linkage analysis*) dalam suatu wilayah perekonomian. Sehingga dapat dilakukan pemetaan sektor/ sub sektor yang menjadi unggulan atau potensial yang mampu mendorong pertumbuhan sektor lainnya dengan cepat. Dalam mengukur keterkaitan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu keterkaitan ke belakang (*backward*

linkage) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*).

Tabel 4.2. Nilai Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Menurut Industri Prov. Kaltim

Sub Sektor Lapangan Usaha	Linkages		Sub Sektor Lapangan Usaha
	Backward	*Forward*	
Ketenagalistrikan	2,9475	3,6829	Ketenagalistrikan
Industri Makanan dan Minuman	2,0222	6,8892	Industri Batubara dan Pengilangan Migas
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,983	4,197	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,9094	3,1752	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
Angkutan Udara	1,8009	2,4671	Perkebunan Semusim dan Tahunan

Sumber : Tabel I-O BPS Prov. Kaltim, 2022 (diolah).

Keterkaitan ke belakang *(backward linkage*) adalah efek relatif yang menyebabkan perubahan output pada industri/ sektor lainnya akibat meningkatnya permintaan akhir industri/ sektor tertentu. *Backward linkage* identik dengan pengganda/ *multiplier* output. Sedangkan keterkaitan ke depan *(forward linkage)* adalah efek relatif yang menyebabkan perubahan output pada suatu industri/ sektor tertentu akibat meningkatnya permintaan akhir dari industri/ sektor lainnya.

Dalam tabel 4.2 disajikan masing-masing lima besar sub sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Sub sektor yang memiliki *backward linkage* terbesar adalah ketenagalistrikan dengan nilai 2,9475. Disisi lain, ketenagalistrikan juga memiliki *forward linkage* yang cukup besar, duduk diposisi ketiga dengan nilai 3,6829. Sedangkan posisi pertama untuk sektor yang memiliki *forward linkage* terbesar dengan nilai 6,8892 adalah sektor industri batubara dan pengilangan migas. Hal ini bisa menjadi gambaran bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan sektor-sektor unggulan selain dari pertambangan dan penggalian, utamanya batubara.

4.2 SEKTOR UNGGULAN DAERAH

Secara umum sektor unggulan daerah Kaltim berdasarkan lapangan usaha adalah pertambangan dan penggalian. Sektor tersebut juga merupakan tulang punggung perekonomian Kaltim dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam pembentukan PDRB. Namun demikian, kondisi perkembangan global yang mulai beranjak mencari alternatif sumber energi baru yang terbarukan (EBT), energi bersumber dari fosil akan segera ditinggalkan. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi daerah-daerah yang sangat bergantung dengan sumber daya alam tak terbarukan/ *unrenewable resources* untuk segera melakukan transformasi struktur perekonomiannya. Walaupun cadangan batubara Kaltim mencapai 16,07 miliar ton di tahun 2020, namun hal itu tidak menjamin bahwa semua *resources* itu akan dimanfaatkan ketika dunia ini telah beralih ke sumber energi baru dengan konsep *green and clean energy*. Oleh karena itu harus dilakukan pemetaan per wilayah kabupaten/ kota, sektor-sektor yang potensial dan mendukung *SDGs* untuk menggantikan pertambangan dan penggalian.

Berbagai wilayah di Kaltim sebenarnya memiliki sektor-sektor unggulan masing-

masing, walaupun masih didomonasi sekto pertambangan dan penggalian. Kebijakan Pemda dapat diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor tersebut.

4.2.1 Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Gambar 4.2. Profil Sektor Unggulan Kab./ Kota di Wilayah Kaltim 2021

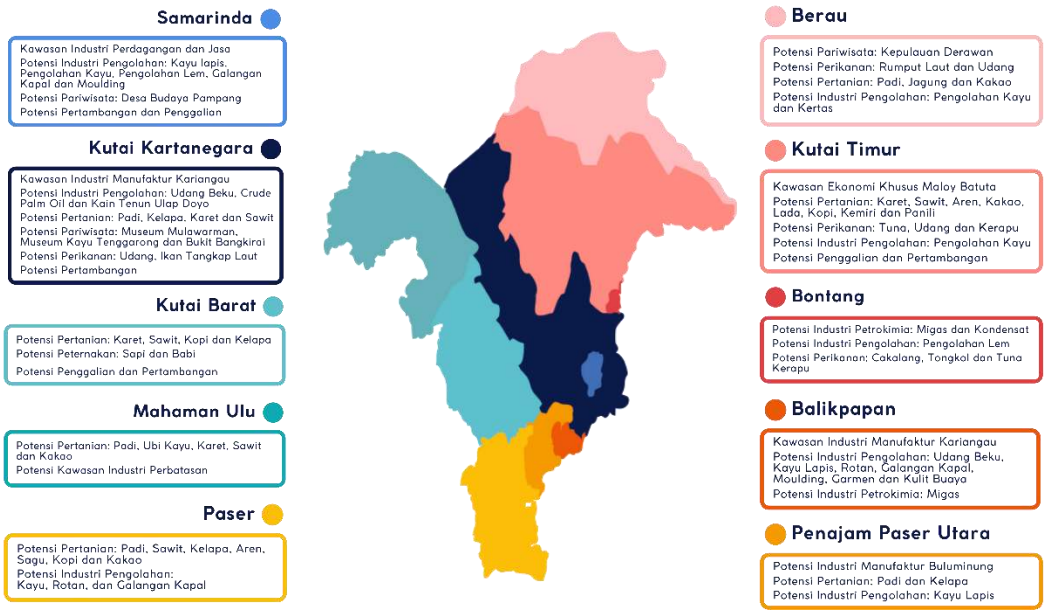

Sumber : RPJMD Prov. Kaltim, 2022 (diolah).

Dalam gambar 4.2 dapat dilihat sektor-sektor unggulan dan potensial per kabupaten/ kota.

Berau

Di kabupaten yang berpenduduk 248,04 ribu jiwa ini terdapat beberapa sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan dan industri pengolahan. Dari sektor pertanian, komoditas unggulan selain padi, jagungdan kakao adalah bawang merah, cabai besar dan tomat petsai. Dalam satu tahun produksi bawang merah dapat mencapai 636 kuintal. Di sektor pariwisata, kepulauan derawan dan sekitarnya merupakan anugrah terindah di Kaltim, dengan pesona taman bawah lautnya yang menawarkan biota laut seperti terumbu karang, *stingless jellyfish*, kura-kura raksasa dan kuda laut kerdil. Hal tersebut juga mendukung sektor perikanan, dengan produksi perikanan perairan umum mencapai 1.460 ton di tahun 2020. Untuk sektor pertambangan batubara, produksi dalam setahun mencapai hampir 40 juta ton.

Kutai Barat

Kab. Kutai Barat memiliki beberapa sektor unggulan selain pertambangan dan penggalian, yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan. Komoditi dengan tonase terbesar yang dihasilkan dari sektor pertanian adalah ketimun yang mencapai 3.437 kuintal dan buah pisang sebesar 12.143 kuintal. Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan/ *food estate* untuk mendukung IKN. Sektor perkebunan masih didominasi kelapa sawit dengan hasil produksi 3.179 ton selama tahun 2020. Untuk sektor peternakan, Kutai Barat merupakan sentra ayam pedaging dengan populasi ternak mencapai 3,34 juta ekor. Sektor

utama masih pertambangan dan penggalian dengan share terhadap PDRB Kutai Barat mencapai 45,5 persen di tahun 2020.

Kutai Kartanegara

Kukar merupakan kabupaten dengan jumlah PDRB terbesar di Kaltim, juga menjadi salah satu kabupaten yang sebagian wilayahnya akan menjadi IKN baru nantinya. Sektor utama pertambangan menghasilkan sekitar 69,48 juta ton batubara dalam setahun. Selain itu di sektor industri, sebagian besar industri olahan pangan dan industri logam, mesin, elektro dan alat angkut telah menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja. Kukar juga unggul dalam sektor kehutanan dengan luas hutan produksi mencapai 2,3 juta hektar. Produksi kelapa sawit juga cukup besar yaitu 250 ribu ton, dan juga penghasil terong yang mencapai 58 ribu kuintal. Di sektor perdagangan, komoditi ekspor berupa udang beku, kepiting dan ikan betutu dengan nilai mencapai US$86 juta di tahun 2018.

Kutai Timur

Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 2,51 juta ha ini memiliki sebuah kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), namun sampai saat ini masih belum beroperasi dikarenakan infrastruktur yang belum memadai. Potensi yang dimiliki selain pertambangan dan industri adalah perkebunan, pertanian dan peternakan. Produksi kelapa sawit mencapai 1,16 juta ton, tanaman padi sawah dan ladang seluas 6.306 ha dan memiliki populasi sapi potong sebanyak 19.775 ekor. Namun demikian, dominasi sektor pertambangan sangatlah besar mencapai 77,74 persen terhadap PDRB tahun 2020. Sedangkan industri pengolahan mayoritas berupa pengolahan kelapa sawit.

Mahakam Ulu

Kabupaten termuda di Kaltim ini masih terkendala dengan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Dengan jumlah penduduk hanya 35 ribu jiwa, potensi di kabupaten ini terdapat pada sektor pertanian dengan komoditas cabai rawit, kacang panjang, kangkung dan tomat. Sektor pertambangan tidak terlalu mendominasi dalam perekonomian dengan *share* 6,76 persen. Sektor pariwisata perbatasan bisa menjadi daya tarik karena Mahulu berbatasan dengan Malaysia.

Paser

Kabupaten yang terletak di ujung selatan Kaltim ini memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan industri pengolahan. Luas padi sawah dan ladang di Paser mencapai 12.204 ha sedangkan perkebunan kelapa sawit mencapai 1,8 juta ha. Sektor peternakan, populasi terbesar adalah sapi potong sebanyak 18.977 ekor, sementara kambing sebanyak 7.963 ekor.

Penajam Paser Utara

Daerah yang sebagian wilayahnya akan menjadi IKN baru ini memiliki keunggulan di sektor industri manufaktur, pertanian dan industri pengolahan. PPU memiliki areal padi sawah dan ladang yang cukup luas mencapai 16.835 ha. Selain itu PPU juga menghasilkan cabai rawit, cabai besar, petsai, tomat dan bayam. Perkebunan kelapa sawit juga cukup besar dengan produksi 452 ribu ton setahun. Industri utama

berupa pengolahan kelapa sawit, sedangkan hasil perikanan di tahun 2020 mencapai 31,2 ribu ton.

Balikpapan

Balikpapan merupakan kota industri di Kaltim. Pemkot Balikpapan telah menyiapkan kawasan ekonomi terpadu dengan nama kawasan industri kariangau (KIK) dengan luas wilayah 2.189 ha. Di KIK tersebut terdapat industri substitusi impor, manufaktur, basis lokal dan industri campuran. Selain itu, terdapat industri modern dan industri berorientasi ekspor. Sektr pariwisata juga mulai dikembangkan di Balikpapan. Pada tahun 2020 sektor pariwisata ini memiliki 63 objek wisata yang dapat dikunjungi, diantaranya berupa 8 wisata alam/ hutan atau ekowisata, 11 wisata religi, 9 wisata bahari dan 13 wisata kuliner.

Bontang

Kota Bontang merupakan daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Kaltim. Sektor potensial di Bontang berupa industri dan perikanan. Di Bontang terdapat juga sumber minyak bumi dan gas namun dikarenakan sumur minya dan gas tersebut sudah cukup tua maka produksi terus menurun setiap tahunnya. Sedangkan industri pengolahan merupakan lapangan usaha utama di Bontang dengan *share* 79,6 persen terhadap PDRB.

Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibukota Kaltim dengan jumlah penduduk sebanyak 827.994 jiwa di tahun 2020. Sektor unggulan di Samarinda adalah industri, pariwisata, perdagangan dan pertambangan. Sektor perdagangan sangat berkembang di Samarinda dengan banyaknya penerbitan izin usaha di tahun 2020 yang mencapai 14.755 izin usaha, rata-rata perdagangan menengah dan kecil. Industri pengolahan juga berperan besar pada perekonomian melalui industri agro dan aneka, industri semen dan kapur, industri air minum dan industri logam, mesin dan elektronika. Untuk sektor pariwisata, Samarinda memiliki akomodasi yang lengkap dengan 18 hotel berbintang dan 44 hotel non-bintang. Wisata budaya pampang, wisata alam, wisata religi dan wisata kuliner menjadi andalan di Samarinda.

4.2.2 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Sektor unggulan daerah secara umum adalah pertambangan dan penggalian. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan ketenagakerjaan, maka kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan sektor ini termasuk sektor pada modal dan bukan sektor penyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Tabel 4.3. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Ketenagakerjaan Kaltim 2019-2021

Sektor Unggulan	2019	2020	2021
Pertambangan dan Penggalian			
PDRB (triliun)	297,4	251,6	313,2
Pertumbuhan PDRB	0,22%	-15,39%	24,47%
Tenaga Kerja (ribu)	140,3	123,1	122,1
Proporsi TK	8,28%	7,27%	7,10%
Pertumbuhan TK	-3,07%	-12,28%	-0,80%

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Kontribusi tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian relatif kecil, yaitu 7,10 persen di tahun 2021, dan bahkan selalu menurun setiap tahun. Walaupun dari segi sumbangan PDRB sangat besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Kaltim adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Dengan potensi alam dan luas wilayah yang cukup besar, kebijakan pemerintah bisa diarahkan untuk meningkatkan sektor produksi dalam hal ini sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan *multiplier effect* terhdap sektor-sektor lainnya.

4.2.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Disisi kontribusi sektor unggulan terhadap pendapatan negara, tampak pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Pendapatan Negara Regional Kaltim 2019-2021

Sektor Unggulan	2019	2020	2021
Pertambangan dan Penggalian			
PDRB (triliun)	297,4	251,6	313,2
Pertumbuhan PDRB	0,22%	-15,39%	24,47%
Pajak (miliar)	6.030,3	3.495,1	3.895,9
Proporsi Pajak	30,95%	22,46%	23,27%
Pertumbuhan Pajak		-42,04%	11,47%

Sumber : Kanwil DJP Kaltimtara dan BPS, 2022 (diolah).

Pertumbuhan PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian tidak serta merta diiringi pertumbuhan pajak sektor tersebut. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB sektor pertambangan sebesar 24,47 persen, namun pertumbuhan pajak sektor tersebut hanya 11,47 persen. Selain itu apabila dilihat dari nominal PDRB sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai Rp313,2 triliun sangat jauh apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam sektor tersebut yang hanya Rp3,89 triliun. Namun demikian, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan penggalian masih berkontribusi cukup besar terhadap total pendapatan negara regional Kaltim yang bersumber dari perpajakan yaitu sebesar 23,27 persen di tahun 2021.

Akan tetapi, nilai perpajakan ini belum mencerminkan secara *real* di lapangan, karena dalam perhitungan pajak masih berdasarkan NPWP. Sehingga perusahaan yang memiliki NPWP di luar Kaltim, walauapun memiliki usaha tambang di Kaltim, tidak akan tercatat sebagai penerimaan regional Kaltim. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk membuat sistem pencatatan pajak berdasarkan wilayah objek pajak. Misalnya dengan kodefikasi setoran pajak dengan penambahan lokasi objek pajak setingkat kabupaten/ kota.

4.2.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Dalam pengembangan sektor pertambangan dan penggalian, dukungan APBN dan APBD disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 Dukungan Alokasi APBD Kaltim 2021 untuk Sektor Unggulan (juta rupiah)

Sektor	Dukungan	Pagu	PIC
Pertambangan dan Penggalian	Program Peningkatan dan Pengembangan	5.600,00	Disperindagkop dan UKM
	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses	1.760,00	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	2.030,00	DPMPTSP

Sumber : RKPD Prov. Kaltim 2021, 2022 (diolah).

Secara nominal, dukungan dari pemerintah relatif kecil, hanya untuk administrasi pemrosesan perizinan pertambangan yang terdapat di dua OPD yaitu Disperindagkop dan DPMPTSP Provinsi Kaltim. Sektor pertambangan dan penggalian memang menjadi domain swasta dan apabila pemerintah ikut andil di sektor tersebut adalah melalui BUMN atau BUMD. Yang dibutuhkan dari sektor ini bukan alokasi

dana dari APBN maupun APBD namun aturan main pertambangan mulai dari produksi, ekstraksi sampai dengan pengolahan dan pengiriman hasil/ komoditi baik untuk ekspor ke luar negeri maupun untuk kebutuhan dalam negeri.

4.2.5 Tantangan Fiskal pada Sektor Unggulan Daerah

Tantangan fiskal untuk sektor pertambangan dan penggalian relatif tidak begitu besar. Hal ini disebabkan sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan/ pasar global. Naik turunnya sektor ini sangat bergantung dari negara-negara utama tujuan ekspor batubara yaitu Tiongkok dan India. Dari sisi pemerintah, adalah bagaimana memberikan kepastian hukum atau aturan-aturan main dalam pertambangan sehingga dalam bisnis pertambangan ini tetap berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat terutama daerah penghasil tambang yang dalam kenyataan tingkat kemiskinannya tinggi.

4.2.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pertambangan yang dituangkan dalam peraturan sebenarnya sudah cukup banyak, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Namun demikian, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut harus adil dan tegas. Hal ini terutama berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terancam akibat pertambangan.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam sektor pertambangan ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. Kebijakan pembatasan pembukaan area pertambangan juga harus dilakukan seiring dengan isu global untuk beralih ke sumber energi baru terbarukan (EBT). *Shifting* atau transformasi ke sektor lain untuk menopang perekonomian menjadi hal yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Adapun arah kebijakan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021 terkait sektor pertambangan dan penggalian adalah sebagai berikut:

1. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan.
2. Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor.
3. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.
4. Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi.

Dalam mengeluarkan izin pertambangan baru, hendaknya pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya area pertambangan tersebut tidak menyalahi RTRW Pemda setempat.

4.3 SEKTOR POTENSIAL DAERAH

Kembali kita lihat pada gambar 4.1 tipologi Klassen di atas bahwa terdapat 10 sektor potensial (terletak di kuadran II) di Kaltim. Hal ini sangat bagus untuk pengembangan perekonomian supaya tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Dari 10 sektor tersebut ada dua sektor yang nilai LQ nya tinggi mendekati 1 yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Transportasi dan pergudangan. Kaitannya dengan pemindahan IKN baru ke Kaltim, ketiga sektor tersebut sangat potensial

dikembangkan terutama untuk mendukung IKN. Pergeseran dari sektor pertambangan dan penggalian bisa diarahkan pada tiga sektor tersebut.

4.3.1 Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Sektor potensial Kaltim tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Hanya terdapat penambahan sektor potensial yaitu pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Gambar 4.3. Profil Sektor Potensial Kaltim 2020-2021

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Industri Pengolahan

Industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang nilai tambah terbesar kedua di setelah sektor pertambangan dan penggalian. Keberadaan perusahaan industri besar, khususnya industri pengilangan migas, industri bahan kimia, dan industri CPO (mamin) cukup berpengaruh terhadap *share* PDRB industri pengolahan. Jumlah perusahaan industri berskala besar dan sedang (IBS) di Kaltim tercatat sebanyak 186. Menurut kabupaten/ kota, perusahaan berskala besar dan sedang di Kaltim berada di wilayah perkotaan. Balikpapan menjadi kota dengan jumlah perusahaan IBS terbanyak mencapai 62 perusahaan atau 33,3 persen dari total IBS. Sementara itu, di Samarinda sebanyak 36 perusahaan. Menurut klasifikasi industri pengolahan berdasar KBLI, di Kaltim terdapat 14 klasifikasi industri. Industri makanan mendominasi industri besar dan sedang di Kaltim yaitu sebanyak 86 unit perusahaan atau sekitar 46,23 persen. Disusul jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang berjumlah 30 perusahaan. Industri yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak ada pada industri makanan sebanyak 11.696 tenaga kerja, kedua pada industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya memiliki 8.721 tenaga kerja.

Konstruksi

Sektor Konstruksi memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, sektor ini juga sangat membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap total PDRB Kaltim cukup tinggi, dan merupakan penyumbang ketiga terbesar setelah Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Pengolahan. Namun, jumlah perusahaan konstruksi di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 4.936 usaha di tahun 2019 menjadi 4.468 usaha di tahun 2020. Penurunan ini terjadi pada semua skala usaha yang terdiri dari skala kecil, menengah, maupun besar. Sementara itu, data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di

tahun 2020 menunjukkan tingkat kemahalan biaya konstruksi di wilayah Kalimantan Timur dengan membandingkan biaya di wilayah (kota) acuan, yaitu Surabaya. Secara umum, biaya konstruksi di Kalimantan Timur relatif lebih mahal dibandingkan di Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari besaran indeks pada tahun 2015-2020 yang bernilai di atas 100. Berdasarkan kabupaten/ kota, ada satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki IKK yang sangat tinggi, yaitu Mahakam Ulu dengan IKK sebesar 143,93. Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa konstruksi di Mahakam Ulu cukup tinggi, mengingat sulitnya akses menuju wilayah ini.

Transportasi dan Pergudangan

Sektor ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Jalan dan jembatan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Pemerintah Daerah memberi peran dengan membangun jalan provinsi sepanjang 895 km. Sedangkan untuk jalan kabupaten/ kota pada tahun 2019 sudah sepanjang 12,75 ribu km. Data mengenai panjang jalan ini termasuk salah satu indikator yang mendukung pencapaian *SDGs*. Pada tahun 2020, kendaraan sepeda motor di Kaltim berjumlah sekitar 3,18 juta unit, meningkat sekitar 6,22 persen dari tahun sebelumnya. Mobil penumpang, truk dan bus juga mengalami peningkatan walaupun jumlah keseluruhannya tetap tidak sebanyak pada sepeda motor. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan yang panjang pada beberapa titik jalan di daerah perkotaan, khususnya di Samarinda dan Balikpapan. Ditambah dengan insentif pajak kendaraan bermotor, sektor ini diproyeksikan semakin bertumbuh di tahun 2022.

4.3.2 Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Tabel 4.6. Kontribusi Sektor Potensial terhadap Ketenagakerjaan Kaltim 2019-2021

Sektor Potensial	2019	2020	2021
Industri Pengolahan			
PDRB	116,2	114,8	123,8
Pertumbuhan PDRB	0,81%	-1,23%	7,87%
Tenaga Kerja	128,7	105	113,4
Proporsi TK	7,60%	6,23%	6,59%
Pertumbuhan TK	11,05%	-18,11%	7,54%
Konstruksi			
PDRB	58,5	57,9	62,2
Pertumbuhan PDRB	9,29%	-1,04%	7,54%
Tenaga Kerja	99,9	108,5	99,7
Proporsi TK	2,79%	6,41%	5,79%
Pertumbuhan TK	17,70%	8,56%	-8,11%
Transportasi dan Pergudangan			
PDRB	24,2	22,2	23,2
Pertumbuhan PDRB	5,14%	-7,97%	4,27%
Tenaga Kerja	87,2	85,9	79,3
Proporsi TK	5,15%	5,07%	4,61%
Pertumbuhan TK	16,40%	-1,56%	-7,65%

Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Dari sisi ketenagakerjaan, ketiga sektor potensial tersebut relatif tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Industri pengolahan hanya menyerap 6,59 persen, konstruksi sebanyak 5,79 persen dan transportasi dan pergudangan hanya 4,61 persen. Namun demikian, apabila dilihat dari *multiplier effect*-nya ketiga sektor tersebut memiliki nilai yang tinggi terutama industri dan konstruksi. Dari sisi transportasipun, efek pengganda yang dihasilkan juga tinggi karena transportasi

masuk dalam lingkaran sektor pariwisata. Sehingga dengan peningkatan sektor-sektor potensial tersebut, diharapkan akan dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional maupun nasional.

4.3.3 Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Tabel 4.7. Kontribusi Sektor Potensial terhadap Pendapatan Negara Regional Kaltim 2019-2021

Sektor Potensial	2019	2020	2021
Industri Pengolahan			
PDRB	116,2	114,8	123,8
Pertumbuhan PDRB	0,81%	-1,23%	7,87%
Pajak (miliar)	1.725,1	1.379,3	1.383,9
Proporsi Pajak	8,85%	8,86%	8,27%
Pertumbuhan Pajak		-20,05%	0,33%
Konstruksi			
PDRB	58,5	57,9	62,2
Pertumbuhan PDRB	9,29%	-1,04%	7,54%
Pajak (miliar)	2.025,8	1.757,6	1.748,9
Proporsi Pajak	10,40%	11,29%	10,45%
Pertumbuhan Pajak		-13,24%	-0,50%
Transportasi dan Pergudangan			
PDRB	24,2	22,2	23,2
Pertumbuhan PDRB	5,14%	-7,97%	4,27%
Pajak (miliar)	1.351,6	1.259,6	1.399,4
Proporsi Pajak	6,94%	8,09%	8,36%
Pertumbuhan Pajak		-6,81%	11,10%

Sumber : Kanwil DJP Kaltimtara dan BPS, 2022 (diolah).

Kontribusi perpajakan dari sektor potensial tersebut tampak pada tabel 4.7. Dari sektor industri pengolahan proporsi pajak terhadap total penerimaan mencapai 8,27 persen. Namun demikian, kenaikan PDRB sektor industri pengolahan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan perpajakannya, pertumbuhan PDRB di angka 7,87 persen, pertumbuhan pajak hanya 0,33 persen.

Untuk sektor konstruksi, proporsi pajak mencapai 10,45 persen, tetapi senada dengan sektor industri pengolahan, peningkatan PDRB sektor konstruksi tidak diikuti peningkatan penerimaan pajak dari sekktor ini.

Sebaliknya, di sektor transportasi dan pergudangan, pertumbuhan PDRB diikuti oleh pertumbuhan penerimaan pajaknya. Pada tahun 2021, PDRB sektor ini tumbuh 4,27 persen, sejalan dengan itu, pertumbuhan penerimaan pajak bahkan mencapai lebih tinggi yaitu 11,10 persen.

4.3.4 Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Dukungan APBD terhadap sektor potensial masih dirasa cukup minim. Dengan adanya pemindahan IKN ke wilayah Kaltim, diharapkan akan membangkitkan sektor-sektor potensial tersebut, terutama untuk tahap awal pemindahan IKN akan meningkatkan sektor konstruksi.

Tabel 4.8. Dukungan Alokasi APBD Kaltim 2021 untuk Sektor Potensial (juta rupiah)

Sektor	Dukungan	Pagu	PIC
Industri Pengolahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	5.600,00	Disperindagkop dan UKM
	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	1.760,00	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	2.030,00	DPMPTSP
Konstruksi & Transportasi dan Pergudangan	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	6.582,00	Dishub
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	13.846,00	Dishub
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	350.000,00	DPUPR&PERA

Sumber : RKPD Prov. Kaltim 2021, 2022 (diolah).

Sedangkan untuk industri pengolahan, diutamakan dukungan dari APBD adalah untuk industri kecil dan menengah termasuk didalamnya industri rumah tangga sehingga akan menggerakkan perekonomian rakyat kecil.

Adapun arah kebijakan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021 terkait sektor potensial Kaltim adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran;
2. Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat;
3. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan;
5. Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (*hinterland*) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah; dan
6. Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi.

Tabel 4.9. Dukungan Alokasi APBN Regional Kaltim 2021 untuk Sektor Potensial (juta rupiah)

Sektor	Dukungan	Pagu	PIC
Konstruksi	Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi	596.818,53	PUPR dan Kemenhub
Industri Pengolahan	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	949,47	Kemen-Perindustrian
& Transportasi dan Pergudangan	Infrastruktur Konektivitas Transportasi	1.342.411,04	Kemenhub

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Dukungan APBN untuk sektor potensial di Kaltim total mencapai Rp1,93 triliun. Terbesar ada di transportasi berupa pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu untuk sektor konstruksi terdapat pembangunan bendungan, embung dan jaringan irigasi.

Di tahun 2022, dukungan ke sektor potensial ini akan semakin besar seiring dimulainya proses pemindahan IKN ke Kaltim. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi Kaltim untuk benar-benar melakukan transformasi struktur ekonomi dari *unrenewable resources* ke *renewable resources*.

4.3.5 Tantangan Fiskal pada Sektor Potensial Daerah

Kebijakan fiskal yang diperlukan di sektor potensial adalah penambahan alokasi dana baik di APBN maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur. Diharapkan dengan pemindahan IKN ke Kaltim, pembangunan di Kaltim akan lebih merata dan tidak hanya berfokus di IKN. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat-daerah.

4.3.6 Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Dukungan yang diperlukan adalah kebijakan fiskal yang lebih merata antar daerah di Kaltim. Perpanjangan kebijakan insentif perpajakan untuk kendaraan bermotor juga dirasa tepat untuk tetap mendorong sektor transportasi tumbuh positif. Selain itu, akselerasi pelaksanaan APBN dan APBD sangat diperlukan sehingga kemanfaatan belanja pemerintah segera dirasakan masyarakat.

4.4 KOMODITAS/ PRODUK dan JENIS USAHA UNGGULAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Dalam rangka membangkitkan UMKM yang begitu terdampak oleh pandemi Covid-19, pemetaan terhadap komoditas/ produk unggulan UMKM menjadi penting. Sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih terarah dan terukur dalam mendorong peran UMKM dalam perekonomian.

Dari gambar 4.4 tampak komoditi/ produksi unggulan UMKM di masing-masing kabupaten/ kota di wilayah Kaltim. Hal ini

bisa menjadi salah satu dasar untuk membuat produk unggulan daerah. Pengembangan produk unggulan daerah tersebut akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif daerah dengan menciptakan nilai tambah melalui efisiensi faktor input (pembentuk daya saing) guna menghasilkan output (produktivitas).

Berbagai survei (BI, UNDP, BRI Micro dan SME Index) menyatakan sebagian besar UMKM terdampak oleh pandemi Covid-19, bahkan beberapa persen diantaranya gulung tikar/ berhenti beroperasi. Walaupun sangat terdampak pandemi, namun sektor UMKM merupakan sektor yang tangguh dan memiliki fleksibilitas yang baik untuk bangkit dan cepat pulih.

Gambar 4.4. Profil Komoditi/ Produk dan Jenis Usaha UMKM per Kab./ Kota di Wilayah Kaltim 2021

Sumber : Bank Indonesia, 2022 (diolah).

Apabila ditarik ke tingkat Provinsi maka 10 komoditas unggulan UMKM di Kaltim sebagai berikut:

1. Kelapa Sawit
   Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di beberapa daerah yaitu Berau, Kutai Timur dan Paser. Kaltim juga memiliki 95 unit pabrik pengolahan kelapa sawit yang telah beroperasi. Selain itu, perkebunan sawit menyerap tenaga kerja/ petani cukup banyak.
2. Padi
   Padi memiliki peran yang penting sebagai penyedia kebutuhan pangan wilayah Kaltim. Wilayah utama padi berada di Kukar dan PPU. Namun demikian, NTP subsektor tanaman pangan masih dibawah 100 sehingga perlu diperhatikan kedepannya.
3. Amplang
   Makanan khas dari Kaltim ini sangat diminati masyarakat maupun wisatawan. Prospek kedepan masih sangat bagus untuk komoditi amplang, ditambah dengan pemindahan IKN baru memberikan peluang lebih besar untuk pengembangan amplang.
4. Toko Kelontong
   Jenis usaha ini sangat jamak dilakukan di pinggiran kota maupun pedesaan. Konsumen yang relatif stabil dan modal yang tidak begitu besar, membuat jenis usaha ini layak untuk dikembangkan.
5. Ikan Nila
   Budidaya ikan nila sangat menarik karena pangsa pasarnya yang cukup luas di Kaltim. Walaupun terdapat kendala yaitu tingginya harga pakan atau kurangnya ketersediaan bibit.
6. Warung Makan (campur)
   Warung makan campur juga sangat diminati konsumen. Kebutuhan makanan siap saji selalu meningkat dari waktu ke

waktu dikarenakan peningkatan aktivitas masyarakat.

7. Sarang Burung Walet
   Budidaya sarang burung walet sangat menguntungkan. Selain harganya yang tinggi, perawatan tempat sarang burung walet tersebut relatif mudah dan murah.
8. Penjualan Beras
   Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga konsumen relatif stabil.
9. Penjualan TBS Sawit
   TBS Sawit merupakan komoditi perdagangan yang cukup mudah pemasarannya. Selain itu, harga TBS yang cenderung tinggi serta banyaknya pabrik kelapa sawit yang siap menampung TBS tersebut.
10. Budidaya/ penjualan udang
    Udang merupakan komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan protein tinggi, udang sangat diminati masyarakat. Komoditas ini memiliki prospek yang bagus kedepannya.

Tabel 4.10. Dukungan Alokasi APBD Kaltim 2021 Sektor UMKM (juta rupiah)

Sektor	Dukungan	Pagu	PIC
UMKM	Penguatan Kelembagaan dan Pengambangan Koperasi dan UKM	4.800,00	Disperindagkop dan UKM

Sumbe r: RKPD Prov. Kaltim 2021, 2022 (diolah).

Dukungan dari APBD tampak pada alokasi dana yang berada di Disperindagkop dan UKM Prov. Kaltim. Alokasi dana tersebut digunakan untuk pembinaan UMKM di wilayah Kaltim mulai dari penerapan protokol kesehatan, peningkatan produksi sampai pada strategi pemasaran.

Adapun arah kebijakan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021 terkait UMKM adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis;
2. Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan;
3. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
4. Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (*Startup*) Industri Kreatif;
5. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga; dan
6. Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah.

Tabel 4.11. Dukungan Alokasi APBN Regional Kaltim 2021 Sektor UMKM (juta rupiah)

No.	Sektor	Dukungan	Pagu	PIC
1	UMKM	Dukungan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Daerah	1.822,11	Kemen-Koperasi dan UKM

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Dukungan APBN sektor UMKM di tahun 2021 sebesar Rp1,82 miliar. Walaupun secara nominal relatif kecil, namun dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada alokasi tersebut. Pemerintah juga mengeluarkan program KUR dan UMi yang diarahkan untuk membantu UMKM di masa pandemi. Dengan subsidi bunga, relaksasi pembayaran angsuran hingga kemudahan syarat mendapatkan pembiayaan, diharapkan akan meringankan UMKM sehingga tetap bertahan dimasa pandemi atau bahkan bisa bangkit untuk berkembang lebih besar.

BAB V

ANALISIS HARMONISASI BELANJA PUSAT & DAERAH

UU HKPD dimaknai sebagai solusi atas desentralisasi fiskal. Harmonisasi/ sinkronisasi maupun keselarasan dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengejawantahkan tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

BAB V
ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 PENDAHULUAN

Mengawali pembahasan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau yang biasa disingkat HKPD, ada baiknya menelisik pemahaman terkait federalisme fiskal (*fiscal federalism*). Istilah federalisme /berasal dari bahasa *Latin: feodus*/ yang memiliki arti perjanjian atau pakta. *Fiscal federalism* merupakan studi yang membahas hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan, dimana pada sistem ini meletakkan pembagian/ distribusi kewenangan berdasarkan tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat *nasional* maupun *sub-nasional*.

Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan *desentralisasi fiskal* dalam pemerintahannya. Sebagai salah satu instrumen fiskal, desentralisasi fiskal menjadi *tool* dalam sistem hubungan keuangan pusat-daerah; yaitu, penyelenggaraan fungsi dan kewenangan pada pemerintah daerah dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. *Outcome* yang ingin diperoleh dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah, termasuk di dalamnya peningkatan pelayanan publik di daerah (baik kesehatan, pendidikan, transportasi umum, administrasi publik, dll), menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran baik di perdesaan dan perkotaan, menurunnya tingkat inflasi, meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan di daerah, dll.

Dalam konteks pelaksanaan HKPD, maka dibutuhkan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi tersebut tercermin dalam instrumen kebijakan pembangunan pemerintah berupa RPJMN dan RKP untuk pemerintah pusat serta RPJMD dan RKPD untuk pemerintah daerah. Ketimpangan/ ketidakmerataan pembangunan di daerah sebenarnya bukan semata-mata soal tidak adanya alokasi dana/ ruang fiskal, namun salah satu permasalahan adalah belum selarasnya program/ proyek pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keselarasan/ keharmonisan antara belanja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat mewujudkan percepatan/ akselerasi pemerataan

pembangunan di daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menerbitkan PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut sinkronisasi dalam penganggaran sangat penting dan diharapkan bisa diwujudkan melalui 4 langkah. Pertama, perkuatan kendali program yang menekankan prioritas dijabarkan sampai level proyek untuk memudahkan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan. Kedua, integrasi sumber pendanaan yang meliputi integrasi rencana pemanfaatan sumber pendanaan baik belanja pusat, transfer ke daerah maupun non APBN untuk meningkatkan efektivitas pendanaan prioritas. Ketiga, perkuatan koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah untuk menyusun prioritas yang disiapkan lebih awal dengan melakukan sinergi antar program dan antar pelaku pembangunan. Keempat, integrasi sistem dan dokumen yang mencakup integrasi sistem perencanaan, anggaran dan penilaian kinerja secara elektronik untuk pengendalian perencanaan.

5.2 HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

TKDD merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur/ fisik untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional. Selain dari TKDD, pembangunan daerah juga didukung alokasi APBN melalui DIPA satuan kerja Kementerian/ Lembaga. Selain itu, pelaksanaan pembangunan/ proyek tersebut semaksimal mungkin dilaksanakan dengan skema padat karya. Hal ini mendukung percepatan pemulihan ekonomi regional di masa pandemi.

5.2.1 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

Dalam pembangunan infrastruktur di daerah, pemerintah pusat mengalokasikan belanja modal melalui DIPA K/L dan dana transfer berupa DAK Fisik. Tampak dalam tabel 5.1 capaian output dan realisasi anggaran untuk keselarasan antara belanja K/L dengan DAK Fisik.

Tabel 5.1. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik Kaltim 2021 (juta Rp)

Kategori	K/L	
	Capaian Output	Realisasi Anggaran
Jalan Nasional	Jalan 77,403 km	543.764,2
Irigasi	Irigasi 53 Unit	4.632,7
Sanitasi	Sistem Pengolahan Persampahan 19.648 KK	27.857,9
Pasar	-	-
UMKM	-	-
SPAM Air Bersih	SPAM 100 SR	21.795,3
Bantuan Perumahan	Bantuan Rumah 895 Unit	41.580,0
Bidang	**DAK Fisik**	
	Capaian Output	**Realisasi Anggaran**
Jalan	Jalan 50,21 km	383.010,1
Irigasi	Irigasi 299,79 Rehabilitasi 1.380,5 ha	31.134,0
Sanitasi	Pembangunan Tangki Septik 1.766 Unit	28.312,7
Pasar	-	-
Sentra UMKM	Revitalisasi Sentra IKM 2	3.477,7
Air Minum	Pembangunan IPA 4.628 SR	62.342,1
Permukiman	Bantuan Rumah 219 Unit	28.132,5

Sumber : Aplikasi MEBE dan OMSPAN, 2022 (diolah).

Jalan Nasional

Pembangunan jalan nasional dengan jalan provinsi/ kab./ kota pada tahun 2021 terealisasi total sepanjang 127,6 km dengan dana Rp926,77 miliar. Program strategis penanganan jalan di Kalimantan Timur berfokus pada penambahan kemantapan jalan, penyelesaian program konektivitas jalan perbatasan dan penyiapan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN). Tingkat kemantapan jalan di Kalimantan Timur saat ini masih paling rendah di seluruh Indonesia yaitu sebesar 79 persen. Oleh karena itu, semua kontrak pekerjaan dijadikan *multi years contract* (MYC) agar terus berkelanjutan sehingga bisa mencapai target pada tahun 2024 yaitu kemantapan jalan di atas 90 persen.

Irigasi

Realisasi pembangunan irigasi di Kaltim terdapat pada belanja K/L dan DAK Fisik. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat tumpang tindih sehingga telah berjalan sesuai dengan perencanaannya. Jaringan irigasi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pengairan lahan sektor pertanian dan perkebunan. Jaringan irigasi di Kab. Kutai Kartanegara terintegrasi dengan bendungan Marangkayu yang telah selesai dibangun dan diproyeksikan untuk pengembangan dan peningkatan daerah irigasi Marangkayu. Luas potensinya mencapai 3.000 ha dengan sistem tadah dan irigasi desa.

Sanitasi

Dari bidang sanitasi, belanja K/L diarahkan untuk penanganan sampah sedangkan DAK Fisik untuk pembangunan tangki septik. Penanggulangan sampah dan pembuatan tangki septik tersebut ditujukan untuk peningkatan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat.

UMKM

Tidak terdapat realisasi belanja infrastruktur K/L untuk UMKM sedangkan dari DAK Fisik realisasi untuk revitaslisasi sentra UMKM/ IKM sebesar Rp3,47 miliar. Realisasi tersebut digunakan untuk merevitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Balikpapan.

SPAM Air Bersih/ Air Minum

Pembangunan sistem penyediaan air minum dan instalasi pengolahan air merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Realisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik sudah selaras dan diperuntukkan penanggulangan kemiskinan dan penurunan *stunting*. Salah satunya adalah pembangunan SPAM jaringan perpipaan sebesar 800SR yang telah terselesaikan 100 persen.

Bantuan Perumahan/ Pemukiman

Sebagai kebutuhan primer masyarakat, pemerintah terus berupaya memberikan/ menyediakan perumahan/ pemukiman yang layak bagi rakyatnya. Di Kaltim pada tahun 2021 telah direalisasikan baik dari belanja K/L mupun DAK Fisik sebesar Rp69,71 miliar yang digunakan untuk bantuan 1.114 unit rumah.

Kesimpulan

Secara umum, belanja K/L dengan DAK Fisik telah selaras, walaupun masih terdapat beberapa catatan perbaikan kedepannya yaitu: 1.Di bidang UMKM masih belum ada dukungan dari belanja K/L, padahal UMKM merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Selain itu, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian regional;

2.Konektivitas masih menjadi permasalahan utama di Kaltim sehingga perlu percepatan pembangunan/ perbaikan jalan; dan 3.Akselerasi belanja terutama DAK Fisik yang pelaksanaan proyeknya relatif lebih lambat daripada belanja K/L.

5.2.2 Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik

Tabel 5.2. Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik Kaltim 2021 (juta Rp)

Kategori	K/L	
	Capaian Output	Realisasi Anggaran
Belanja Sektor Pendidikan	Penerima BOS 16.758 Orang	18.970,3
Bidang	**DAK Nonfisik**	
	Capaian Output	**Realisasi Anggaran**
Bantuan Operasional Sekolah	Penerima BOS	892.064,5

Sumber : Aplikasi MEBE dan OMSPAN, 2022 (diolah).

Realisasi belanja K/L dan DAK Nonfisik di Kaltim berupa bantuan operasional sekolah (BOS). Pada dasarnya, BOS digunakan untuk kemanfaatan belajar bagi seluruh peserta didik yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan amanat program wajib belajar. Jadi, bukan semata untuk sekolahnya, tapi untuk siswa yang bersekolah di tempat itu. Sebab, basis perhitungan besaran BOS berdasarkan jumlah murid. Total realisasi belanja K/L dan DAK Nonfisik mencapai Rp911,03 miliar. Secara realisasi dan keselarasan antara belanja K/L dan DAK Nonfisik tidak terdapat masalah. Namun demikian, dalam pelaksanaan penyaluran BOS tersebut masih terdapat kendala yaitu:

1. Adanya polemik dana BOS tidak turun untuk sekolah dengan murid dibawah 60 anak. Meski ada pengecualian sekolah dengan kondisi tertentu dalam Permendikbudristek Nomor 6/2021, namun dalam penetapannya dapat memperpanjang birokrasi penyaluran BOS;
2. Penyaluran dana BOS terkendala inkonsistensi data rekening sekolah yang menyebabkan terjadi retur atau gagal transfer; dan
3. Penyalahgunaan sistem informasi sehingga dana BOS tidak tepat sasaran/ tidak tepat jumlah.

5.2.3 Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

Tabel 5.3. Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa Kaltim 2021 (juta Rp)

Kategori	K/L	
	Capaian Output	Realisasi Anggaran
Jalan Nasional	Jalan 77,403 km	543.764,2
Irigasi	Irigasi 53 Unit	4.632,7
Sanitasi	Sistem Pengolahan Persampahan 19.648 KK	27.857,9
Pasar	-	-
SPAM Air Bersih	SPAM 100 SR	21.795,3
Embung Pertanian	Embung 5 Unit	600,0
Jembatan	Jembatan 410 m	82.588,7
Infrastruktur Permukiman	Permukiman 14 ha	43.460,6
Bidang	**Dana Desa**	
	Capaian Output	**Realisasi Anggaran**
Jalan Desa	Jalan 31,355 km	25.628,8
Irigasi	Saluran Irigasi 9,739 km	1.053,1
MCK	MCK 574 Unit	4.348,1
Pasar	Pasar 47 Unit	1.896,4
Air Bersih	Sumber Air 3.348 Unit	9.336,2
Embung Desa	Embung Desa 9 Unit	858,5
Jembatan Desa	Jembatan 689 Unit	21.067,6
Sanitasi Pemukiman	Selokan 3,618 km	2.564,6

Sumber : Aplikasi MEBE dan OMSPAN, 2022 (diolah).

Harmonisasi belanja K/L dengan Dana Desa tampak pada tabel 5.3. Hampir semua kategori/ bidang pada belanja K/L terdapat juga pada Dana Desa. Hal ini

mengindikasikan bahwa belanja K/L dengan Dana Desa telah selaras dan sejalan. Namun demikian apabila ditelisik lebih jauh maka masih terdapat beberapa tantangan/ permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Secara alokasi memang terdapat keselarasan antara belanja K/L dan Dana Desa, namun lokasi pembangunan/ proyek seringkali tidak tekoneksi misalnya jalan. Walaupun dimungkinkan adanya keterbatasan dana sehingga tidak mungkin membangun seluruh jalan nasional/ daerah dalam waktu yang bersamaan;
2. Penyaluran Dana Desa relatif lambat sehingga kurang mendukung proyek-proyek K/L, terlebih proyek yang beririsan atau secara lokasi berdekatan.

5.3 HARMONISASI BELANJA PUSAT DAN DAERAH BERBASIS PRIORITAS NASIONAL PADA RPJMN/D

5.3.1 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 2

Tabel 5.4. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis PN 2 pada RPJMN/D 2021

PN	MP	Target 2021	Belanja Pusat (K/L)	Lokasi	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah
PN 2	Pem-bangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN	Kemen LHK	PPU dan Kukar	Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya P: Rp300.100.000 R: Rp175.133.300 Output 1.500 Hektar	Belum ada data
		Pelepasan Kawasan Hutan	Kemen LHK		Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Pagu Rp1.103.317.000 Realisasi Rp1.097.099.225 Capaian Output 64.814 Hektar Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem P: Rp4.745.300.000 R:Rp4.633.357.715 Output 1 Hektar	Belum ada data
		Peninjauan Kembali RTRWN Penyusunan Matek RDTR dan Fasilitasi Legislasi RTR	Kemen ATR/BPN			Belum ada data
		Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas TNI/Polri, Kemenhan	TNI/Polri, Kemenhan			Belum ada data
		Pembangunan Infrastruktur di Kawasan IKN (Jalan akses, Infrastruktur SDA)	Kemen PUPR		Jembatan Pulau Balang P: Rp143.296.882.000 R: Rp143.296.880.902 Output 45 m Bendungan Sepaku Semoi P: Rp198.400.000.000 R: Rp198.400.000.000 Output 1 Unit	Belum ada data

Sumber : Aplikasi MEBE, RPJMN, RPJMD, RKPD PPU dan Kukar, 2022 (diolah).

Pemindahan IKN ke wilayah Kaltim diharapkan menjadi pemantik peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim. Oleh karena itu, pemindahan tersebut harus didukung semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah, serta seluruh masyarakat terutama di Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Penajam Paser Utara yang sebagian wilayahnya akan menjadi IKN.

1. Sampai dengan akhir tahun 2021 belum ada kontribusi Kab. Kukar dalam rangka pemindahan IKN. Namun demikian, pada RPJMD Kukar Tahun 2021-2026 terdapat agenda dukungan pembangunan terkait IKN yaitu penyiapan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.

   Arah kebijakan dalam mendukung agenda dimaksud yaitu:

   a. penyiapan RTRW sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN.
   b. pembangunan prasarana dan sarana konektivitas wilayah.

   Kebijakan ini juga telah ditetapkan *milestone* target serta penanggungjawabnya. Namun agenda dukungan pembangunan IKN yang tercantum pada RPJMD belum diselaraskan dengan RPKD Kukar tahun 2022.
2. Prioritas pembangunan PPU terkait IKN yang tercantum pada RKPD PPU Tahun 2022 yaitu Pengembangan infrastruktur strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas pusat-pusat produksi. Namun demikian, prioritas pembangunan PPU terkait IKN belum ditetapkan secara detail penanggung jawab dan *milestone* targetnya. Pada tahun 2021, terdapat belanja modal pembangunan jalan yang bekerja sama dengan PT. SMI dalam hal pendanaan. Akan tetapi dalam pembangunan jalan tersebut tidak ada pernyataan mendukung IKN dalam dokumen anggarannya walaupun menghubungkan lokasi IKN dengan daerah sekitarnya.
3. Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kab. PPU telah selesai 100 persen. Namun demikian, masih terdapat kendala disisi Kota Balikpapan yaitu belum selesainya pembebasan lahan untuk jalan yang terhubung dengan jembatan tersebut.

5.3.2 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 3

Tabel 5.5. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis PN 3 pada RPJMN/D 2021

PN	MP	Target 2021	Belanja Pusat (K/L)	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah
PN 3	Penguatan Sistem Kesehatan Nasional	Memperkuat sistem kesehatan nasional untuk memperkuat upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sumber daya kesehatan dan tenaga kesehatan.	Kemenkes, BPOM, Kemenhan/ TNI, Polri, Kemenristek, Kemendikbud, KemenPANRB	Pengadaan Alat Kesehatan P: Rp7.295.748.000 R: Rp1.992.131.673 Output 17 Unit Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes P: Rp10.011.548.000 R: Rp9.747.349.467 Output 3 Paket Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan P: Rp4.765.171.000 R: Rp4.764.839.640 Output 1 Paket	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Pa: Rp1.570.581.793 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan P: Rp5.642.233.794 Program Penanggulanan Kemiskinan Bidang Kesehatan P: Rp56.306.351.052

PN	MP	Target 2021	Belanja Pusat (K/L)	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah
PN 3	Project Percepatan Penurunaan Kematian Ibu dan Stunting	Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 217/100k kelahiran hidup	Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud, Kemen PUPR, BPOM, Kemendagri, 14 K/L Lainnya, serta pemda	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi P: Rp1.174.571.000 R: Rp1.158.994.749 Output 454 PIK Remaja dan BKR Orientasi Program Penyakit HIV AIDS dan PIMS P: Rp1.194.299.000 R: Rp1.194.150.000 Output 160 Orang	Perbaikan Gizi Masyarakat P: Rp1.047.140.000 Peningkatan Kesehatan Masyarakat P: Rp972.859.600 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular P: Rp2.000.000.000
		Prevalensi stunting pada balita menurun 21,10%		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat P: Rp568.178.000 R: Rp564.677.250 Output 35 Orang Kampung Keluarga Berkulaitas (KB) percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga P: Rp242.970.000	Penurunan Stunting P: Rp2.990.063.000
PN 3	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatkan proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%	Kemendikbud, Kemnaker, Kemenperin, Kemenko Perekonomian	Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas P: Rp8.806.395.000 R: Rp8.800.718.930 Output 1 Unit Sertifikasi Lompetensi Tenaga Kerja P: Rp2.217.218.283 R: Rp2.217.218.283 Output 2.209 Orang Kerjasama antar Lembaga Pelatihan dengan Perusahaan/ Industri P: Rp471.054.000 R: Rp467.207.730 Output 15 Kesepakatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja P: Rp1.885.000.000

Sumber : Aplikasi MEBE, RPJMN, RPJMD, RKPD Kaltim, 2022 (diolah).

Pada Prioritas Nasional (PN) 3 yang tercantum pada RPJMN yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mendukung pencapaian target pada tahun 2021 melalui pengalokasian anggaran. Pemerintah pusat secara total telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,67 miliar dan telah teralisasi Rp14,64 miliar atau 99,8 persen. Sedangkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,89 miliar atau 60,62 persen dari total anggaran pemerintah pusat.

Pemerintah pusat maupun daerah sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya dari sisi kesehatan namun juga dari aspek pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah telah selaras dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan manusia.

5.3.3 Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah pada PN 5

Tabel 5.6. Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah Berbasis PN 5 pada RPJMN/D 2021

PN	MP	Target 2021	Belanja Pusat (K/L)	Capaian Belanja Pusat	Capaian Belanja Daerah
PN 5	Proyek Prioritas Strategis dalam Proyek Prioritas Infrastsruktur Pelayanan Dasar	Rumah susun Perkotaan (1 Juta)	Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta/Dunia Usaha	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya P: Rp41.580.000.000 R: Rp41.580.000.000 Output 2.081 Unit Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman P: Rp6.040.531.000 R: Rp6.040.531.000 Output 895 Unit	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta Pembinaan dan Pendampingan Penerapan Sanitasi Sehat P: Rp43.000.000.000
		Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis	Kemen PUPR, LHK	Pengendalian banjir Sungai yang dibangun P: Rp62.537.278.000 R: Rp62.537.274.000 Output 1 km	
		Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% Rumah Tangga)	Kemen PUPR, Kemenkes, Kemendagri pemda,csr dan masyarakat	Domestik Setempat Skala Individu P: Rp11.257.996.000 R: Rp11.256.415.330	
		Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)	Kementerian PUPR, Pemda	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat P: Rp13.662.270.000 R: Rp13.049.414.113 Output 3.280 SR	Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum P: Rp110.000.000.000

Sumber : Aplikasi MEBE, RPJMN, RPJMD, RKPD Kaltim, 2022 (diolah).

Harmonisasi belanja pusat-daerah pada PN ke-5 tampak pada tabel 5.6. Dari pemerintah pusat telah merealisasikan pembangunan rumah susun, pemulihan daerah aliran sungai, perbaikan sanitas dan pembangunan infrastruktur air minum. Sedangkan dari pemerintah daerah terdapat alokasi untuk bantuan perumahan dan peningkatan layanan air minum. Walaupun belum sepenuhnya sama, namun dari beberapa proyek tersebut telah ada keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur dasar.

5.4 Tantangan dan Evaluasi

Pelaksanaan HKPD dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk membangun hubungan keuangan yang harmonis dan selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Tabel 5.7. Tantangan dan Evaluasi dalam HKPD

Tantangan/ Masalah	Pemerintah	Explanation	Solution
Desentralisasi fiskal	Pusat	Desentralisasi fiskal belum mampu memberikan dorongan pertumbuhan dan pemerataan, serta layanan publik.	Diperlukan evaluasi mendasar atas pelaksanaan desentralisasi fiskal.
	Daerah	Pelaksanaan desentralisasi fiskal belum efektif. Hal ini ditandai dengan indikator pelaksanaan kualitas belanja daerah belum optimal. Salah satu indikatornya adalah: belanja pegawai rata-rata adalah 45% dari DAU, dan pada alokasi belanja modal sekitar 10-15%.	Perlu ada pengaturan terkait dengan realokasi dan redistribusi dalam penganggaran, dengan menitikberatkan belanja modal/ infrastruktur dalam pembangunan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah secara umum masih sangat kecil sehingga tergantung kepada dana transfer (TKDD) dari Pemerintah Pusat. 2. Adanya ketimpangan penerimaan daerah antara daerah kaya/ penghasil dan bukan daerah penghasil.	Membangun daerah berdasar keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan upaya menggali pendapatan (*revenue generating*).
Alokasi belanja pegawai	Pusat	Alokasi untuk belanja pegawai masih cukup tinggi.	Melakukan transisi untuk rasionalisasi belanja pegawai.
	Daerah	Alokasi belanja pegawai bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan porsi yang masih cukup tinggi dibandingkan alokasi belanja yang lain.	Melakukan transisi untuk rasionalisasi jumlah pegawai.
Alokasi belanja modal/ infratsuktur	Pusat	Masih rendah karena terkonsentrasi pada belanja pegawai dan belanja barang.	Meningkatkan belanja modal/ infrastruktur.
	Daerah	Masih rendah karena	Meningkatkan belanja

		terkonsentrasi pada belanja barang dan belanja pegawai.	modal/ infrastruktur, untuk memberikan dorongan multiplier effect dalam pembangunan ekonomi,
Perpajakan	Pusat	*Tax ratio* masih di bawah 13%, mengindikasikan bahwa jumlah penerimaan perpajakan terhadap GDP termasuk masih rendah.	Meningkatkan kualitas administrasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan *law enforcement* dalam perpajakan nasional.
	Daerah	Melakukan peningkatan kualitas penerimaan perpajakan daerah, yang menjadi kewenangan daerah, namun tidak mendistorsi iklim investasi/ ekonomi di daerah.	Dalam hal pembagian kewenangan pemungutan pajak pusat/ daerah, diperlukan evaluasi untuk peningkatan pendapatan daerah, namun integrated dan tidak mendistorsi perekonomian daerah/ nasional.
Sumber Daya Alam (SDA)	Pusat	1. Ketergantungan terhadap *raw material* sumber daya alam (SDA). 2. Diperlukan inovasi peningkatan pendapatan selain yang bersumber dari SDA.	Pengembangan inovasi sumber pendapatan negara selain dari SDA.
	Daerah	1. Ketergantungan terhadap *raw material* sumber daya alam (SDA). 2. Diperlukan inovasi peningkatan pendapatan selain yang bersumber dari SDA.	Pengembangan inovasi sumber pendapatan daerah selain dari SDA.
Sumber Daya Manusia (SDM)	Daerah	Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam implementasi desentralisasi masih perlu untuk ditingkatkan.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Decentraliztion Fiscal Asymmetric	Pusat	Pemerintah Pusat dihadapkan pada disintegrasi kewilayahan	Memetakan kembali pelaksanaan kebijakan

		yang perlu diselesaikan secara politik.	*fiscal asymmetric* dalam peningkatan kualitas *output* dan *outcome*.
	Daerah	Pemerintah daerah, utamanya daerah penghasil SDA/ penyumbang pendapatan, dihadapkan pada fenomena *inequality treatment/ inequity* dalam pelaksanaan *fiscal asymmetric*.	Akselerasi target output pembangunan bagi daerah khusus dengan periodisasi yang terukur, sehingga aspek *subsidiaritas* dilaksanakan secara terukur.
Utang Daerah	Pusat	1. Pemerintah pusat melakukan *sharing* pendapatan secara adil dan berimbang, melalui diantaranya dana transfer (TKDD) kepada daerah dengan memperhatikan besaran APBN. 2. Untuk menyelenggarakan pembangunan yang ekspansif, Pemerintah melakukan pembiayaan dalam bentuk utang yang besarannya dibatasi oleh Undang-Undang.	*Sharing* pendanaan pembangunan di daerah melalui penerbitan utang daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
	Daerah	Keterbatasan dana TKDD perlu ditanggulangi dengan pembiayaan dalam bentuk utang daerah untuk kegiatan dengan tingkat produktivitas pengembalian pinjaman yang menjamin *fiscal sustainability* di daerah.	Melakukan pembiayaan pembangunan daerah diantaranya dengan menebitkan utang daerah yang menjamin *fiscal sustainability*.
Institusi formal dan informal	Pusat	*Mindset* pengelolaan institusi formal/ informal oleh *actors* dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik secara nasional perlu ditingkatkan.	Meningkatkan kapasitas dan *mindset* dari *actors* pengelola institusi formal/ informal dalam pembangunan nasional.
	Daerah	*Mindset* pengelolaan institusi	Meningkatkan kapasitas

		formal/ informal oleh para *actors* di daerah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik perlu ditingkatkan.	dan *mindset* dari *actors* pengelola institusi formal/ informal dalam pembangunan daerah.

Sumber: Muhdi, Lentera Bumi Etam Vol. 1 No. 5 September 2021, 2022.

Sengkarut *fiscal federalism* dengan indikator *fiscal imbalance, fiscal gap, fiscal difference, fiscal asymmetric*; mempersepsikan bahwa fenomena *fiscal conundrum* merupakan permasalahan dalam pengelolaan fiskal dan HKPD sebuah negara. *Conundrum* diterjemahkan sebagai: *//seemingly unanswerable question or problem, frequently applied to heady dilemmas involving ethics, sociology, or economics//*. Menyikapi hal tersebut, para pengambil kebijakan publik mengambil *pattern* yang tidak selalu *ajeg*, tidak terdapat formulasi baku yang sifatnya "*one size fits all*". Implementasi desentralisasi –termasuk d*esentralisasi asimetris*, *critical point*-nya bukan pada *preference* pemberian otonomi yang lebih besar dengan anggaran yang menyertainya (*money follow function*), tetapi desentralisasi dengan otonomi yang disesuaikan dengan kemampuan daerah (*regional capacity*) pada banyak aspek. Makna desentralisasi juga bukan berhenti pada membagi kekuasaan/ memberi kewenangan itu sendiri, tetapi lebih dimaknai sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan masyarakat, dan indikator lainnya.

Begitu juga dengan UU HKPD yang dimaknai sebagai solusi atas desentralisasi fiskal. Harmonisasi/ sinkronisasi maupun keselarasan dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengejawantahkan tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

5.5 Perbandingan Keuangan Daerah

Untuk memberikan informasi tambahan akan kondisi makro dan kesejahteraan rakyat serta keuangan daerah berdasarkan struktur perkonomian regional, diambil sampel dua kabupaten/ kota. Kota Balikpapan dengan lapangan usaha utama sektor industri pengolahan dengan *share* sekitar 47,28 persen dan Kab. Kutai Kartanegara dengan sektor pertambangan dan penggalian dengan *share* 59,81 persen terhadap PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto) PDRB periode 2016-2020 (ADHB triliun Rp)

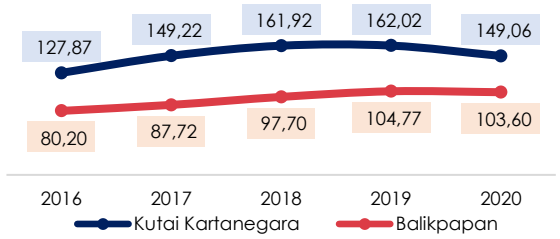

Laju PDRB/ Pertumbuhan Ekonomi periode 2016-2020 (yoy)

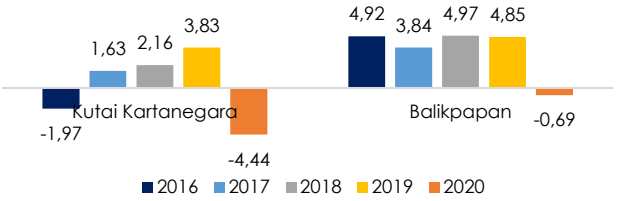

Persentase Penduduk Miskin periode 2016-2020 (Persen)

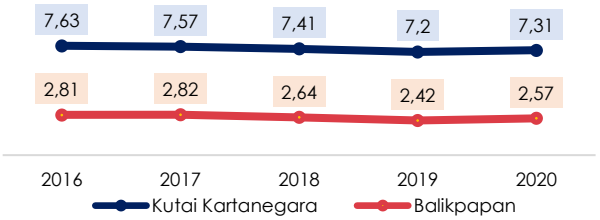

Rasio Gini periode 2016-2020 (Indeks)

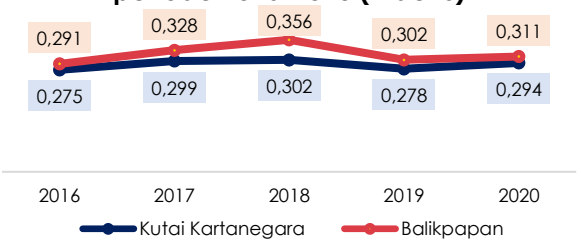

Tingkat Pengangguran Terbuka periode 2016-2020 (Persen)

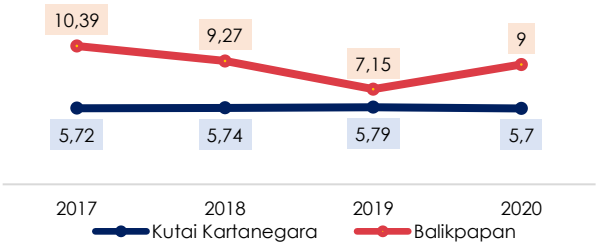

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2016-2020 (Indeks)

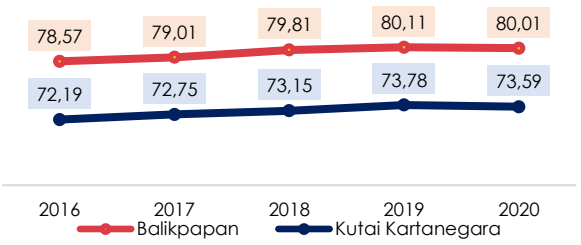

Rasio PAD

$$Rasio\ PAD = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

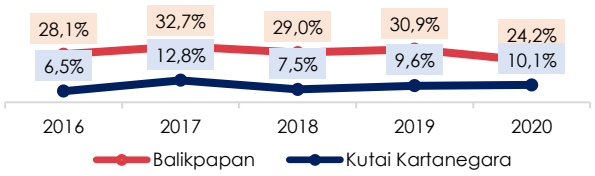

Rasio Kemandirian

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer}$$

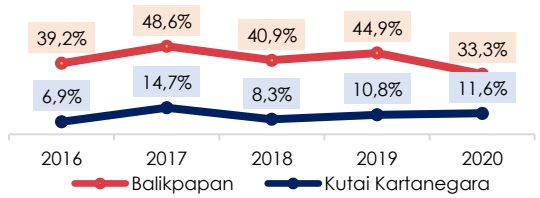

Rasio Dana Transfer

$$Rasio\ Dana\ Transfer = \frac{\text{Total Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$$

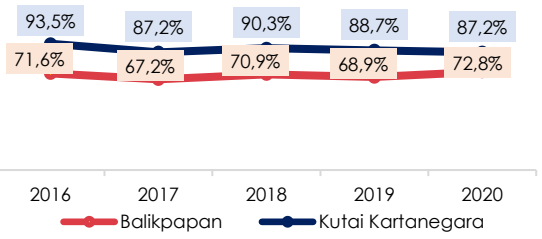

Kriteria Kemandirian Keuangan

Kriteria Kemandirian Keuangan	% Kemandirian
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : BPS Kaltim, LKPK Kanwil DJPb Kaltim, 2022 (diolah).

BAB VI

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks kesejahteraan masyarakat Kaltim yang tercermin dari **IPM mengalami peningkatan** dalam beberapa tahun terakhir, walaupun sempat tertahan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sedangkan, secara spasial per kabupaten/ kota, **IPM di Kaltim masih belum merata** dengan wilayah kota jauh lebih tinggi daripada wilayah kabupaten.

BAB VI

ANALISIS TEMATIK

Peran Fiskal dalam Peningkatan Kualitas SDM, Analisis Indeks Pembangunan Manusia

6.1 PENDAHULUAN

6.1.1 Latar Belakang

United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hakiki dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan pembangunan harus fokus pada manusia itu sendiri sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Namun hal ini seringkali terlupakan dan menganggap keberhasilan dari pembangunan hanya berorientasi pada aspek ekonomi.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia, UNDP pada tahun 1990 telah memperkenalkan konsep *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dari ketiga dimensi tersebut diturunkan lagi menjadi empat indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), usia harapan hidup (UHH) dan pengeluaran per kapita.

Di tingkat nasional, capaian IPM di tahun 2021 sebesar 72,29 atau meningkat 0,49 persen dibanidngkan dengan tahun lalu. Walaupun selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2010 dengan rata-rata kenaikan 0,78 persen per tahunnya, namun demikian IPM Indonesia masih berada di peringkat 107 dari 189 negara di dunia (berdasarkan IPM tahun 2020). Hal ini merupakan tantangan kedepan untuk meningkatkan pembangunan manusia secara nasional.

Tabel 6.1. Perbandingan Sasaran dan Capaian IPM Nasional dan Kaltim 2021

Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran Nasional	Realisasi Nasional	Sasaran Kaltim	Realisasi Kaltim
HLS	13,40	13,08	14,34	13,81
RLS	8,85	8,54	9,60	9,84
UHH	-	71,57	73,76	74,61
Pengeluaran per Kapita	-	11.156	-	12.116

Sumber : RPJMN, RPJMD dan BPS Kaltim, 2022 (diolah).

Apabila dilihat di tingkat regional Kaltim, capaian IPM di tahun 2021 telah memenuhi target/ sasaran yang telah ditetapkan. Capaian IPM Kaltim juga berada di atas capaian nasional. Namun demikian, bukan

berarti pembangunan manusia di Kaltim sudah sempurna dan tanpa masalah. Apabila dilihat per indikator, maka ada satu indikator yang belum memenuhi sasaran yang telah ditetapkan yaitu indikator HLS.

Selain itu, permasalahan IPM juga timbul manakala dilihat secara spasial per kabupaten/ kota. Ketidakmerataan IPM di seluruh wilayah Kaltim menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Dari perspektif lain, pembangunan manusia di Kaltim juga belum merata jika dilihat dari segi gender/ jenis kelamin. Berbagai tantangan inilah yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya melalui instrumen kebijakan fiskal. Harmonisasi kebijakan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Analisis yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh belanja pemerintah baik pusat maupun daerah yang tercermin dari APBN dan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model data panel dimana pendekatan ini membutuhkan data yang terukur.

Penelitian ini dibatasi dalam suatu kerangka pikir, kondisi dan waktu sebagai berikut:

1. Penjelasan pada studi yang berfokus pada pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang dikelompokkan berdasarkan fungsi dan kondisi perekonomian daerah (PDRB dan UMR) serta kesejahteraan masyarakat melalui IPM sebagai proksi.
2. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Timur.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa:
   a. Pengeluaran pemerintah baik APBN maupun APBD kabupaten/ kota se-Kaltim (kecuali Provinsi Kalimantan Timur) berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) yang diperoleh dari Aplikasi MEBE dan SIKD.
   b. IPM seluruh kabupaten/ kota se-Kaltim (kecuali Provinsi Kalimantan Timur) dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) dari BPS Prov. Kaltim.
4. Rentang waktu tahun 2016-2020 berdasarkan pertimbangan keterkinian (*update*), akurasi yang lebih baik, dan kondisi ideal jangka waktu (5 tahun sering diasosiasikan sebagai jangka waktu menengah. Selain itu, berdasarkan kelengkapan data kesejahteraan masyarakat dan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah per fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
5. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel.

6.1.3 Studi Literatur

Teori Keagenan

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen

(dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Jensen and Meckling, 1976).

Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan (*representativeness*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus) (Abdullah, 2015).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut J.M. Keynes (1936), peranan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian masih sangat diperlukan dikarenakan apabila perekonomian sepenuhnya diatur olah kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Hal ini terjadi karena fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan tingkat harga.

Peranan pemerintah dalam perekonomian diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional (Sukirno, 2010).

Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya "redistribusi pendapatan", merujuk pada sejumlah negara berkembang yang telah mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita relatif tinggi tapi pada saat bersamaan menunjukkan sedikit perbaikan bahkan penurunan dalam masalah tingkat pengangguran, ketimpangan dan pendapatan riil dari 40% populasinya (Todaro, 2012). Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselarasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya Sen (1998) dalam (Todaro, 2012) mengatakan "pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan, namun haruslah lebih ke upaya peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati". Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik merupakan tujuan akhir dari setiap program pembangunan. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas

sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 menyusun indeks komposit pengukuran kesejahteraan sebagai tindak lanjut terhadap ukuran yang telah diperkenalkan (Morris, 1979) tentang *Physical Quality Life Index* (PQLI) yang lazim diterjemahkan sebagai Indeks Kualitas Hidup (IKH). Indikator kesejahteraan tersebut terdiri atas:

1. Angka harapan hidup (*life expectancy at age 0 : e*0);
2. Angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate :* Lit) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling:* MYS);
3. *Purchasing Power Parity* (merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli).

Indikator dasar tersebut dikombinasikan dalam suatu indeks – menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) – menjadi HDI (*Human Development Index*) atau di Indonesia disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu manfaat HDI adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi pula (Todaro, 2012).

6.1.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel. Selanjutnya berdasarkan olah data melalui *software* STATA dilakukan uji sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif
   Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti, mencakup nilai rata-rata (*mean)*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.
2. Uji Analisis Korelasi
   Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan skala tertentu. Koefesien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefesien korelasi diketemukan tidak sama dengan nol (0), maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefesien korelasi diketemukan +1 maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (*slope*) positif. Jika koefesien korelasi diketemukan -1 maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (*slope*) negatif.

3. Uji Analisis Regresi

Uji analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi data panel karena data yang terbentuk berdasarkan *time series* (runut waktu), yakni selama 5 tahun (2016-2020) dan *cross section* (jumlah obyek wilayah) yakni 10 Kab/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu (Gujarati, 2003). Menurut (Gujarati, 2003) terdapat keunggulan apabila melakukan analisis data panel yaitu data panel memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik.

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Pada regresi data panel menurut (Widarjono, 2007), uji asumsi klasik akan dibutuhkan tergantung model terpilih dari teknik regresi data panel yang dihasilkan. Pada teknik regresi data panel terdapat 3 (tiga) model pendekatan yakni: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Setelah model terpilih berdasarkan pendekatan tersebut barulah pengujian asumsi klasik dilakukan dan bersifat tidak seluruhnya.

6.2 PERKEMBANGAN IPM DAN BELANJA PEMERINTAH

6.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Kaltim menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, capaian IPM tersebut tidak selalu mencapai target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kaltim terutama di tahun 2017 dan 2018 yang masih mengacu pada RPJMD periode 2014-2018.

Tabel 6.2. Perkembangan Sasaran dan Capaian IPM Nasional dan Kaltim 2017-2021

IPM	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran Kaltim	77,42	78,00	75,30	75,43	75,56
Capaian Kaltim	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88
Capaian Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : BPS dan RPJMD Kaltim 2019-2023, 2022 (diolah).

Akan tetapi dalam tiga tahun terakhir capaian IPM Kaltim selalu berhasil melebihi target. Salah satu faktor yang mendukung ketercapaian IPM Kaltim terhadap targetnya adalah adanya penurunan target di RPJMD periode 2019-2023. Penurunan target tersebut disesuaikan dengan kondisi terkini Kaltim dan mengakomodir adanya pemekaran wilayah baru yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Capaian IPM Kaltim juga selalu di atas IPM nasional dalam lima tahun terakhir, dan selalu menjadi yang tertinggi di regional Pulau Kalimantan. IPM Kaltim menduduki

posisi ketiga secara nasional di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Tabel 6.3. Perkembangan IPM per Indikator Kaltim 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
HLS	13,49	13,67	13,69	13,72	13,81
RLS	9,36	9,48	9,7	9,77	9,84
UHH	73,7	73,96	74,22	74,33	74,61
Pengeluaran per Kapita	11.612	11.917	12.359	11.728	12.116

Sumber : BPS kalitim, 2022 (diolah).

Apabila dilihat lebih dalam, per indikator pembentuk IPM, maka hampir semua indikator sejalan dengan kenaikan IPM Kaltim. Hanya satu indikator yanitu pengeluaran per kapita yang sedikit tertahan di tahun 2020, namun kembali naik di tahun 2021. Hal tersebut terjadi akibat dampak pandemi Covid-19, dimana kemiskinan dan pengangguran meningkat sehingga menurunkan kualitas manusia pada aspek ekonomi.

Reaksi cepat pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menggelontorkan dana/ bantuan sosial melalui program PC-PEN telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya terlihat dari indikator pengeluaran.

Tabel 6.4. Perkembangan Capaian IPM Kab./ Kota se-Kaltim 2017-2021

Kabupaten/ Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	71,16	71,61	72,29	72,04	72,93
Kutai Barat	70,18	70,69	71,63	71,19	72,07
Kutai Kartanegara	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06
Kutai Timur	71,91	72,56	73,49	73,00	73,81
Berau	73,56	74,01	74,88	74,71	75,20
Penajam Paser Utara	70,59	71,13	71,64	71,41	72,01
Mahakam Ulu	66,09	66,67	67,58	67,09	67,95
Balikpapan	79,01	79,81	80,11	80,01	80,71
Samarinda	79,46	79,93	80,20	80,11	80,76
Bontang	79,47	79,86	80,09	80,02	80,59
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88

Sumber : BPS kalitim, 2022 (diolah).

Secara parsial per kabupaten/ kota, kinerja IPM juga menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Capaian IPM tertinggi terdapat di Kota Samarinda sebesar 80,76 dan yang terendah di Kab. Mahakam Ulu yang mencapai 67,95, sedangkan capaian IPM tingkat Provinsi Kaltim berada pada level 76,88. Predikat IPM sangat tinggi (IPM>80) terdapat di tiga kota yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang sekaligus lebih tinggi daripada capaian IPM tingkat provinsi. Disisi lain, untuk wilayah yang berupa kabupaten capaian IPM nya masih lebih rendah dari tingkat provinsi. Selain itu, satu kabupaten yaitu Kab. Mahakam Ulu masih berada pada level IPM sedang (60<IPM<70), sedangkan kabupaten lainnya sudah berada pada kriteria tinggi (70<IPM<80).

Tantangan kedepan adalah bagaimana memeratakan pembangunan manusia baik di kota maupun kabupaten terutama dari aspek kesehatan dan pendidikan. Khusus untuk Kab. Mahakam Ulu yang merupakan kabupaten termuda di Kaltim, pembangunan manusia ini harus diakselerasi disemua aspek. Keterbatasan sumber daya yang ada di Mahakam Ulu harus lebih diperhatikan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, utamanya dalam hal aksesibiltas dan konektivitas antar wilayah dari dan menuju Kab. Mahakam Ulu.

6.2.2 Belanja Pemerintah untuk Meningkatkan IPM

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah dan akan terus mengalokasikan dana untuk peningkatan pembangunan manusia. Hal tersebut sesuai dengan konsep Nawacita jilid II di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, yaitu

pembangunan bukan hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga aspek manusianya.

6.2.2.1 Belanja Pusat Menurut Fungsi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi

Belanja pemerintah pusat yang digelontorkan melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh penjuru tanah air. Sesuai dengan dimensi pembentuk IPM, maka belanja APBN juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Grafik 6.1. Proporsi Belanja APBN Kaltim per Fungsi 2016-2020 (miliar Rp)

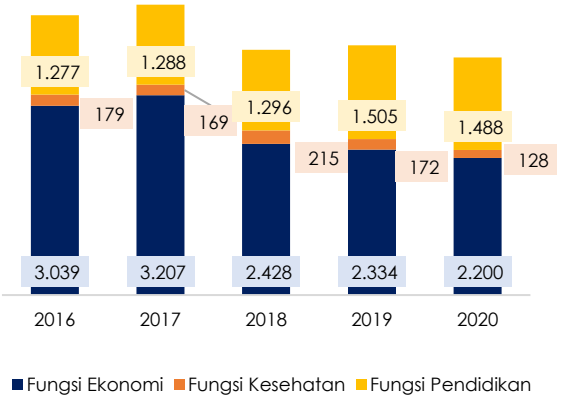

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Tren total belanja fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan di Kaltim mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penurunan tersebut, utamanya terdapat di fungsi ekonomi dengan jumlah penurunan belanja yang signifikan terjadi di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Untuk dua fungsi yang lain terjadi fluktuasi dengan fungsi kesehatan cenderung menurun, sebaliknya fungsi pendidikan relatif mengalami peningkatan walaupun sedikit tertahan di tahun 2020.

Grafik 6.2. Tren Alokasi dan Realisasi APBN Kaltim Fungsi Ekonomi 2016-2020 (miliar Rp)

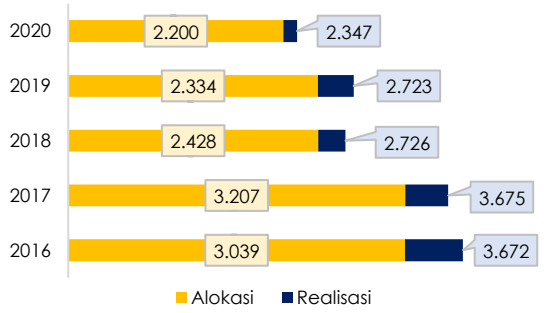

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Tren alokasi dan realisasi belanja fungsi ekonomi mengalami penurunan, utamanya di tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran belanja mengalami realokasi dan refocusing. Penurunan signifikan terjadi di tahun 2018 dengan jumlah hampir satu triliun rupiah. Sedangkan untuk tingkat realisasi relatif stabil di kisaran 90an persen.

Dengan adanya pandemi maka kegiatan/ proyek-proyek pemerintah mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, fokus pemerintah adalah menangani masalah kesehatan, sehingga alokasi yang semula diperuntukkan pembangunan ekonomi, dialihkan ke fungsi kesehatan. Alokasi yang semula dilaksanakan di daerah, direalokasi ke pusat supaya lebih terkoordinasi antar wilayah. Untuk tahun 2020 memang penanganan Covid-19 tersebut agak sedikit mengorbankan sisi ekonomi/ pembangunan. Langkah ini diambil karena pemerintah harus bisa menjamin kesehatan masyarakat dan menjaga persebaran Covid-19. Walapun begitu, pemerintah juga tetap menjamin kelangsungan hidup masyarakat terutama masyarakat miskin maupun rentan miskin dengan mengeluarkan program jaring

pengaman sosial. Pemerintah menggelontorkan dana melalui bantuan langsung tunai/ non tunai, bantuan sembako, bantuan produktif usaha mikro, subsidi listrik, subsidi internet pendidikan dan lain sebagainya.

Sisi kesehatan mendapatkan perhatian paling utama di masa pandemi. Dengan persebaran kasus Covid-19 yang begitu cepat dan adanya varian-varian baru yang bermunculan, membuat masyarakat dan pemerintah harus selalu waspada dan tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

Grafik 6.3. Tren Alokasi dan Realisasi APBN Kaltim Fungsi Kesehatan 2016-2020 (miliar Rp)

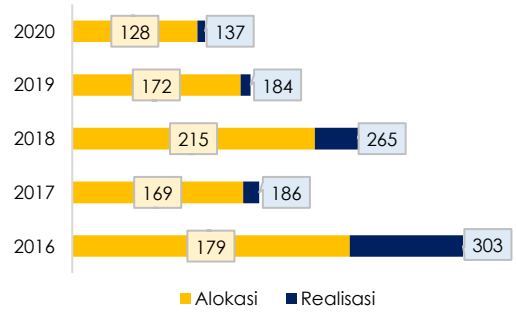

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Belanja fungsi kesehatan juga mengalami penurunan di daerah, disebabkan pencairan dana tersebut ditarik ke pusat. Kejadian pandemi yang tidak terduga sebelumnya membuat pemerintah harus bekerja dengan cepat untuk mengatasinya. Sementara itu, persebaran kasus Covid-19 yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia membuat alokasi anggaran yang tidak bisa digunakan di daerah, ditarik kembali oleh pusat. Alokasi tersebut dicairkan langsung oleh pemerintah pusat dan ditransfer ke pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait ataupun rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Dengan demikian terjadi pemerataan penanganan Covid-19 berdasarkan tingkat kegentingan wilayah masing-masing.

Selain itu pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam menghadapi pandemi tersebut. Sedangkan untuk pasien Covid-19, pemerintah juga memberikan bantuan operasional kesehatan tambahan (BOK-T) sehingga para pasien Covid-19 tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Berbagai program pemerintah tersebut memberikan dampak positif bagi IPM Kaltim. Indikator kesehatan dalam IPM yang diwakili usia harapan hidup (UHH) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan tetap meningkat ditahun 2020 dimasa pandemi.

Grafik 6.4. Tren Alokasi dan Realisasi APBN Kaltim Fungsi Pendidikan 2016-2020 (miliar Rp)

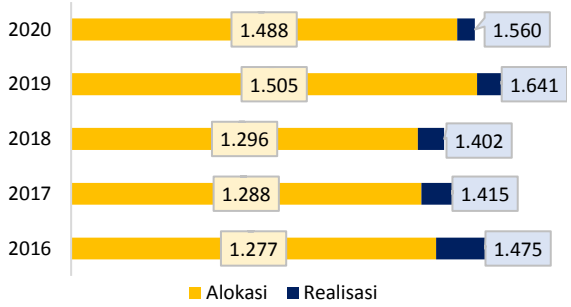

Sumber: Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Alokasi belanja fungsi pendidikan tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan cenderung masih meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Realisasi fungsi pendidikan mencapai Rp1,48 triliun dari pagu Rp1,56 triliun atau 95,38 persen. Pembangunan di sektor pendidikan

tersebut masih melanjutkan program-program yang telah dicanangkan yaitu kartu indonesia pintar, program bidik misi dan pembangunan-pembangunan infrastruktur pendidikan.

6.2.2.2 Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Dari sisi belanja pemerintah daerah yang tercermin dari APBD, belanja fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan di Kaltim cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Ditahun 2020, belanja fungsi ekonomi mengalami perlambatan, namun belanja fungsi kesehatan tetap tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan belanja pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan kesehatan dimasa pandemi.

Grafik 6.5. Proporsi Belanja APBD Kaltim per Fungsi 2016-2020 (miliar Rp)

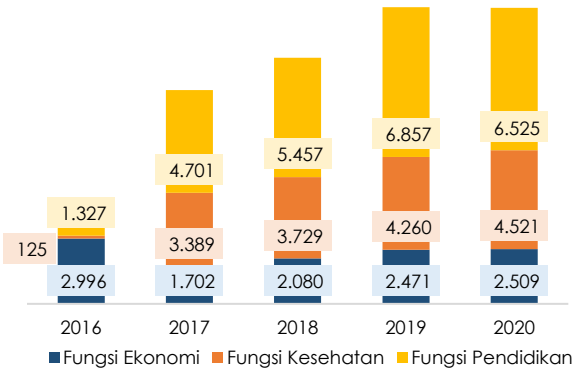

Sumber : Aplikasi DJPK, 2022 (diolah).

6.2.3 Capaian Output Strategis

Berbagai capaian output strategis yang dicapai di tahun 2021 merupakan cerminan keberhasilan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut merupakan wujud nyata peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di regional Kaltim.

6.2.3.1 Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan

Di bidang kesehatan, semua output yang direncanakan berhasil dicapai maksimal 100 persen bahkan beberapa output melebihi target. Di tahun 2021, pemerintah masih berfokus untuk penanganan pandemi, oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan dilakukan diberbagai sektor. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 6.5. Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan Kaltim 2021 (juta Rp)

Sektor	Output	Realisasi	Capaian	Satuan
Kesehatan	Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	4.092,0	351	Faskes
	Desa Pangan Aman	772,2	12	Desa
	Pasar Aman	198,9	4	Pasar
	Sampel Makanan yang Diperiksa BB/ BPOM	410,1	429	Persen
	Sampel Makanan yang Diperiksa Loka POM I	18,0	64	Persen
	Sampel Obat BB/BPOM	744,8	1.102	Persen
	Sampel Obat Loka POM I	66,4	161	Persen
	Sarana Distribusi Obat BB/BPOM	790,4	623	Persen
	Sarana Distribusi Obat Loka POM I	90,4	175	Persen
	Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	490,3	58	Sekolah
	Orientasi Program Penyakit HIV AIDS dan PIMS	1.194,2	160	Orang

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Namun demikian, alokasi dana yang digunakan langsung untuk penanganan pandemi berada di pusat. Sehingga pemerintah pusat bisa membagi sesuai proporsi kebutuhan dana untuk kesehatan berdasarkan tingkat keparahan penyebaran Covid-19.

6.2.3.2 Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan

Dari bidang pendidikan, situasi pandemi tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh rakyat. Output strategis di bidang pendidikan ini berupa kartu indonesia pintar, bantuan operasional sekolah, tunjangan guru non-pns dan rehabilitasi/ renovasi sekolah.

Tabel 6.6. Capaian Output Strategis Belanja Pendidikan Kaltim 2021 (juta Rp)

Sektor	Output	Realisasi	Capaian	Satuan
Pendidikan	KIP Kuliah	3.418,8	318	Orang
	Penerima BOS	18.970,3	16.758	Orang
	Penerima PIP	26,1	58	Orang
	TPG Non PNS	24.358,6	1.021	Orang
	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	21.402,0	5	Unit

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

6.2.3.3 Capaian Output Strategis Belanja Ekonomi

Tabel 6.7 Capaian Output Strategis Belanja Ekonomi Kaltim 2021 (juta Rp)

Sektor	Output	Realisasi	Capaian	Satuan
Ekonomi	Bandar Udara	208.257,9	7	Paket
	Fasilitas Pelabuhan Laut	47.324,1	1	Layanan
	Bendungan Sepaku Semoi	198.400,0	1	Unit
	Layanan Angkutan Jalan Perintis	3.793,4	2	Trayek
	Kapal Laut	511,1	10	Layanan
	Jalan	543.764,2	77,403	km
	Jembatan	244.072,5	552	m
	Perlengkapan Jalan	7.995,5	1	Provinsi
	Rumah Susun	25.851,1	154	Unit
	Sistem Pengelolaan Persampahan	27.859,8	19.648	KK
	Irigasi	4.632,7	53	Unit

Sumber : Aplikasi MEBE, 2022 (diolah).

Pandemi Covid-19 tidak hanya masalah kesehatan, namun juga menghantam sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat mengalami kontraksi, walaupun telah membaik di tahun 2021. Untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, pemerintah tetap menggelontorkan dana di sektor ekonomi walaupun sedikit menurun karena adanya realokasi untuk sektor kesehatan.

Capaian output strategis sektor ekonomi mayoritas berupa pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan untuk mendukung IKN baru di wilayah Kaltim seperti bendungan Sepaku-Semoi, Bandara Sepinggan Balikpapan dan Jembatan Pulau Balang.

6.3 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis berikut akan memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh belanja pemerintah baik pusat maupun daerah yang dirinci per fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Definisi variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Fungsi Ekonomi
   Semua kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah yang dianggarkan melalui APBN dan APBD selama satu periode pelaporan yang digunakan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Belanja fungsi ekonomi menggunakan data APBN-APBD selama lima tahun (2016-2020).
2. Belanja Fungsi Kesehatan
   Semua kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah yang dianggarkan melalui APBN dan APBD selama satu periode pelaporan yang digunakan untuk sektor kesehatan. Belanja fungsi kesehatan menggunakan data APBN-APBD selama lima tahun (2016-2020).
3. Belanja Fungsi Pendidikan
   Semua kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah yang dianggarkan melalui APBN dan APBD selama satu periode pelaporan yang digunakan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Belanja fungsi pendidikan menggunakan data APBN-APBD selama lima tahun (2016-2020).
4. Kesejahteraan Masyarakat
   Indikator kesejahteraan masyarakat dimulai dengan klasifikasi indikator dasar

yaitu pendapatan riil, kesehatan dan pendidikan. Indikator ini menggunakan proksi IPM per Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kaltim selama lima tahun (2016-2020).

Perbedaan rentang waktu antara variabel belanja dengan variabel kesejahteraan masyarakat karena menggunakan asumsi belanja pemerintah akan memberikan dampak yang optimal pada tahun depan.
Dari definsi variabel tersebut dibentuklah variabel dalam model sebagai berikut:

1. Y = Kesejahteraan masyarakat (*dependent variable*)
2. X1 = Belanja Fungsi Ekonomi (*independent variable*)
3. X2 = Belanja Fungsi Kesehatan (*independent variable*)
4. X3 = Belanja Fungsi Pendidikan (*independent variable*)

Berdasarkan hasil regresi, model persamaan pengaruh belanja ekonomi, belanja kesehatan dan belanja pendidikan terhadap IPM di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

$$IPM = 67{,}09 + 0{,}075Log(X1) + 0{,}228Log(X2) + 0{,}359Log(X3)$$

Dalam meningkatkan capaian IPM, maka tiga aspek dasar pembangunan manusia baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak perlu mendapatkan perhatian yang sama besar. Dari hasil regresi REM, dapat diambil kesimpulan bahwa belanja kesehatan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian IPM. Sedangkan belanja ekonomi dan belanja pendidikan juga berpengaruh positif terhadap IPM, namun tidak signifikan.

Kebijakan fiskal pada sektor kesehatan melalui pengalokasian belanja kesehatan baik dari APBN dan APBD, telah tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Belanja kesehatan dialokasikan untuk:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
   Diantaranya melalui penyediaan akses air minum layak, penyediaan air bersih, penyediaan fasilitas MCK, pembangunan septictank, dll.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan
   Diantaranya melalui pembangunan posyandu, puskesmas, rumah sakit, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, dll.
3. Meningkatkan perilaku hidup sehat
   Diantaranya melalui penyediaan alokasi anggaran Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas), edukasi pencegahan balita gizi buruk, dll.

Kebijakan fiskal pada sektor pendidikan melalui pengalokasian belanja pendidikan baik dari APBN dan APBD, dirasa belum tepat sasaran sehingga tidak signifikan mempengaruhi peningkatan pengetahuan masyarakat. Selain itu, faktor-faktor lain diluar belanja pemerintah juga mempengaruhi peningkatan pengetahuan masyarakat.
Rendahnya pengaruh belanja pendidikan terhadap capaian IPM dikarenakan:

1. wilayah geografis Kalimantan Timur yang luas sehingga penyediaan fasilitas sekolah, sarana prasarana dan tenaga pendidik belum merata.
2. kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin dihadapkan dengan biaya pendidikan di Kalimantan Timur yang tinggi.

3. program-program beasiswa pemerintah belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

Kebijakan fiskal pada sektor ekonomi melalui pengalokasian belanja ekonomi baik dari APBN dan APBD, dirasa belum tepat sasaran sehingga tidak signifikan mempengaruhi peningkatan standar hidup masyarakat. Selain itu, faktor-faktor lain diluar belanja pemerintah juga mempengaruhi peningkatan pengetahuan masyarakat.

Rendahnya pengaruh belanja ekonomi terhadap capaian IPM dikarenakan:

1. tingkat lapangan usaha yang tersedia masih rendah. Hal ini disebabkan sektor unggulan di Kaltim adalah pertambangan dan penggalian yang relatif lebih membutuhkan modal besar daripada menyerap tenaga kerja.
2. komposisi pengeluaran pemerintah yang sangat rendah dalam struktur PDRB Kaltim mempengaruhi signifikansi pengaruh belanja pemerintah.

6.4 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.4.1 Simpulan

1. Indeks kesejahteraan masyarakat Kaltim yang tercermin dari IPM mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, walaupun sempat tertahan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
2. IPM Kaltim sebesar 76,88 termasuk dalam kategori tinggi dan menjadi yang paling tinggi dibandingkan Provinsi lain se-Pulau Kalimantan. Untuk tingkat nasional, IPM Kaltim menduduki peringkat tiga, dibawah Jakarta dan Yogyakarta.
3. Namun demikian, secara spasial per kabupaten/ kota, IPM di Kaltim masih belum merata dengan wilayah kota jauh lebih tinggi daripada wilayah kabupaten.
4. IPM se-Kaltim tahun 2021 yang tertinggi terdapat di Kota Samarinda dengan 80,76 dan yang terendah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan capaian 67,95.
5. Tantangan yang lain adalah ketidakmerataan/ ketimpangan gender yang tercermin dari IPG/ rasio IPM perempuan dibagi IPM laki-laki sebesar 85,98, masih dibawah target nasional dengan nilai 91,07.
6. Berdasarkan analisis, belanja fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap IPM Kaltim dengan kekuatan 48,3 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-veriabel yang lain.
7. Secara parsial, hanya belanja fungsi kesehatan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan belanja fungsi ekonomi dan pendidikan hanya berpengaruh positif namun tidak signifikan.
8. Tidak signifikannya belanja fungsi ekonomi dan pendidikan disebabkan proporsi belanja pemerintah yang relatif kecil dalam pembentukan PDRB, dimana laju pertumbuhan/ PDRB tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia.
9. Pemindahan IKN ke wilayah Kaltim menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan manusia. Strategi untuk tetap menjaga kearifan

lokal dan masyarakat lokal tetap bisa eksis ditengah perpindahan IKN yang memungkinkan diikuti perpindahan sumber daya manusia dari luar Kaltim.

6.4.2 Rekomendasi

1. Meningkatkan alokasi belanja fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan di wilayah Kaltim baik dari APBN maupun APBD.
2. Mengakselerasi eksekusi anggaran yang ada sejak awal tahun sehingga manfaat atau hasilnya bisa dirasakan pada tahun berjalan terutama belanja modal infrastruktur.
3. Dari aspek ekonomi, akselerasi peningkatan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk meningkatkan akesibilitas antar wilayah di Kaltim.
4. Aspek kesehatan, meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, meningkatkan jumlah, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan.
5. Untuk aspek pendidikan, meningkatan infrastruktur pendidikan, mempermudah akses pendidikan, mewujudkan wajib belajar minimal 9 tahun secara gratis dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
6. Dalam kaitannya dengan pemindahan IKN, penyiapan SDM lokal yang berkualitas dan mampu bersaing sehingga SDM lokal bisa berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemindahan IKN maupun dalam kegiatan perekonomian di wilayah IKN dan sekitarnya.

BAB VII

KESIMPULAN & REKOMENDASI

BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

1. Visi dari RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 yaitu "Kalimantan Timur yang Berdaulat" yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan. Sedangkan Tema RKPD Tahun 2021 yaitu "Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".
2. Tantangan daerah utamanya berkaitan dengan bagaimana menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Transformasi struktur ekonomi dari *unrenewable resources* ke *renewable resources* dan pembangunan manusia yang lebih merata baik secara wilayah maupun gender.
3. Kaltim sedang menikmati masa bonus demografi. Hal ini ditandai dari persentase penduduk yang masih dalam usia produktif sebesar 70,28 persen jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif. Selain itu, Kaltim juga belum memasuki era *ageing population* dengan persentase penduduk lansia hanya 6,22 persen/ kurang dari 10 persen.
4. Tantangan dalam situasi pandemi adalah menjaga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 dapat terkendali sehingga tidak mengganggu perekonomian. Selain itu, membangkitkan sektor UMKM yang sangat terdampak pandemi serta tetap melanjutkan program jaring pengaman sosial yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
5. Pertumbuhan ekonomi regional Kaltim triwulan IV 2021 sebesar 2,91 persen (*yoy*), lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 5,02 persen (*yoy*). Secara *qtq*, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih dalam level positif sebesar 0,45 persen sedangkan untuk pertumbuhan PDRB tahunan mencapai 2,48 persen. Hal ini menandakan pergerakan ekonomi Kaltim tetap berjalan positif sepanjang tahun 2021.
6. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan PMTB menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2021. Dari sisi pengeluaran, secara *yoy*, semua komponen PDRB mengalami pertumbuhan positif dengan komponen pertumbuhan tertinggi terdapat pada pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB masing-masing 5,63 persen dan 9,81 persen.
7. Struktur PDRB LU tahun 2021 masih dikuasai sektor pertambangan dan penggalian dengan share 45,05 persen. Hal ini ditopang oleh peningkatan

permintaan batubara dari Tiongkok yang mengerek HBA ke titik teritinggi mencapai US$215,01 per ton.

8. PDRB per kapita regional Kaltim di tahun 2020 mencapai Rp161,3 juta, jauh di atas PDB per kapita nasional yang hanya Rp57,3 juta. Secara spasial, PDRB per kapita tertinggi berada di Kota Bontang dengan nilai Rp312,15 juta.
9. Tingkat suku bunga di Kaltim rata-rata sebesar 11-12 persen untuk kredit mikro dan 7-8 persen untuk kredit konsumsi, korporasi dan ritel walaupun suku bunga acuan yang dikeluarkan BI (BI7DRR) stabil dari awal tahun di angka 3,5 persen.
10. Tingkat inflasi Kaltim masih dalam level aman dan terkendali dengan besaran 0, persen 0,68 (*mtm*) dan 2,15 persen (*yoy*). Tingkat Inflasi di Kaltim disebabkan oleh faktor cuaca dan infrastruktur yang mempengaruhi aliran distribusi barang dan jasa.
11. Nilai tukar rupiah terhadap US Dollar sebagai mata uang utama dunia, dalam tiga tahun terakhir terpantau stabil di kisaran Rp14.000 per USD. Namun demikian nilai tukar rupiah sempat melemah diawal pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020.
12. IPM Kaltim tumbuh positif sebesar 0,64 poin di tahun 2021 dibandingkan tahun lalu. IPM Kaltim tertinggi se-Kalimantan dan menduduki peringkat tiga tingkat nasional di bawah Jakarta dan Yogyakarta.
13. Tingkat kemiskinan Kaltim sebesar 6,27 persen pada September 2021 turun 0,37 persen poin (*yoy*). Sementara tingkat kemiskinan perkotaan di level 4,74 persen dan di perdesaan 9,63 persen. Garis kemiskinan tercatat sebesar Rp703.233,- per kapita per bulan.
14. Tingkat ketimpangan juga mengalami penurunan 0,003 poin menjadi 0,331 di bulan September 2021. Selain itu, distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan ukuran Bank Dunia tercatat rendah, sebesar 20,62 persen pada kelompok penduduk 40 persen terbawah.
15. Tingkat pengangguran di bulan Agustus 2021 turun menjadi 6,83 persen atau 126,19 ribu jiwa. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2021 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Timur (21,99 persen), diikuti dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Perdagangan (20,84 persen), serta Akomodasi dan Makan Minum (7,66 persen).
16. Nilai Tukar Petani (NTP) naik signifikan sepanjang tahun 2021 menjadi 129,93, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun tipis ke level 102,00.
17. Prospek perekonomian Kaltim 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong disahkannya UU IKN yang akan membangkitkan berbagai sektor lapangan usaha dan didorong oleh aktivitas masyarakat yang telah kembali normal. Walaupun demikian harus tetap waspada terhadap pandemi Covid-19 serta kondisi ekonomi global yang masih rentan/ belum stabil.
18. Pendapatan negara tumbuh positif seiring pertumbuhan penerimaan pajak

28,19 persen (*yoy*) dan PNBP sebesar 15,00 persen (*yoy*). Bea keluar menjadi motor pertumbuhan penerimaan pajak dengan *growth* 7.797,49 persen (*yoy*). Sedangkan disisi PNBP, jasa layanan BLU menjadi kontributor utama pertumbuhan dengan angka 58,18 persen (*yoy*).

19. *Tax ratio* Kaltim relatif menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh sebagian wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki NPWP di luar Kaltim sehingga tidak dihitung sebagai penerimaan Kaltim. Selain itu, adanya insentif perpajakan di tahun 2020 dan 2021 sebagai stimulus fiskal dibidang perpajakan untuk mengatasi dampak pandemi.
20. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh sebesar 5,4 persen (*yoy*), sedangkan realisasi TKDD mengalami kontraksi 11,33 persen (*yoy*). Penyebab penurunan realisasi TKDD dibandingkan tahun lalu antara lain: 1)alokasi pagu TKDD turun sebesar 24,9 persen; 2)tidak ada kebijakan relaksasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan 3)keterlambatan pencairan dana transfer umum (DBH dan DAU).
21. Kebijakan penyaluran BLT DD langsung tiga bulan ke rekening desa memberi dampak positif dengan telah tersalurkannya BLT DD seluruh desa di wilayah Kaltim sampai bulan ke-12.
22. Defisit APBN regional Kaltim turun menjadi Rp8,03 triliun jika dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp14,67 triliun, atau lebih rendah 45,26 persen.
23. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,16 persen. Namun demikian, pendapatan asli daerah tumbuh positif sebesar 19,96 persen.
24. Realisasi belanja operasional masih dominan di seluruh pemda wilayah Kaltim yaitu antara 38,55 persen sampai 83,42 persen. Sedangkan menurut jenis belanja, alokasi tertinggi masih terdapat pada belanja barang dan belanja pegawai.
25. Realisasi pendapatan negara konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp 30,54 triliun atau tumbuh 27,00 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja konsolidasian juga mengalami peningkatan 7,65 persen (*yoy*). Kinerja pelaksanaan anggaran konsolidasian tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020 ditunjukkan oleh penurunan defisit sebesar 24,81 persen dan SIKPA turun 47,48 persen.
26. Kontribusi pengeluaran pemerintah konsolidasian dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan 0,09 persen poin dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, dari sisi investasi, kontribusi pemerintah menurun 0,12 persen poin, walaupun secara nominal tumbuh Rp576 miliar. Kontribusi tersebut masih belum kembali seperti tahun 2019, dimasa sebelum pandemi.
27. Secara umum, sektor unggulan di Kaltim berdasarkan lapangan usaha adalah pertambangan dan penggalian. Namun demikian, apabila dilihat spasial per Pemda maka terdapat sektor unggulan yang berbeda-beda dari masing-masing Pemda.
28. Berdasarkan tabel I-O, nilai pengganda output terbesar terdapat pada sub sektor ketenagalistrikan dengan nilai

2,9475 sedangkan pengganda pendapatan terbesar di sub sektor jasa pendidikan dengan nilai 0,6039. Dari analisis keterkaitan antar sektor, ketenagalistrikan mendapat nilai tertinggi untuk *backward linkage* dengan 2,9475, sementara itu *forward linkage* terbesar di sub sektor industri batubara dan pengilangan migas dengannilai 6,8892.

29. Sektor potensial Kaltim tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yaitu sektor industri pengolahan dan konstruksi. Hanya terdapat penambahan satu sektor potensial yaitu pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan.
30. Pemetaan komoditas/ produk dan jenis usaha unggulan UMKM per daerah sangat penting untuk memberikan gambaran, supaya kebijakan pemerintah lebih terarah dan tepat sasaran.
31. UU HKPD dimaknai sebagai solusi atas desentralisasi fiskal. Harmonisasi/ sinkronisasi maupun keselarasan dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengejawantahkan tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
32. Indeks kesejahteraan masyarakat Kaltim yang tercermin dari IPM mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, walaupun sempat tertahan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
33. Secara spasial per kabupaten/ kota, IPM di Kaltim masih belum merata dengan wilayah kota jauh lebih tinggi daripada wilayah kabupaten. IPM se-Kaltim tahun 2021 yang tertinggi terdapat di Kota Samarinda dengan 80,76 dan yang terendah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan capaian 67,95.
34. Tantangan yang lain adalah ketidakmerataan/ ketimpangan gender yang tercermin dari IPG/ rasio IPM perempuan dibagi IPM laki-laki sebesar 85,98, masih dibawah target nasional dengan nilai 91,07.
35. Berdasarkan analisis, belanja fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap IPM Kaltim dengan kekuatan 48,3 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-veriabel yang lain.
36. Dari hasil regresi REM, dapat diambil kesimpulan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian IPM. Sedangkan belanja ekonomi dan belanja pendidikan juga berpengaruh positif terhadap IPM, namun tidak signifikan.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Pembangunan Ekonomi Regional

1. Akselerasi transformasi struktur perekonomian regional Kaltim, *unrenewable resources* ke *renewable resources*. Memberikan perhatian lebih baik program maupun alokasi dana untuk sektor-sektor potensial selain pertambangan dan penggalian, misalnya sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor transportasi. Sehingga terjadi diversifikasi

lapangan usaha utama pembentuk perekonomian.

2. Isu lingkungan imbas dari pertambangan dan penggalian harus lebih diperhatikan. Misalnya dengan pembatasan pembukaan lahan pertambangan baru dan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda untuk pemberian ijin pertambangan. Selain itu, pemerintah bisa mulai fokus investasi ke *renewable energy* dan *green energy*.
3. Untuk mendukung hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah, perlu dikeluarkan kebijakan insentif perpajakan. Misalnya memberikan insentif pajak pada barang jadi atau setengah jadi.
4. Dukungan akselerasi industri pengolahan terutama industri pengolahan kayu dan kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah. Misalnya dengan cara investasi di KEK MBTK supaya segera beroperasi.
5. Memperkuat pengawasan kebijakan subsidi dan distribusi pupuk dan pakan sehingga tidak terjadi kekosongan stok di daerah. Misalnya dengan membentuk satgas. Hal ini juga mendorong diversifikasi lapangan usaha, utamanya sektor penyerap tenaga kerja terbesar.
6. Pola impor pangan harus memperhatikan musim panen di daerah. Selain itu pola pemasaran harus diperbaiki supaya petani/ nelayan tidak terjebak tengkulak. Dinas terkait atau BULOG harus proaktif untuk melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga sehingga tidak merugikan produsen/ petani-nelayan maupun konsumen/ masyarakat.
7. Akselerasi pembangunan/ perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk memperlancar arus distribusi barang/ jasa, guna menekan/ mengendalikan laju inflasi.

7.2.2 Pelaksanaan APBN dan APBD

7.2.2.1 Pemerintah Pusat

8. Untuk mendapatkan potensi pajak regional secara riil, perlu dibuat sistem yang dapat memberikan informasi setoran pajak atas objek pajak di daerah, bukan berdasarkan NPWP yang dimungkinkan dapat berasal dari luar daerah objek pajak.
9. Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD, dapat diterapkan pembatasan revisi/ pergeseran dana untuk penambahan perjalanan dinas.
10. Peningkatan alokasi belanja pemerintah dalam APBN baik belanja K/L maupun transfer ke daerah yang diarahkan ke sektor pertanian dan perikanan. Alokasi belanja ini tidak hanya sekedar infrastruktur, akan tetapi belanja-belanja yang langsung kepada petani maupun nelayan, misalnya bantuan benih, alat-alat pertanian, kapal, alat penangkap ikan, dll.
11. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan satuan kerja baik vertikal maupun daerah, kebijakan relaksasi ataupun dispensasi pelaksanaan APBN hendaknya ditiadakan. Hal ini untuk memberikan efek jera terhadap satuan kerja sehingga akan lebih disiplin dan taat peraturan.
12. Mempermudah sistem perhitungan dan penyaluran dana transfer ke daerah sehingga tidak terjadi keterlambatan

transfer maupun kekurangan transfer. Misalnya dengan otomasi pembagian porsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat melakukan setoran.

13. Peraturan/ petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan hendaknya diterbitkan di awal tahun anggaran, utamanya dari Kementerian Teknis untuk pelaksanaan DAK Fisik, DAU dan DBH.
14. Meningkatkan peran program KUR dan UMi yang lebih fleksibel dan *go online* supaya bisa menekan pertumbuhan dan pemanfaatan pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang sedang marak di masyarakat.
15. Mengadakan pelatihan terhadap petani dan nelayan dari Kementerian teknis yang bertujuan untuk peningkatan produksi dan pemasaran, misalnya pelatihan petani dan nelayan *go online*.

7.2.2.2 Pemerintah Daerah

16. Akselerasi belanja APBD dilakukan sejak awal tahun sehingga manfaat belanja tersebut akan dapat dirasakan pada tahun berkenaan.
17. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi daerah untuk meningkatkan PAD.
18. Penetapan pejabat perbendaharaan OPD dilakukan awal tahun atau mengeluarkan peraturan daerah yang menyatakan pejabat perbendaharaan tahun lalu masih berlaku sebelum ditetapkan pejabat perbendaharaan yang baru.
19. Optimalisasi SILPA untuk pembangunan infrastruktur dengan perencanaan yang lebih terarah dan terukur sehingga bisa dieksekusi langsung di awal tahun anggaran.
20. Sejalan dengan optimalisasi SILPA, Pemda dapat menentukan besaran sisa anggaran/ SILPA untuk *cash buffer* atau dana cadangan maksimal dalam satu tahun anggaran sehingga tidak ada *idle cash* di kas daerah. Penentuan ini bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk selanjutnya bisa dituangkan dalam peraturan.
21. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan manusia responsif gender untuk meningkatkan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.
22. Dukungan daerah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan (Perda) yang lebih pro terhadap investasi dan menghapus Perda yang menghambat investasi. Hal ini sebagai implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

7.2.3 Pemindahan Ibu Kota Negara ke Wilayah Kaltim

23. Akselerasi pelaksanaan pemindahan IKN, serta memberikan *tagging* pada dokumen pelaksanaan anggaran sehingga memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi atas progres pelaksanaannya.
24. Pembangunan IKN harus mewujudkan penghematan energi dan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca serta mempertahankan keanekaragaman hayati di Kaltim.
25. Akselerasi/ peningkatan pembangunan SDM lokal sehingga memiliki daya saing serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses pemindahan IKN maupun ketika IKN telah berjalan.

26. Pemerintah harus mengutamakan warga lokal untuk berperan aktif dalam perekonomian pendukung IKN, sehingga warga lokal tidak terpinggirkan atau hanya jadi penonton.
27. Pemerintah hendaknya melakukan edukasi dan sosialisasi, terutama pada warga lokal sekitar IKN, mengenai *master plan* pemindahan IKN. Selain itu, potensi-potensi pengembangan IKN, pemanfaatan SDM lokal dan konsep *green city/ forest city* yang tetap menjaga kelestarian alam sekitarnya.

7.2.4 UMKM

28. Dukungan pemerintah melalui APBN dan APBD untuk penguatan basis produksi sesuai dengan UMKM unggulan daerah dan mendorong hilirisasi produk-produk UMKM.
29. Dalam penciptaan daya saing, pemerintah hendaknya melakukan pendampingan/ pelatihan/ sosialisasi guna mendorong digitalisasi UMKM serta memfasilitasi/ mempermudah akses ekspor produk UMKM. Selain itu, kemudahan sertifikasi standar nasional maupun internasional.
30. Pemberian stimulus dalam bentuk kebijakan pro UMKM atau investasi/ pembiayaan mudah dan murah untuk peningkatan produksi UMKM.
31. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pelaku UMKM yang sejenis untuk meng-*upgrade* pola pikir dan manajemen usaha.
32. Percepatan adopsi teknologi untuk peningkatan kapasitas UMKM mulai dari produksi sampai pemasaran produk.
33. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan UMKM melalui kemudahan penyaluran pembiayaan dan peningkatan teknologi. Selain itu, mendorong dan mempromosikan UMKM melalui sistem *marketplace*.

LAMPIRAN & DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Tahun 2019 – 2021 (miliar Rp)

Uraian	2019			2020			2021			Growth%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	(Realisasi yoy)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**22.675,10**	**21.634,30**	**95,41%**	**17.916,3**	**17.597,1**	**98,22%**	**19.413,7**	**22.355,63**	**115,15%**	**27,04%**
PENERIMAAN PERPAJAKAN	**21.601,4**	**20.063,4**	**92,88%**	**16.759,0**	**16.066,3**	**95,87%**	**18.167,0**	**20.595,2**	**113,37%**	**28,19%**
Pajak Dalam Negeri	20998,7	19481,7	**92,78%**	16.284,8	15.564,8	**95,58%**	17.645,2	16.740,6	**94,87%**	**7,55%**
Pajak Perdagangan Internasional	602,7	581,7	**96,52%**	474,2	501,5	**105,76%**	521,8	3.854,6	**738,72%**	**668,62%**
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**1.073,70**	**1.570,90**	**146,31%**	**1.157,3**	**1.530,8**	**132,27%**	**1.246,7**	**1.760,4**	**141,20%**	**15,00%**
Penerimaan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Penerimaan Dari Kekayaan Negara D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
PNBP Lainnya	810,10	1.274,80	**157,36%**	867,6	1.211,1	**139,59%**	909,4	1.254,7	**137,97%**	**3,60%**
Pendapatan BLU	263,60	296,10	**112,33%**	289,7	319,7	**110,36%**	337,3	505,7	**149,93%**	**58,18%**
HIBAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
BELANJA NEGARA	**37.562,39**	**35.280,55**	**93,93%**	**33.164,9**	**32.267,3**	**97,29%**	**31.004,8**	**30.385,6**	**98,00%**	**-5,83%**
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	**9.171,59**	**8.408,15**	**91,68%**	8.980,7	8.314,0	**92,58%**	9.470,1	9.146,1	**96,58%**	**10,01%**
Belanja Pegawai	3.129,97	3.065,44	**97,94%**	3.230,2	3.065,6	**94,90%**	3.077,7	3.052,5	**99,18%**	**-0,43%**
Belanja Barang	3.526,39	3.238,91	**91,85%**	3.615,2	3.238,0	**89,57%**	3.243,4	3.056,8	**94,25%**	**-5,60%**
Belanja Modal	2.501,46	2.092,91	**83,67%**	2.125,4	2.000,6	**94,13%**	3.142,5	3.030,4	**96,43%**	**51,47%**
Belanja Bantuan Sosial	13,77	10,89	**79,08%**	9,9	9,8	**98,99%**	6,5	6,4	**98,44%**	**-34,69%**
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Belanja Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	**28.390,80**	**26.872,40**	**94,65%**	24.184,2	23.953,3	**99,05%**	21.534,7	21.239,5	**98,63%**	**-11,33%**
TRANSFER KE DAERAH	**27.520,70**	**26.011,80**	**94,52%**	23.284,4	23.054,3	**99,01%**	20.595,7	20.314,6	**98,64%**	**-11,88%**
Dana Perimbangan	**27.323,70**	**25.824,90**	**94,51%**	**22.790,8**	**22.569,5**	**99,03%**	**20.147,4**	**19.866,3**	**98,60%**	**-11,98%**
Dana Transfer Umum	**24.168,00**	**22.883,30**	**94,68%**	**19.774,9**	**19.677,6**	**99,51%**	**16.741,9**	**16.741,8**	**100,00%**	**-14,92%**
Dana Bagi Hasil	18.621,0	17.365,3	**93,26%**	14.339,4	14.284,5	**99,62%**	11.414,2	11.414,2	**100,00%**	**-20,09%**
Dana Alokasi Umum	5.547,0	5.518,0	**99,48%**	5.435,5	5.393,1	**99,22%**	5.327,7	5.327,6	**100,00%**	**-1,21%**
Dana Transfer Khusus	**3.155,70**	**2.941,60**	**93,22%**	**3.015,9**	**2.891,9**	**95,89%**	**3.405,5**	**3.124,5**	**91,75%**	**8,04%**
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.147,8	1.060,2	**92,37%**	1.016,1	898,1	**88,39%**	1.285,1	1.100,0	**85,60%**	**22,48%**
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.007,9	1.881,4	**93,70%**	1.999,8	1.993,8	**99,70%**	2.120,4	2.024,5	**95,48%**	**1,54%**
Dana Insentif Daerah	**197**	**186,9**	**94,87%**	**493,6**	**484,8**	**98,22%**	**448,3**	**448,3**	**100,00%**	**-7,53%**
Dana Insentif Daerah	197	186,9	**94,87%**	493,6	484,8	**98,22%**	448,3	448,3	**100,00%**	**-7,53%**
Dana Otsus dan DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Dana Tambahan Otonomi Khu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Dana Keistimewaan DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
DANA DESA	**870,1**	**860,6**	**98,91%**	**899,8**	**899,0**	**99,91%**	**939,0**	**924,9**	**98,50%**	**2,88%**
Dana Desa	**870,1**	**860,6**	**98,91%**	**899,8**	**899,0**	**99,91%**	**939,0**	**924,9**	**98,50%**	**2,88%**
SURPLUS/DEFISIT	**(14.887,29)**	**(13.646,25)**	**91,66%**	**(15.248,6)**	**(14.670,2)**	**96,21%**	**(11.591,1)**	**(8.030,0)**	**69,28%**	**-45,26%**
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**(14.887,29)**	**(13.646,25)**	**91,66%**	**(15.248,6)**	**(14.670,2)**	**96,21%**	**(11.591,1)**	**(8.030,0)**	**69,28%**	**-45,26%**

Sumber: Aplikasi OMSPAN, SIMTRADA, Kanwil DJP Kaltimtara dan Kanwil DJBC Kalbagtim, 2022 (diolah).

Tabel Pagu dan Realisasi APBD Tahun 2019 – 2021 (miliar Rp)

Uraian	2019			2020			2021			Growth%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	(Realisasi yo
PENDAPATAN DAERAH	**38.189,2**	**39.861,1**	**104,38%**	**32.337,2**	**33.822,9**	**104,59%**	**32.620,6**	**32.414,2**	**99,37%**	**-4,16%**
Pendapatan Asli Daerah	**8.391,9**	**9.501,9**	**113,23%**	**6.487,4**	**7.668,7**	**118,21%**	**8.005,8**	**9.199,1**	**114,91%**	**19,96%**
Pajak Daerah	5.931,8	6.413,6	108,12%	4.364,4	5.132,2	117,59%	5.606,7	6.216,9	110,88%	21,14%
Retribusi Daerah	195,1	190,9	97,86%	148,6	149,2	100,41%	166,3	145,8	87,70%	-2,25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	299,9	505,2	168,47%	272,1	183,8	67,54%	337,8	289,8	85,80%	57,69%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.965,2	2.392,3	121,73%	1.702,3	2.203,5	129,44%	1.895,1	2.546,5	134,38%	15,57%
Pendapatan Transfer	**28.772,4**	**29.465,6**	**102,41%**	**24.340,1**	**25.199,2**	**103,53%**	**24.087,1**	**22.868,5**	**94,94%**	**-9,25%**
Transfer Pemerintah Pusat	**23.841,3**	**24.706,3**	**103,63%**	**21.249,5**	**22.289,6**	**104,89%**	**20.084,3**	**18.876,4**	**93,99%**	**-15,31%**
Dana Perimbangan	23.048,2	23.996,6	104,11%	20.325,4	21.528,2	105,92%	18.883,2	17.906,4	94,83%	-16,82%
Dana Insentif Daerah	340,4	263,1	77,29%	809,0	646,8	79,96%	456,5	448,3	98,21%	-30,69%
Dana Otonomi khusus	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,00%
Dana Keistimewaan	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,00%
Dana Desa	452,7	446,6	98,66%	115,1	114,6	99,53%	744,6	521,7	70,06%	355,19%
Transfer Antar Daerah	**4.931,1**	**4.759,3**	**96,52%**	**3.090,7**	**2.909,7**	**94,14%**	**4.002,8**	**3.992,1**	**99,73%**	**37,20%**
Pendapatan Bagi Hasil	3.048,2	2.893,9	94,94%	1.987,5	1.856,8	93,42%	2.345,8	2.455,9	104,70%	32,27%
Bantuan Keuangan	1.882,9	1.865,4	99,07%	1.103,2	1.052,9	95,44%	1.657,1	1.536,2	92,70%	45,90%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**1.024,9**	**893,6**	**87,19%**	**1.509,6**	**955,0**	**63,26%**	**527,7**	**346,6**	**65,68%**	**-63,71%**
Hibah	463,4	337,6	**72,85%**	628,4	338,6	**53,88%**	310,8	221,2	**71,19%**	-34,66%
Dana Darurat	0,0	0,0	**-**	0,0	0,0	**-**	0,0	0,0	**-**	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	561,5	556,1	**99,03%**	881,2	616,4	**69,95%**	216,9	125,3	**57,79%**	-79,67%
BELANJA DAERAH	**42.826,3**	**37.297,9**	**87,09%**	**39.601,6**	**33.221,9**	**83,89%**	**40.216,8**	**33.610,7**	**83,57%**	**1,17%**
Belanja Operasi	**24.037,1**	**20.777,2**	**86,44%**	**23.242,1**	**19.621,0**	**84,42%**	**24.046,7**	**20.237,7**	**84,16%**	**3,14%**
Belanja Pegawai	10.580,3	9.270,4	87,62%	10.848,6	9.557,5	88,10%	10.283,3	9.157,4	89,05%	-4,19%
Belanja Barang dan Jasa	11.867,7	10.101,7	85,12%	10.851,8	8.860,6	81,65%	12.736,4	10.302,3	80,89%	16,27%
Belanja Bunga	26,1	25,9	99,35%	10,8	10,8	99,46%	21,7	16,6	76,80%	54,27%
Belanja Subsidi	6,6	4,0	60,01%	0,3	0,0	0,00%	13,0	12,0	92,31%	100,00%
Belanja Hibah	1.449,8	1.287,5	88,80%	1.358,4	1.100,2	80,99%	952,1	722,1	75,84%	-34,37%
Belanja Bantuan Sosial	106,7	87,8	82,23%	172,2	92,0	53,41%	40,2	27,3	67,98%	-70,27%
Belanja Modal	**11.250,8**	**9.319,7**	**82,84%**	**8.867,8**	**7.356,6**	**82,96%**	**9.095,5**	**7.337,9**	**80,68%**	**-0,25%**
Belanja Modal	11.250,8	9.319,7	82,84%	8.867,8	7.356,6	82,96%	9.095,5	7.337,9	80,68%	-0,25%
Belanja Tidak Terduga	**106,4**	**15,4**	**14,49%**	**1.729,3**	**1.056,3**	**61,08%**	**946,5**	**570,0**	**60,22%**	**-46,04%**
Belanja Tidak Terduga	106,4	15,4	14,49%	1.729,3	1.056,3	61,08%	946,5	570,0	60,22%	-46,04%
Belanja Transfer	**7.432,0**	**7.185,5**	**96,68%**	**5.762,4**	**5.188,1**	**90,03%**	**6.128,1**	**5.465,1**	**89,18%**	**5,34%**
Belanja Bagi Hasil	3.101,4	2.904,4	**93,65%**	1.925,1	1.876,2	**97,46%**	2.525,6	2.466,3	**97,65%**	31,46%
Belanja Bantuan Keuangan	4.330,6	4.281,2	**98,86%**	3.837,3	3.311,9	**86,31%**	3.602,5	2.998,8	**83,24%**	-9,45%
SURPLUS/ (DEFISIT)	**-4.637,0**	**2.563,2**	**-55,28%**	**-7.264,4**	**601,0**	**-8,27%**	**-7.596,2**	**-1.196,5**	**15,75%**	**-299,09%**
PEMBIAYAAN	**4.637,0**	**4.762,0**	**102,69%**	**7.264,4**	**6.993,8**	**96,28%**	**7.583,8**	**6.916,4**	**91,20%**	**-1,11%**
Penerimaan Pembiayaan	**4.887,6**	**4.885,2**	**99,95%**	**7.544,4**	**7.189,4**	**95,29%**	**7.778,3**	**7.041,2**	**90,52%**	**-2,06%**
SiLPA	4.855,9	4.855,9	100,00%	7.354,2	7.188,1	97,74%	7.387,7	7.040,1	95,29%	-2,06%
Pencairan Dana Cadangan			-			-	0,0	0,0	-	0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-			-	0,0	0,0	-	0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	30,7	28,0	91,20%	189,1	0,0	0,00%	389,5	0,0	0,00%	0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,0	1,3	125,95%	1,0	1,3	127,83%	1,0	1,1	106,41%	-16,76%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-			-	0,0	0,0	-	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	**250,6**	**123,2**	**49,17%**	**280,0**	**195,6**	**69,84%**	**194,5**	**124,8**	**64,15%**	**-36,20%**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	43,0	36,2	**84,13%**	12,3	12,3	**100,00%**	55,1	46,3	**84,07%**	275,75%
Penyertaan Modal Daerah	202,6	87,0	**42,97%**	267,7	183,2	**68,45%**	137,4	78,4	**57,09%**	-57,20%
Pembentukan Dana Cadangan			**-**			**-**	0,0	0,0	**-**	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	5,0	0,0	**0,00%**			**-**	2,0	0,0	**0,00%**	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			**-**			**-**	0,0	0,0	**-**	0,00%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,0**	**7.325,2**	**-3233174404583950%**	**0,0**	**7.594,8**	**-4860685071344900%**	**-12,5**	**5.719,9**	**-45868,44%**	**-24,69%**

Sumber: BPKAD, 2022 (diolah).

Hasil Regresi IPM dengan Belanja Pemerintah

Gambar Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

```
Fixed-effects (within) regression           Number of obs      =        50
Group variable: Lokasi                      Number of groups   =        10

R-sq:                                       Obs per group:
     within  = 0.6065                                         min =         5
     between = 0.3282                                         avg =       5.0
     overall = 0.1892                                         max =         5

                                            F(3,37)            =     19.01
corr(u_i, Xb)  = 0.3110                     Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         IPM |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          le |   .0542165   .1657588     0.33   0.745    -.2816428    .3900758
          lk |   .2375343   .1122258     2.12   0.041     .0101433    .4649253
          lp |   .3302797   .2456058     1.34   0.187    -.1673648    .8279243
       _cons |     67.528   2.317166    29.14   0.000     62.83298    72.22302
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  4.2462573
     sigma_e |  .44980249
         rho |  .98890353   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(9, 37) = 329.32                     Prob > F = 0.0000
```

Gambar Hasil Regresi *Random Effect Model* (REM)

```
Random-effects GLS regression               Number of obs      =        50
Group variable: Lokasi                      Number of groups   =        10

R-sq:                                       Obs per group:
     within  = 0.6061                                         min =         5
     between = 0.3329                                         avg =       5.0
     overall = 0.2026                                         max =         5

                                            Wald chi2(3)       =     58.45
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         IPM |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          le |   .0751837   .1645031     0.46   0.648    -.2472364    .3976039
          lk |   .2284678   .1115282     2.05   0.041     .0098765    .4470591
          lp |   .3595388   .2436668     1.48   0.140    -.1180395     .837117
       _cons |   67.09417   2.666093    25.17   0.000     61.86872    72.31961
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  4.3302348
     sigma_e |  .44980249
         rho |  .9893252   (fraction of variance due to u_i)
```

Gambar Hasil Uji Hausman

```
                 ---- Coefficients ----
          |      (b)        (B)          (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
          |       fem        rem         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          le |   .0542165    .0751837      -.0209672       .0203646
          lk |   .2375343    .2284678       .0090665       .0124934
          lp |   .3302797    .3595388       -.029259       .0308004
------------------------------------------------------------------------------
                    b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
     B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

  Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                        =      1.58
              Prob>chi2 =     0.6650
```

Sumber: BPS, Aplikasi MEBE dan GFS Kaltim, 2022 (diolah dengan stata).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistika. (2022), Berita Resmi Statistik.

Bappeda Prov. Kalimantan Timur. (2019), Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Bappeda Prov. Kalimantan Timur. (2021), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2021 dan 2022.

Bappenas. (2020), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Bappenas. (2021), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Gujarati, D. N. (2003), *Basic Econometrics: Fifth Edition* (edisi Indonesia). -: Mc Graw-Hill.

Meckling, M. C. (1976), Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.

Muhdi. (2021), *Fiscal Federalism, Asymmetric Decentralization* dan *Interjurisdictional Externalities*. Lentera Bumi Etam Vol. 1 No. 5 September 2021.

Peraturan Gubernur Kaltim No. 8 Tahun 2021. (2021).

Todaro, M. P. (2012), *Economic Development - eleventh edition*. New York: Addison Wesley.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (2004).

*World Commission on Environment and Development. (*1990).

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR